

# SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI



Adam Smith  
1776

Karl Marx  
1867

John Maynard Keynes  
1936

Joseph Stiglitz  
1981

Erik Bryniolfsson  
2014



Jan Horas Veryady Purba

# **SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI**

**Jan Horas Veryady Purba**



## SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI

Penulis: Jan Horas Veryady Purba  
Editor: Jeremy Hans Immanuel  
Cover: Jan Horas Veryady Purba  
Ukuran: xii, 208 hlm, Uk: 15,5x23 cm



### PENERBIT KESATUAN PRESS

Anggota IKAPI (366/Anggota Luar  
Biasa/JBA/2020)  
Kampus IBI Kesatuan  
Jalan Ranggagading No.1 Bogor 16123  
email: [kesatuanpress@ibik.ac.id](mailto:kesatuanpress@ibik.ac.id)

### ISBN :

Copyright @2025 Pada Penulis  
Cetakan Pertama: November 2025

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

#### UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai di maksud pada Ayat [1] di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ini hadir sebagai kontribusi penting dalam literatur akademik yang menjembatani pemahaman historis dan analitis tentang evolusi gagasan ekonomi. Di tengah kompleksitas ekonomi global dan transformasi digital yang terus berlangsung, memahami akar pemikiran ekonomi menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. Buku ini tidak hanya menyajikan aliran-aliran besar seperti klasik, Keynesian, dan monetaris, tetapi juga mengangkat pendekatan kontemporer seperti ekonomi perilaku, institusional, dan digital dengan kedalaman yang sistematis.

Sebagai penerbit, kami percaya bahwa karya ini akan menjadi referensi utama bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami dinamika ekonomi dari perspektif historis dan interdisipliner. Dengan struktur yang terorganisir, bahasa yang akademis namun komunikatif, serta cakupan yang luas dari Yunani kuno hingga era kecerdasan buatan, buku ini mencerminkan semangat Kesatuan Press dalam mendukung literasi ekonomi yang kritis, kontekstual, dan transformatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis atas dedikasi intelektualnya, dan berharap buku ini memberi manfaat luas bagi dunia pendidikan dan kebijakan publik.



Kesatuan Press Bogor, Indonesia

## PRAKATA

Pemikiran ekonomi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari pergulatan ide, krisis, dan transformasi sosial yang membentuk arah peradaban. Buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ini disusun sebagai upaya sistematis untuk menelusuri jejak intelektual dari para pemikir ekonomi sejak era pra-klasik hingga era digital kontemporer. Dari Aristoteles hingga Adam Smith, dari Karl Marx hingga John Maynard Keynes, dari Milton Friedman hingga Daniel Kahneman, setiap bab dalam buku ini mengungkap bagaimana gagasan ekonomi berkembang, diperdebatkan, dan diimplementasikan dalam kebijakan publik.

Lebih dari sekadar kronologi teori, buku ini mengajak pembaca untuk memahami konteks historis, sosial, dan filosofis di balik setiap aliran pemikiran. Dengan pendekatan tematik dan analitis, setiap bab dirancang untuk menunjukkan keterkaitan antara teori ekonomi dan dinamika dunia nyata—termasuk perdagangan global, ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan revolusi digital. Di tengah kompleksitas ekonomi modern, pemahaman terhadap akar pemikiran ekonomi menjadi semakin penting untuk merumuskan kebijakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang ingin memahami

evolusi gagasan ekonomi secara mendalam dan kontekstual. Semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga menjadi jendela refleksi atas bagaimana ide-ide ekonomi membentuk dunia yang kita huni hari ini—dan bagaimana kita dapat merancang masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec. yang telah mengajarkan Ilmu Ekonomi Makro kepada penulis selama studi Strata-2 dan Strata-3 di IPB, serta nasihat dan motivasi yang sangat berharga. Terima kasih kepada Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, atas bimbingannya sejak awal karier penulis di STIE Kesatuan, Januari 1997, serta penghargaan dan rasa hormat kepada Prof. Dr. Bambang Pamungkas (Rektor IBI Kesatuan), Prof. Bonar P. Pasaribu, dan Bapak Ir. Permadi Tirtarahardja, yang telah menjadi sumber inspirasi dan mendorong Penulis untuk produktif dalam berkarya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Penerbit Kesatuan Press, dan seluruh jajaran Struktural IBI Kesatuan, Rekan rekan Dosen, Perpustakaan IBIK, dan Staf di IBI Kesatuan, atas dukungan luar biasa yang telah diberikan. Kontribusi, semangat, dan kerja sama dari berbagai pihak ini telah menjadi bagian penting dalam terwujudnya karya ini.

Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kepada penerbit, yang

telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan karya ini. *Last but not least*, terima kasih kepada semua keluarga besar, dan secara khusus Grachella Christy Abrina br. Sigumonrong dan Tua Chella br. Turnip.

Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu, kami dengan senang hati menyambut setiap masukan dan kritik demi penyempurnaan buku ini. Kami berharap karya ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan dalam penelitian maupun publikasi ilmiah. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan dan apresiasi yang telah diberikan.

Bogor, 1 November 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| PRAKATA .....   | iv        |
| DAFTAR ISI.....   | vii       |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Pemikiran<br>Ekonomi .....                  | 1         |
| 1.2. Pentingnya Memahami Sejarah Ekonomi.....                               | 3         |
| 1.3. Tujuan dan Cakupan Buku.....   | 5         |
| <b>BAB 2. PEMIKIRAN EKONOMI PRA-KLASIK.....</b>                             | <b>9</b>  |
| 2.1. Pemikiran Ekonomi Yunani dan Romawi.....                               | 11        |
| 2.2. Kontribusi Filsuf seperti Aristoteles dan<br>Plato .....               | 13        |
| 2.3. Pemikiran Ekonomi Skolastik dan<br>Pengaruh Gereja .....               | 15        |
| <b>BAB 3. MERKANTILISME DAN FISIOKRASI .....</b>                            | <b>19</b> |
| 3.1. Konsep Dasar Merkantilisme .....                                       | 20        |
| 3.2. Tokoh-Tokoh Merkantilisme dan Kebijakan<br>Ekonomi .....               | 23        |
| 3.3. Kritik terhadap Merkantilisme.....                                     | 26        |
| 3.4. Konsep Dasar Fisiokrasi .....  | 30        |
| 3.5. Tokoh-Tokoh Fisiokrasi dan Gagasan<br>Utama .....                      | 33        |
| 3.6. Perbandingan Merkantilisme dan<br>Fisiokrasi.....                      | 35        |
| 3.7. Pengaruh Merkantilisme dan Fisiokrasi<br>terhadap Ekonomi Modern ..... | 39        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB 4. EKONOMI KLASIK: ADAM SMITH DAN PENERUSNYA .....</b>                        | <b>41</b> |
| 4.1. The Wealth of Nations dan Konsep Pasar Bebas .....                              | 42        |
| 4.2. David Ricardo dan Teori Keuntungan Komparatif .....                             | 44        |
| 4.3. John Stuart Mill dan Perkembangan Ekonomi Klasik.....                           | 47        |
| 4.4. Kritik terhadap Ekonomi Klasik.....   | 49        |
| 4.5. Pengaruh Ekonomi Klasik terhadap Kebijakan Ekonomi Modern .....                 | 53        |
| 4.6. Perbandingan Pemikiran Smith, Ricardo, dan Mill.....                            | 55        |
| <br>   |           |
| <b>BAB 5. EKONOMI SOSIALIS DAN KRITIK TERHADAP KAPITALISME.....</b>                  | <b>59</b> |
| 5.1. Pemikiran Karl Marx dan Teori Nilai Kerja .....                                 | 60        |
| 5.2. Sosialisme Utopis dan Ekonomi Kolektif.....                                     | 63        |
| 5.3. Dampak Pemikiran Sosialisme Terhadap Kebijakan Ekonomi .....                    | 65        |
| 5.4. Evolusi Pemikiran Sosialis: Dari Marxisme ke Sosialisme Modern .....            | 67        |
| 5.5. Kritik terhadap Kapitalisme: Perspektif Sosialis dan Ekonomi Heterodoks.....    | 70        |
| 5.6. Implementasi Sosialisme di Berbagai Negara .....                                | 72        |
| 5.7. Perbandingan Sistem Ekonomi: Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah ..... | 75        |
| <br>   |           |
| <b>BAB 6. EKONOMI NEOKLASIK DAN MARGINALISME.....</b>                                | <b>77</b> |
| 6.1. Konsep Nilai Subjektif dan Teori Marginal .....                                 | 78        |
| 6.2. Pemikiran Alfred Marshall dan Keseimbangan Pasar .....                          | 80        |
| 6.3. Peran Matematis Dalam Ekonomi.....  | 82        |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 6.4.  | Revolusi Marginal dan Tokoh-Tokoh Utama.....   | 84         |
| 6.5.  | Efisiensi Pareto dan Optimalisasi Sumber Daya.....                                   | 86         |
| 6.6.  | Kritik terhadap Ekonomi Neoklasik .....  | 87         |
| 6.7.  | Penerapan Teori Neoklasik dalam Kebijakan Ekonomi Modern .....                       | 90         |
| <b>BAB 7. EKONOMI KEYNESIAN DAN REVOLUSI MAKROEKONOMI.....</b>        |  |            |
|   |  | <b>93</b>  |
| 7.1.  | John Maynard Keynes dan Teori Permintaan Agregat .....                               | 94         |
| 7.2.  | Kebijakan Fiskal dan Peran Pemerintah Dalam Ekonomi .....                            | 96         |
| 7.3.  | Dampak Keynesianisme terhadap Ekonomi Global .....                                   | 98         |
| 7.4.  | Evolusi Keynesianisme: Dari Keynesian Klasik ke Keynesian Baru .....                 | 100        |
| 7.5.  | Kritik terhadap Keynesianisme: Perspektif Moneteris dan Rasionalitas Ekspektasi..... | 102        |
| 7.6.  | Keynesianisme dalam Krisis Ekonomi Global .....                                      | 105        |
| 7.7.  | Implementasi Keynesianisme di Berbagai Negara .....                                  | 107        |
| <b>BAB 8. MAZHAB MONETARIS DAN KRITIK TERHADAP KEYNESIANISME.....</b> |  |            |
|   |  | <b>111</b> |
| 8.1.  | Milton Friedman Dan Teori Kuantitas Uang....   | 112        |
| 8.2.  | Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi.....                                  | 114        |
| 8.3.  | Perdebatan Antara Keynesianisme Dan Moneterisme.....                                 | 116        |
| 8.4.  | Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi .....                           | 118        |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 8.5. | Kritik terhadap Monetarisme dalam Konteks Ekonomi Digital .....         | 121 |
| 8.6. | Implementasi Monetarisme di Berbagai Negara .....                       | 123 |
| 8.7. | Evolusi Pemikiran Monetaris dan Keynesianisme dalam Krisis Global ..... | 125 |

## BAB 9. EKONOMI INSTITUSIONAL DAN PERAN

|                |  |     |
|----------------|--|-----|
| KEBIJAKAN..... | 129  |     |
| 9.1.           | Thorstein Veblen dan Kritik Terhadap Ekonomi Neoklasik.....                | 130 |
| 9.2.           | Douglass North dan Teori Institusi Ekonomi .....                           | 132 |
| 9.3.           | Peran Regulasi dan Kebijakan Ekonomi .....                                 | 134 |
| 9.4.           | Evolusi Ekonomi Institusional: Dari Veblen ke Institusionalisme Baru ..... | 136 |
| 9.5.           | Hubungan antara Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi.....                     | 138 |
| 9.6.           | Kritik terhadap Ekonomi Institusional.....                                 | 139 |
| 9.7.           | Implementasi Ekonomi Institusional dalam Kebijakan Publik .....            | 141 |

## BAB 10. EKONOMI PERILAKU DAN EKSPEKTASI

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| RASIONAL..... | 145  |     |
| 10.1.         | Konsep Psikologi dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi .....         | 146 |
| 10.2.         | Daniel Kahneman dan Teori Prospek .....                            | 149 |
| 10.3.         | Ekspektasi Rasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Ekonomi ..... | 150 |
| 10.4.         | Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi .....            | 152 |
| 10.5.         | Neuroekonomi: Hubungan antara Otak dan Keputusan Ekonomi.....      | 155 |
| 10.6.         | Perilaku Konsumen dan Teori <i>Nudge</i> .....                     | 157 |

|  |            |
|--|------------|
| 10.7. Kritik terhadap Ekspektasi Rasional dalam<br>Ekonomi Modern.....                                     | 159        |
| <b>BAB 11. EKONOMI DIGITAL DAN GLOBALISASI .....</b>   | <b>162</b> |
| 11.1. Perkembangan Ekonomi Digital Dan<br>Teknologi Finansial .....  | 163        |
| 11.2. Dampak Globalisasi Terhadap Sistem<br>Ekonomi Dunia .....  | 165        |
| 11.3. Peran Ekonomi Berbasis Data Dalam<br>Kebijakan Ekonomi .....   | 167        |
| 11.4. Transformasi Digital dalam Sektor<br>Ekonomi Tradisional.....  | 169        |
| 11.5. Peran <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Big Data</i><br>dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi..... | 171        |
| 11.6. Tantangan Regulasi dalam Ekonomi Digital....   | 174        |
| 11.7. Ekonomi Digital dan Ketimpangan Sosial .....   | 176        |
| <b>BAB 12. KESIMPULAN DAN PROSPEK MASA DEPAN .....</b>   | <b>181</b> |
| 12.1. Evolusi Pemikiran Ekonomi Dari Klasik<br>Hingga Kontemporer.....                                     | 182        |
| 12.2. Tantangan Ekonomi Di Era Modern.....   | 184        |
| 12.3. Rekomendasi Kebijakan Untuk<br>Menghadapi Perubahan Ekonomi.....                                     | 186        |
| 12.4. Integrasi Digitalisasi dalam Kebijakan<br>Ekonomi Masa Depan .....                                   | 188        |
| 12.5. Adaptasi Kebijakan Ekonomi terhadap<br>Krisis Global.....  | 191        |
| 12.6. Peran Ekonomi Hijau dalam Pembangunan<br>Berkelanjutan .....   | 192        |
| 12.7. Prospek Ekonomi Global dan Tantangan<br>Geopolitik.....  | 194        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>197</b> |

## Timeline Sejarah Pemikiran Ekonomi

| Periode             | Aliran/Pemikiran                  | Tokoh Utama                           | Kontribusi Utama  |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Sebelum Masehi      | Filsafat Ekonomi Pra-Klasik       | Aristoteles, Plato                    | Konsep keadilan harga, kepemilikan, dan etika dalam ekonomi                                 |
| Abad Pertengahan    | Ekonomi Skolastik                 | Thomas Aquinas, Albertus Magnus       | Harga yang adil, moralitas perdagangan, pengaruh gereja terhadap ekonomi                    |
| Abad ke-16–18       | Merkantilisme                     | Jean-Baptiste Colbert, Thomas Mun     | Proteksionisme, surplus perdagangan, peran aktif negara                                     |
| Abad ke-18          | Fisiokrasi                        | François Quesnay, Turgot              | Pertanian sebagai sumber kekayaan, <i>Tableau Économique</i> , prinsip <i>laissez-faire</i> |
| Abad ke-18–19       | Ekonomi Klasik                    | Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill  | Pasar bebas, teori nilai kerja, keuntungan komparatif, distribusi                           |
| Abad ke-19          | Sosialisme dan Kritik Kapitalisme | Karl Marx, Engels, Owen               | Teori eksploitasi, nilai kerja, sosialisme utopis, ekonomi kolektif                         |
| Akhir Abad ke-19    | Neoklasik dan Marginalisme        | Alfred Marshall, Walras, Menger       | Nilai subjektif, keseimbangan pasar, efisiensi Pareto                                       |
| Abad ke-20 (1930s)  | Keynesianisme                     | John Maynard Keynes                   | Permintaan agregat, peran fiskal, stabilisasi makroekonomi                                  |
| Abad ke-20 (1950s–) | Monetarisme                       | Milton Friedman, Robert Lucas         | Teori kuantitas uang, ekspektasi rasional, kritik terhadap intervensi fiskal                |
| Abad ke-20 (1970s–) | Ekonomi Institusional             | Veblen, Douglass North, Elinor Ostrom | Peran institusi, regulasi, tata kelola kolektif   |
| Abad ke-21          | Ekonomi Perilaku & Digital        | Kahneman, Thaler, Brynjolfsson, Sen   | Bias kognitif, <i>nudge</i> , AI, <i>big data</i> , ekonomi hijau dan inklusif              |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

**S**ejarah pemikiran ekonomi adalah perjalanan panjang yang mencerminkan bagaimana manusia memahami, mengelola, dan mengembangkan sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dari konsep dasar pertukaran barang di era kuno hingga teori kompleks tentang pasar global di era modern, pemikiran ekonomi terus berevolusi mengikuti perubahan sosial, teknologi, dan politik. Buku ini akan mengulas perkembangan berbagai aliran ekonomi serta pemikiran para ekonom terkemuka yang telah membentuk teori dan kebijakan ekonomi dunia.

### **1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Pemikiran Ekonomi**

Pemikiran ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengalokasikan sumber daya yang terbatas

untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Pemikiran ekonomi berkembang dari konsep dasar tentang pertukaran barang hingga teori kompleks tentang pasar global dan kebijakan ekonomi. Menurut Case, Fair, dan Oster (2012), ilmu ekonomi berfokus pada bagaimana masyarakat membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan sumber daya.

Dalam perkembangannya, pemikiran ekonomi terbagi menjadi beberapa aliran utama, seperti ekonomi klasik, ekonomi neoklasik, ekonomi Keynesian, dan ekonomi institusional. Adam Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations* memperkenalkan konsep pasar bebas dan *invisible hand*, yang menjadi dasar bagi ekonomi klasik. Sementara itu, Alfred Marshall (1890) mengembangkan teori ekonomi neoklasik dengan menekankan peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga pasar.

Ruang lingkup pemikiran ekonomi mencakup dua aspek utama: mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan makroekonomi meneliti ekonomi secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2015). Selain itu, ekonomi institusional yang dikembangkan oleh Douglass North (1990) menyoroti peran institusi dalam membentuk perilaku ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

Pemikiran ekonomi juga berkembang dengan memasukkan aspek psikologi dan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan ekonomi. Daniel Kahneman (2002) dalam teorinya tentang ekonomi perilaku menunjukkan bahwa keputusan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan bukan hanya rasionalitas murni. Hal ini memperluas pemahaman tentang bagaimana individu berinteraksi dalam pasar dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mengakomodasi perilaku manusia yang kompleks.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pemikiran ekonomi terus beradaptasi dengan tantangan baru. Ekonomi digital dan ekonomi berbasis data menjadi bagian penting dalam analisis ekonomi modern. Pemikiran ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar bagi kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi global (Parkin, 2012).

## **1.2. Pentingnya Memahami Sejarah Ekonomi**

Memahami sejarah ekonomi sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi berkembang dan bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam berbagai konteks historis. Sejarah ekonomi membantu kita memahami pola perubahan ekonomi, dampak kebijakan ekonomi, serta bagaimana krisis ekonomi dapat diantisipasi dan diatasi. Menurut North (1990), institusi ekonomi yang berkembang dari

waktu ke waktu memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.

Sejarah ekonomi juga memberikan pemahaman tentang bagaimana berbagai aliran pemikiran ekonomi muncul dan berkembang. Adam Smith (1776) memperkenalkan konsep pasar bebas dan *invisible hand*, yang menjadi dasar bagi ekonomi klasik. Sementara itu, Karl Marx (1867) mengkritik kapitalisme dan mengembangkan teori nilai kerja yang menyoroti eksploitasi tenaga kerja dalam sistem ekonomi. Keynes (1936) kemudian merevolusi pemikiran ekonomi dengan menekankan peran pemerintah dalam mengelola permintaan agregat untuk mencegah resesi dan depresi ekonomi.

Selain itu, sejarah ekonomi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Friedman (1962) dalam teorinya tentang moneterisme menekankan pentingnya kontrol jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi. Sen (1999) mengembangkan konsep ekonomi kesejahteraan yang menyoroti pentingnya kebebasan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Studi sejarah ekonomi membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sejarah ekonomi juga relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti globalisasi dan

digitalisasi. Schumpeter (1942) memperkenalkan konsep *creative destruction*, yang menjelaskan bagaimana inovasi dan kewirausahaan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam era ekonomi digital, pemikiran ini semakin relevan karena teknologi terus mengubah struktur pasar dan pola konsumsi. Memahami sejarah ekonomi memungkinkan kita untuk mengantisipasi perubahan dan merancang kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan memahami sejarah ekonomi, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan mengidentifikasi strategi yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Studi sejarah ekonomi tidak hanya memberikan wawasan akademik tetapi juga menjadi alat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi dalam menghadapi tantangan masa depan. Sejarah ekonomi adalah fondasi bagi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan sistem ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

### **1.3. Tujuan dan Cakupan Buku**

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang Sejarah Pemikiran Ekonomi, dengan menelusuri bagaimana berbagai konsep ekonomi berkembang dari masa ke masa. Selain sebagai dokumentasi intelektual, buku ini juga berfungsi sebagai referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan pembuat

kebijakan dalam memahami bagaimana pemikiran ekonomi telah memengaruhi sistem ekonomi global.

1. Menjelaskan Evolusi Pemikiran Ekonomi – Membahas bagaimana pemikiran ekonomi berkembang sejak era Yunani kuno hingga ekonomi digital modern.
2. Menganalisis Peran Tokoh-Tokoh Ekonomi – Mengupas kontribusi para ekonom seperti Adam Smith, Karl Marx, John Maynard Keynes, dan Milton Friedman.
3. Menghubungkan Pemikiran Ekonomi dengan Kebijakan Publik – Menunjukkan bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan internasional.
4. Mengevaluasi Dampak Pemikiran Ekonomi terhadap Perkembangan Global – Meninjau bagaimana konsep ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi digital memengaruhi kehidupan masyarakat.
5. Menyediakan Landasan untuk Studi Lanjutan – Buku ini dirancang untuk menjadi sumber bagi studi akademik dan diskusi lebih lanjut tentang ekonomi.

Buku ini mencakup berbagai aliran pemikiran ekonomi yang telah berkembang selama berabad-abad, dengan pembagian ke dalam bab-bab yang mencerminkan era utama dalam sejarah ekonom. Melalui pembahasan mendalam ini, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif yang ingin memahami sejarah dan masa depan pemikiran ekonomi.

Tabel 1.1. Daftar Tokoh Ekonomi dalam Buku Ini

---

| Bab                                       | Tokoh Utama  | Kontribusi/Pemikiran  |
|---|--|---|
| Bab 2: Pra-Klasik                         | Aristoteles,<br>Plato,<br>Thomas Aquinas                                   | Etika ekonomi, keadilan harga, pengaruh gereja  |
| Bab 3:<br>Merkantilisme<br>dan Fisiokrasi | Jean-Baptiste<br>Colbert,<br>Thomas Mun,<br>François Quesnay,<br>Turgot    | Proteksionisme, surplus perdagangan, <i>Tableau Économique</i> , reformasi agrarian   |
| Bab 4: Ekonomi<br>Klasik                  | Adam Smith,<br>David Ricardo,<br>John Stuart Mill                          | Pasar bebas, teori nilai kerja, keuntungan komparatif, distribusi dan keadilan sosial |
| Bab 5: Ekonomi<br>Sosial                  | Karl Marx,<br>Friedrich Engels,<br>Robert Owen,<br>Eduard Bernstein        | Teori nilai kerja, sosialisme utopis, kritik kapitalisme, evolusi sosialisme          |
| Bab 6: Neoklasik<br>dan<br>Marginalisme   | Alfred Marshall,<br>Léon Walras,<br>Carl Menger,<br>Vilfredo Pareto        | Nilai subjektif, keseimbangan pasar, efisiensi Pareto                                 |
| Bab 7:<br>Keynesianisme                   | John Maynard<br>Keynes,<br>Paul Samuelson,<br>Robert Solow,<br>Greg Mankiw | Permintaan agregat, kebijakan fiskal, Keynesian Baru                                  |

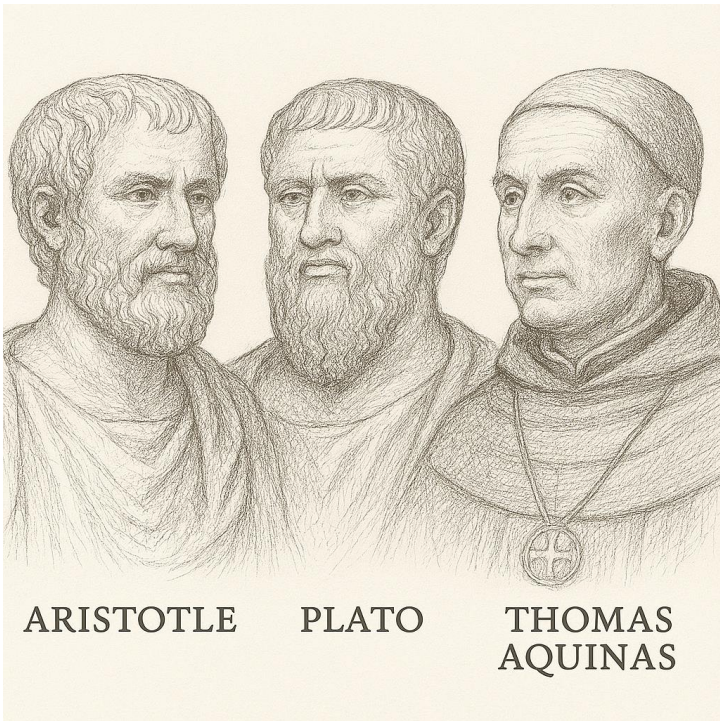
---

---

| Bab   | Tokoh Utama   | Kontribusi/Pemikiran   |
|---|---|--|
| Bab 8:<br>Monetarisme                         | Milton Friedman,<br>Anna Schwartz,<br>Robert Lucas                            | Teori kuantitas uang,<br>ekspektasi rasional, kritik<br>terhadap intervensi fiskal |
| Bab 9: Ekonomi<br>Institusional               | Thorstein Veblen,<br>Douglass North,<br>Ronald Coase,<br>Elinor Ostrom        | Institusi ekonomi, regulasi,<br>biaya transaksi, tata kelola<br>kolektif           |
| Bab 10: Ekonomi<br>Perilaku                   | Daniel Kahneman,<br>Amos Tversky,<br>Richard Thaler,<br>George<br>Loewenstein | Teori prospek, bias kognitif,<br><i>nudge</i> , neuroekonomi                       |
| Bab 11: Ekonomi<br>Digital dan<br>Globalisasi | Joseph<br>Schumpeter,<br>Erik Brynjolfsson,<br>Mariana<br>Mazzucato           | Teknologi finansial, AI, <i>big<br/>data</i> , ketimpangan digital                 |
| Bab 12:<br>Kesimpulan dan<br>Prospek          | Amartya Sen,<br>Jeffrey Sachs,<br>Ha-Joon Chang,<br>Joseph Stiglitz           | Pembangunan<br>berkelanjutan, ekonomi<br>hijau, reformasi kebijakan<br>global      |

---

## BAB 2. PEMIKIRAN EKONOMI PRA-KLASIK



**B**ab ini menelusuri akar historis pemikiran ekonomi sebelum lahirnya teori-teori klasik modern, dengan menggali kontribusi filsuf Yunani Kuno, ajaran keagamaan, dan pemikir abad pertengahan hingga munculnya doktrin merkantilisme dan fisiokrasi. Dari refleksi Plato dan Aristoteles tentang kepemilikan dan keadilan, hingga etika perdagangan dalam tradisi Kristen, Islam, dan Yahudi, kita melihat bagaimana nilai-nilai moral dan spiritual membentuk fondasi ekonomi awal. Pemikiran scholastik, terutama oleh Thomas Aquinas, memperkuat gagasan bahwa ekonomi tidak lepas dari pertimbangan etis dan keadilan sosial. Peralihan menuju merkantilisme menandai era baru di mana negara mulai memainkan peran aktif dalam akumulasi kekayaan dan pengaturan perdagangan internasional. Sementara itu, fisiokrasi menghadirkan pandangan revolusioner bahwa pertanian adalah sumber kekayaan sejati, menantang dominasi perdagangan dan industri. Keseluruhan bab ini menyajikan evolusi intelektual yang membentuk kerangka awal bagi teori ekonomi modern, sekaligus memperlihatkan bagaimana ekonomi selalu berkelindan dengan filsafat, moralitas, dan kekuasaan.

## 2.1. Pemikiran Ekonomi Yunani dan Romawi

Pemikiran ekonomi pada zaman Yunani dan Romawi kuno memberikan dasar bagi perkembangan teori ekonomi modern. Para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles mengembangkan konsep ekonomi yang berkaitan dengan keadilan, kepemilikan, dan distribusi sumber daya. Plato dalam *The Republic* menekankan pentingnya pembagian kerja dan bagaimana negara ideal harus mengatur ekonomi untuk mencapai keseimbangan sosial (Rasulong & Achsanuddin, 2024). Aristoteles, dalam *Politics*, membahas konsep kepemilikan pribadi dan nilai tukar, yang menjadi dasar bagi teori ekonomi klasik (Rahmadayanti, 2023).

Selain itu, pemikiran ekonomi Yunani juga dipengaruhi oleh Xenophon, yang dalam karyanya *Oikonomikos* menguraikan konsep manajemen rumah tangga (*oikonomia*), yang mencerminkan prinsip dasar ekonomi dalam mengelola sumber daya secara efisien (Rahmadayanti, 2023). Xenophon melihat ekonomi sebagai seni mengelola rumah tangga dengan bijak, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga nilai-nilai moral yang membentuk dasar tatanan masyarakat.

Di Romawi kuno, pemikiran ekonomi lebih berorientasi pada administrasi dan hukum. **Cicero** dan **Seneca** menekankan pentingnya etika dalam perdagangan dan bagaimana kebijakan ekonomi harus mendukung kesejahteraan masyarakat (Wikipedia, 2024). Romawi mengembangkan sistem ekonomi berbasis agraria, dengan kepemilikan tanah sebagai faktor utama dalam distribusi kekayaan. Sistem pajak dan administrasi keuangan Romawi juga menjadi model bagi banyak sistem ekonomi modern.

Pemikiran ekonomi Romawi juga dipengaruhi oleh konsep hukum dan kepemilikan. Justinian, dalam *Corpus Juris Civilis*, mengkodifikasi hukum yang mengatur kepemilikan dan transaksi ekonomi, yang menjadi dasar bagi sistem hukum ekonomi di Eropa (Wikipedia, 2024). Pemikiran ini menunjukkan bagaimana hukum dan ekonomi saling berkaitan dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi yang stabil.

Sejarah pemikiran ekonomi Yunani dan Romawi memberikan wawasan tentang bagaimana konsep ekonomi berkembang dari sistem agraria menuju sistem perdagangan yang lebih kompleks. Pemikiran ini menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi klasik dan teori ekonomi modern yang menekankan efisiensi, keadilan,

dan kesejahteraan sosial (Rasulong & Achsanuddin, 2024).

Para peneliti seperti Joseph Schumpeter dan Douglass North telah mengkaji bagaimana pemikiran ekonomi kuno memengaruhi perkembangan ekonomi modern. Schumpeter menyoroti peran inovasi dalam ekonomi, sementara North menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku ekonomi (Rasulong & Achsanuddin, 2024).

Dengan memahami pemikiran ekonomi Yunani dan Romawi, kita dapat melihat bagaimana konsep dasar seperti kepemilikan, keadilan, dan distribusi sumber daya tetap relevan dalam ekonomi kontemporer. Studi sejarah ekonomi ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana teori ekonomi berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan politik.

## **2.2. Kontribusi Filsuf Seperti Aristoteles dan Plato**

Aristoteles dan Plato adalah dua filsuf Yunani yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran ekonomi, terutama dalam hal keadilan sosial, kepemilikan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Pemikiran mereka tetap relevan hingga saat ini dan menjadi dasar bagi berbagai teori ekonomi modern.

Plato, dalam *The Republic*, menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan utama ekonomi. Ia berpendapat bahwa distribusi sumber daya harus dikelola oleh negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ketidakadilan (Salim et al., 2023). Selain itu, Plato mengaitkan ekonomi dengan moralitas dan pendidikan, menekankan bahwa individu harus dibentuk melalui pendidikan agar dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif (Wiratmo, 2003).

Aristoteles, dalam *Politics*, mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap ekonomi. Ia membedakan antara ekonomi (pengelolaan sumber daya untuk kebutuhan dasar) dan chrematistik (pencarian kekayaan tanpa batas). Aristoteles menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara etis dan tidak merugikan orang lain (Suryaningrat, 2023).

Salah satu kontribusi utama Aristoteles adalah konsep keadilan dalam transaksi, di mana ia mengusulkan harga yang adil, yaitu nilai barang yang mencerminkan keadilan dalam pertukaran. Konsep ini menjadi dasar bagi etika bisnis dan kebijakan perdagangan modern (Yusof et al., 2016).

Perbedaan mendasar antara Plato dan Aristoteles terletak pada peran negara dan kepemilikan pribadi.

Plato menekankan kolektivisme dengan peran negara yang dominan, sedangkan Aristoteles lebih mendukung individualisme, di mana individu memiliki kebebasan dalam transaksi ekonomi selama dilakukan dengan adil (Mudiarta, 2016).

Kontribusi kedua filsuf ini tetap menjadi landasan diskusi dalam ekonomi modern. Pemikiran Plato relevan dalam kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial, sementara gagasan Aristoteles tentang keadilan dalam transaksi memengaruhi etika bisnis dan kebijakan perdagangan (Tohis, 2021).

Dengan memadukan wawasan mereka, kita dapat membangun pendekatan ekonomi yang lebih manusiawi, etis, dan berkelanjutan. Studi tentang pemikiran mereka terus berkembang dan menjadi referensi bagi akademisi serta pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi yang lebih adil dan efisien.

### **2.3. Pemikiran Ekonomi Skolastik dan Pengaruh Gereja**

Pemikiran ekonomi skolastik berkembang pada Abad Pertengahan dan sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Para pemikir skolastik berusaha menghubungkan prinsip ekonomi dengan etika dan moralitas, terutama

dalam hal keadilan dalam perdagangan dan kepemilikan. Menurut Landerth (1976), pemikiran ekonomi skolastik mulai berkembang sejak abad ke-15, ketika masyarakat Eropa mulai mengalami industrialisasi dan muncul kebutuhan akan analisis ekonomi yang lebih sistematis.

Salah satu tokoh utama dalam pemikiran ekonomi skolastik adalah Thomas Aquinas, yang mengembangkan konsep harga yang adil (*just price*). Ia berpendapat bahwa harga suatu barang harus mencerminkan nilai sebenarnya dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Konsep ini menjadi dasar bagi etika bisnis dan kebijakan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial (Windah, 2021).

Selain itu, pemikiran skolastik juga menekankan pentingnya perdagangan yang etis. Para pemikir skolastik, seperti Albertus Magnus dan Duns Scotus, berpendapat bahwa perdagangan harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan tidak boleh merugikan pihak lain. Mereka menolak praktik riba dan spekulasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral Kristen (Windah, 2021).

Pengaruh gereja dalam pemikiran ekonomi skolastik sangat kuat, terutama dalam hal regulasi

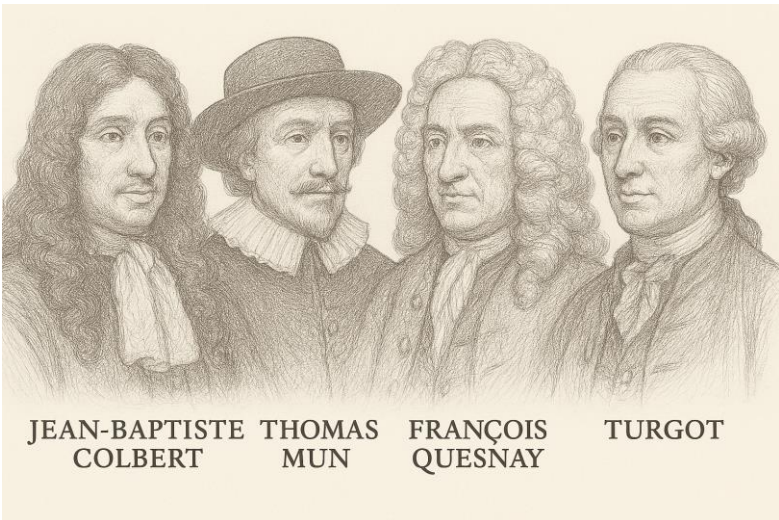
ekonomi. Gereja mengajarkan bahwa kekayaan materi harus digunakan untuk kesejahteraan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan individu. Hal ini tercermin dalam kebijakan ekonomi gereja yang mendorong redistribusi kekayaan melalui amal dan pajak gerejawi (Landerth, 1976).

Pemikiran ekonomi skolastik memberikan kontribusi penting bagi teori ekonomi modern, khususnya dalam konsep harga yang adil, perdagangan etis, dan keadilan ekonomi. Gagasan ini memengaruhi pemikiran klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, serta teori kesejahteraan Amartya Sen. Meskipun tidak sekompleks teori kontemporer, prinsip-prinsip skolastik tetap relevan dalam diskusi etika bisnis dan kebijakan publik. Studi ini menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga menyangkut nilai moral dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.1. Perbandingan Pemikiran Ekonomi Yunani, Romawi, dan Skolastik

| Aspek                              | Yunani Kuno   | Romawi Kuno  | Skolastik (Abad Pertengahan)                                      |
|------------------------------------|---|--|---|
| Tokoh Utama                        | Plato, Aristoteles, Xenophon                        | Cicero, Seneca, Justinian                              | Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Duns Scotus                      |
| Konsep Kepemilikan                 | Plato: kolektif; Aristoteles: pribadi               | Ditekankan dalam hukum kepemilikan tanah               | Kepemilikan sah jika digunakan untuk kesejahteraan bersama        |
| Distribusi Kekayaan                | Plato: negara mengatur demi keadilan sosial         | Berbasis agraria dan sistem pajak                      | Redistribusi melalui amal dan pajak gerejawi                      |
| Etika Perdagangan                  | Aristoteles: harga adil, anti chrematistik          | Cicero & Seneca: pentingnya etika dan kesejahteraan    | Anti riba, kejujuran dalam transaksi, harga adil                  |
| Peran Negara/Gereja                | Negara ideal mengatur ekonomi (Plato)               | Negara sebagai administrator dan pembuat hukum ekonomi | Gereja sebagai regulator moral dan ekonomi                        |
| Konsep Nilai Tukar                 | Aristoteles: nilai tukar berdasarkan keadilan       | Didasarkan pada hukum dan transaksi formal             | Nilai tukar harus mencerminkan nilai moral dan sosial             |
| Kontribusi terhadap Ekonomi Modern | Dasar teori keadilan, kepemilikan, dan etika bisnis | Model hukum ekonomi dan sistem administrasi            | Fondasi etika bisnis, teori harga adil, dan ekonomi kesejahteraan |

# BAB 3. MERKANTILISME DAN FISIOKRASI



**B**ab ini membahas dua aliran pemikiran ekonomi yang dominan sebelum lahirnya ekonomi klasik, yaitu merkantilisme dan fisiokrasi. Merkantilisme menekankan pentingnya akumulasi kekayaan melalui perdagangan internasional yang dikendalikan oleh negara, serta proteksionisme sebagai strategi utama pembangunan ekonomi. Sebaliknya, fisiokrasi memandang pertanian sebagai sumber kekayaan sejati dan menekankan prinsip *laissez-faire* sebagai dasar keteraturan ekonomi alami. Dengan menelusuri tokoh-tokoh utama, prinsip dasar, serta kritik terhadap kedua pendekatan ini, bab ini memberikan pemahaman tentang bagaimana ide-ide awal mengenai peran negara, sumber kekayaan, dan struktur ekonomi membentuk fondasi bagi teori ekonomi modern.

### **3.1. Konsep Dasar Merkantilisme**

Merkantilisme merupakan doktrin ekonomi yang berkembang di Eropa antara abad ke-16 hingga ke-18, yang menekankan bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh jumlah logam mulia yang dimilikinya, terutama emas dan perak. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa cadangan logam mulia mencerminkan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Menurut Heckscher (1935), merkantilisme bukan hanya strategi

ekonomi, tetapi juga instrumen kebijakan negara untuk memperkuat kekuasaan nasional melalui kontrol atas perdagangan dan akumulasi kekayaan.

Dalam kerangka merkantilisme, negara memainkan peran sentral dalam mengatur aktivitas ekonomi. Pemerintah tidak hanya menetapkan tarif dan kuota impor, tetapi juga memberikan subsidi kepada industri lokal untuk meningkatkan ekspor. Jean-Baptiste Colbert, Menteri Keuangan Prancis di bawah Louis XIV, adalah tokoh penting yang menerapkan kebijakan merkantilis secara sistematis. Ia memperkuat industri domestik, membatasi impor, dan memperluas ekspor sebagai cara untuk meningkatkan cadangan emas negara (Magnusson, 1994). Colbertisme menjadi model intervensi negara yang sangat berpengaruh di Eropa.

Salah satu prinsip utama merkantilisme adalah proteksionisme, yaitu kebijakan yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Proteksionisme diwujudkan melalui tarif tinggi, pembatasan impor, dan promosi ekspor. Thomas Mun, seorang ekonom Inggris, menekankan bahwa keseimbangan perdagangan harus selalu positif, di mana ekspor melebihi impor agar logam mulia terus mengalir masuk ke negara (Mun, 1664). Dalam *England's Treasure*

*by Foreign Trade*, Mun menegaskan bahwa perdagangan luar negeri adalah sumber utama kekayaan nasional.

Merkantilisme juga mendorong pembentukan monopoli dagang dan perusahaan dagang negara seperti British East India Company dan Dutch VOC. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai alat ekspansi politik dan kolonial. Menurut Landes (1998), merkantilisme menciptakan hubungan erat antara ekonomi dan kekuasaan, di mana perdagangan menjadi instrumen dominasi global. Hal ini menunjukkan bahwa merkantilisme tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga memiliki dimensi internasional yang agresif.

Namun, prinsip akumulasi logam mulia sebagai ukuran kekayaan mulai menuai kritik, terutama dari pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith. Dalam *The Wealth of Nations* (1776), Smith menyatakan bahwa kekayaan sejati suatu bangsa terletak pada produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, bukan pada cadangan emas. Ia mengkritik merkantilisme sebagai sistem yang membatasi kebebasan ekonomi dan menghambat pertumbuhan jangka panjang (Smith, 1776). Kritik ini menjadi titik awal pergeseran menuju ekonomi pasar bebas.

Meskipun telah ditinggalkan sebagai doktrin utama, prinsip-prinsip merkantilisme masih terlihat dalam kebijakan ekonomi modern, terutama dalam bentuk proteksionisme dan nasionalisme ekonomi. Negara-negara berkembang sering menggunakan strategi ekspor surplus dan subsidi industri sebagai cara untuk memperkuat daya saing global. Menurut Reinert (2007), banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman pernah menggunakan pendekatan merkantilis dalam fase awal industrialisasi mereka, meskipun kemudian beralih ke liberalisme ekonomi.

### **3.2. Tokoh-Tokoh Merkantilisme dan Kebijakan Ekonomi**

Merkantilisme sebagai doktrin ekonomi tidak hanya berkembang secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan secara aktif oleh tokoh-tokoh negara yang merancang kebijakan ekonomi nasional berbasis proteksionisme dan ekspansi perdagangan. Dua tokoh paling berpengaruh dalam sejarah merkantilisme adalah Jean-Baptiste Colbert di Prancis dan Thomas Mun di Inggris, yang masing-masing mewakili pendekatan strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui kontrol perdagangan dan industri.

Jean-Baptiste Colbert (1619–1683), Menteri Keuangan di bawah Raja Louis XIV, merupakan arsitek utama kebijakan merkantilis di Prancis. Ia percaya bahwa kekuatan negara bergantung pada kekayaan ekonomi yang diperoleh melalui ekspor dan pengendalian industri. Colbert memperkuat manufaktur domestik dengan memberikan subsidi, menetapkan standar kualitas, dan melarang impor barang-barang mewah yang dapat menguras cadangan emas negara (Magnusson, 1994). Ia juga membentuk monopoli dagang dan memperluas armada laut untuk mendukung ekspansi perdagangan luar negeri.

Kebijakan Colbert dikenal sebagai *Colbertisme*, yaitu bentuk merkantilisme yang sangat terpusat dan dikendalikan oleh negara. Dalam pandangan Colbert, negara harus menjadi aktor utama dalam mengatur produksi, distribusi, dan perdagangan demi mencapai surplus neraca perdagangan. Menurut O'Brien (2001), Colbertisme berhasil meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat posisi Prancis sebagai kekuatan ekonomi di Eropa, meskipun juga menimbulkan ketegangan sosial akibat kontrol yang ketat terhadap sektor swasta.

Di Inggris, Thomas Mun (1571–1641) memainkan peran penting dalam merumuskan teori merkantilisme

yang lebih sistematis. Dalam karyanya *England's Treasure by Foreign Trade* (1664), Mun menekankan bahwa keseimbangan perdagangan harus dijaga agar ekspor selalu melebihi impor. Ia berpendapat bahwa perdagangan luar negeri adalah sumber utama kekayaan nasional, dan negara harus mendorong ekspor barang jadi sambil membatasi impor bahan baku dan barang konsumsi (Mun, 1664). Pandangan Mun menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi Inggris selama periode ekspansi kolonial.

Mun juga menekankan pentingnya efisiensi dalam produksi dan pengelolaan sumber daya domestik. Ia mendorong pengembangan industri manufaktur dan perdagangan maritim sebagai cara untuk meningkatkan daya saing Inggris di pasar internasional. Menurut Heckscher (1935), Mun adalah salah satu pemikir merkantilis yang paling sistematis, karena ia menggabungkan teori perdagangan dengan praktik kebijakan ekonomi yang konkret.

Implementasi merkantilisme di Eropa abad ke-16 hingga ke-18 menunjukkan variasi pendekatan yang disesuaikan dengan konteks politik dan ekonomi masing-masing negara. Di Belanda, merkantilisme diterapkan melalui perusahaan dagang seperti VOC yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Di Spanyol dan

Portugal, kebijakan merkantilis berfokus pada eksploitasi koloni dan akumulasi logam mulia dari Dunia Baru. Menurut Landes (1998), meskipun strategi berbeda, tujuan utama tetap sama: memperkuat kekayaan dan kekuasaan negara melalui kontrol perdagangan.

Secara keseluruhan, tokoh-tokoh merkantilisme seperti Colbert dan Mun menunjukkan bahwa doktrin ini bukan hanya teori, tetapi juga praktik kebijakan yang membentuk struktur ekonomi nasional dan internasional. Kebijakan mereka menjadi fondasi bagi sistem perdagangan global yang kompetitif dan sering kali eksploitatif. Pemahaman terhadap tokoh dan implementasi merkantilisme memberikan wawasan penting tentang bagaimana negara-negara Eropa membangun kekuatan ekonomi melalui intervensi aktif dan strategi perdagangan yang terencana.

### **3.3. Kritik terhadap Merkantilisme**

Perdagangan Meskipun merkantilisme menjadi doktrin dominan dalam kebijakan ekonomi Eropa selama lebih dari dua abad, pendekatan ini tidak luput dari kritik, terutama karena kelemahannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Fokus utama merkantilisme pada akumulasi logam mulia dan surplus perdagangan dianggap mengabaikan dinamika

produktivitas dan inovasi. Menurut Landes (1998), kebijakan merkantilis cenderung statis dan tidak mendorong efisiensi ekonomi, karena terlalu menekankan kontrol negara dan pembatasan pasar.

Salah satu kelemahan mendasar dari merkantilisme adalah ketergantungan pada proteksionisme yang berlebihan. Tarif tinggi, pembatasan impor, dan monopoli dagang sering kali menimbulkan distorsi pasar dan menghambat persaingan. Kebijakan semacam ini dapat melindungi industri dalam negeri dalam jangka pendek, tetapi berisiko menurunkan kualitas produk dan memperlambat inovasi. Reinert (2007) mencatat bahwa proteksionisme merkantilis sering kali menciptakan ketidakseimbangan struktural yang sulit diperbaiki tanpa reformasi besar.

Dampak negatif merkantilisme terhadap perdagangan internasional juga menjadi sorotan utama. Karena setiap negara berusaha mencapai surplus perdagangan, hubungan dagang menjadi kompetitif dan eksploitatif. Negara-negara kolonial seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda menggunakan merkantilisme sebagai alat dominasi ekonomi atas wilayah jajahan, yang sering kali merugikan negara-negara mitra dagang. Menurut Findlay dan O'Rourke (2007), sistem merkantilis menciptakan ketegangan geopolitik dan konflik

perdagangan yang berulang sepanjang abad ke-17 dan ke-18.

Kritik paling tajam terhadap merkantilisme datang dari pemikir ekonomi klasik, terutama Adam Smith. Dalam *The Wealth of Nations* (1776), Smith menyatakan bahwa kekayaan suatu bangsa tidak terletak pada cadangan emas, melainkan pada kemampuan produktif masyarakatnya. Ia menolak gagasan bahwa perdagangan adalah permainan zero-sum, dan menekankan bahwa perdagangan bebas dapat menghasilkan keuntungan bersama melalui spesialisasi dan efisiensi (Smith, 1776). Kritik Smith menjadi titik balik menuju liberalisme ekonomi dan pasar bebas.

Smith juga mengkritik intervensi negara yang berlebihan dalam ekonomi. Menurutnya, pasar memiliki mekanisme alami yang mampu mengatur produksi dan distribusi secara efisien melalui prinsip *invisible hand*. Campur tangan negara yang terlalu besar justru menghambat alokasi sumber daya yang optimal. Heckscher (1935) mencatat bahwa pemikiran Smith berhasil menggantikan paradigma merkantilis dengan pendekatan yang lebih dinamis dan berbasis produktivitas.

Selain Smith, David Hume juga memberikan kritik terhadap asumsi dasar merkantilisme. Dalam *Essays, Moral, Political, and Literary*, Hume menunjukkan bahwa akumulasi logam mulia tidak selalu meningkatkan kekayaan riil, karena dapat menyebabkan inflasi dan ketidakseimbangan harga. Ia menekankan pentingnya sirkulasi uang dan perdagangan bebas sebagai fondasi ekonomi yang sehat (Hume, 1752). Kritik Hume memperkuat argumen bahwa merkantilisme gagal memahami kompleksitas sistem moneter dan perdagangan global.

Secara keseluruhan, kritik terhadap merkantilisme membuka jalan bagi lahirnya teori ekonomi klasik yang lebih berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan keseimbangan pasar. Meskipun beberapa prinsip merkantilis masih digunakan dalam kebijakan industri dan perdagangan modern, pendekatan ini telah digantikan oleh paradigma yang lebih adaptif dan berbasis inovasi. Studi tentang kritik merkantilisme memberikan wawasan penting tentang evolusi pemikiran ekonomi dan pentingnya keseimbangan antara intervensi negara dan kebebasan pasar.

### 3.4. Konsep Dasar Fisiokrasi

Fisiokrasi merupakan aliran pemikiran ekonomi yang berkembang di Prancis pada pertengahan abad ke-18, sebagai reaksi terhadap merkantilisme yang dianggap terlalu menekankan perdagangan dan intervensi negara. Para fisiokrat, yang dipimpin oleh François Quesnay, meyakini bahwa pertanian adalah satu-satunya sumber kekayaan sejati karena hanya sektor ini yang menghasilkan surplus bersih dari alam. Dalam pandangan mereka, kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan nilai tambah dari alam—seperti perdagangan dan manufaktur—hanya bersifat transformasional, bukan produktif (Meek, 1962).

Konsep ini dituangkan secara sistematis oleh Quesnay dalam *Tableau Économique* (1758), sebuah model sirkulasi ekonomi yang menunjukkan bagaimana surplus dari sektor pertanian mengalir ke seluruh bagian masyarakat. Quesnay membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: kelas produktif (petani), kelas pemilik (tuan tanah), dan kelas steril (pengrajin dan pedagang). Hanya kelas produktif yang dianggap menghasilkan kekayaan baru, sementara kelas lainnya hanya mengonsumsi atau mendistribusikan (Quesnay, 1758; Spiegel, 1991).

Salah satu prinsip utama fisiokrasi adalah *laissez-faire*, yaitu gagasan bahwa ekonomi akan berjalan

optimal jika dibiarkan mengikuti hukum alam tanpa campur tangan negara. Para fisiokrat percaya bahwa ada keteraturan alami dalam ekonomi, dan bahwa intervensi pemerintah justru akan mengganggu keseimbangan tersebut. Menurut Turgot, salah satu tokoh fisiokrat, kebebasan individu dalam memproduksi dan berdagang adalah syarat utama bagi kemakmuran nasional (Groenewegen, 2002).

Prinsip *laissez-faire* dalam fisiokrasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga refleksi dari filsafat alam dan rasionalisme abad Pencerahan. Mereka memandang bahwa hukum ekonomi bersifat objektif dan dapat dipahami seperti hukum fisika. Oleh karena itu, tugas negara bukan mengatur, melainkan melindungi hak milik dan menjamin kebebasan ekonomi. Hal ini berbeda tajam dengan pendekatan merkantilis yang menempatkan negara sebagai pengatur utama perdagangan dan industri (Meek, 1962).

Struktur ekonomi dalam fisiokrasi sangat hierarkis dan berbasis pada kontribusi terhadap surplus alam. Kelas petani dianggap sebagai pusat sistem ekonomi karena mereka menghasilkan nilai tambah dari tanah. Kelas pemilik tanah menerima sewa sebagai bentuk redistribusi surplus, sementara kelas steril hanya mengolah atau memperdagangkan hasil pertanian tanpa

menciptakan kekayaan baru. Menurut Spiegel (1991), pembagian ini mencerminkan pandangan fisiokrat bahwa hanya alam yang dapat menciptakan nilai ekonomi riil.

Meskipun fisiokrasi tidak bertahan lama sebagai doktrin dominan, pengaruhnya terhadap pemikiran ekonomi klasik sangat signifikan. Adam Smith, meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan bahwa hanya pertanian yang produktif, mengadopsi prinsip *laissez-faire* dan pentingnya kebebasan ekonomi dalam *The Wealth of Nations* (1776). Fisiokrasi juga menjadi inspirasi awal bagi analisis makroekonomi dan model sirkulasi pendapatan nasional (Smith, 1776; Spiegel, 1991).

Secara keseluruhan, konsep dasar fisiokrasi menawarkan perspektif unik tentang sumber kekayaan, struktur sosial ekonomi, dan peran negara. Dengan menempatkan pertanian sebagai pusat ekonomi dan menekankan keteraturan alam, fisiokrasi menjadi jembatan antara pemikiran pra-klasik dan ekonomi liberal modern. Studi tentang fisiokrasi memberikan pemahaman penting tentang bagaimana ide-ide filosofis dan ilmiah membentuk teori ekonomi dan kebijakan publik.

### 3.5. Tokoh-Tokoh Fisiokrasi dan Gagasan Utama

Fisiokrasi sebagai aliran pemikiran ekonomi tidak hanya menawarkan teori tentang sumber kekayaan, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh penting yang merumuskan dan menerapkan gagasan tersebut dalam konteks kebijakan. Dua tokoh sentral dalam gerakan fisiokrat adalah François Quesnay dan Anne Robert Jacques Turgot, yang masing-masing berkontribusi dalam membangun kerangka teoritis dan reformasi praktis berbasis ekonomi agraria dan prinsip *laissez-faire*.

François Quesnay (1694–1774), seorang dokter kerajaan dan penasihat ekonomi Louis XV, dikenal sebagai pendiri utama fisiokrasi. Karya monumentalnya, *Tableau Économique* (1758), merupakan model sirkulasi pendapatan nasional pertama yang menunjukkan bagaimana surplus dari sektor pertanian mengalir ke seluruh bagian masyarakat. Dalam model ini, Quesnay membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: produktif (petani), pemilik (tuan tanah), dan steril (pengrajin dan pedagang), dengan hanya kelas produktif yang menghasilkan kekayaan baru (Meek, 1962; Quesnay, 1758).

Quesnay menekankan bahwa pertanian adalah satu-satunya sektor yang menghasilkan surplus bersih karena berinteraksi langsung dengan alam. Ia percaya

bahwa ekonomi harus mengikuti hukum alam dan bahwa intervensi negara hanya akan mengganggu keteraturan tersebut. Prinsip *laissez-faire* yang ia anut bukan sekadar kebijakan, tetapi refleksi dari keyakinan bahwa ekonomi memiliki mekanisme alami yang dapat mengatur dirinya sendiri (Spiegel, 1991).

Turgot (1727–1781), seorang ekonom dan negarawan Prancis, merupakan tokoh fisiokrat yang berusaha menerapkan gagasan Quesnay dalam kebijakan publik. Sebagai Menteri Keuangan di bawah Louis XVI, Turgot mendorong reformasi agraria, penghapusan monopoli dagang, dan liberalisasi harga gandum. Ia percaya bahwa kebebasan ekonomi dan penghapusan hambatan birokratis akan meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat (Groenewegen, 2002).

Salah satu kontribusi penting Turgot adalah pembelaannya terhadap kebebasan individu dalam memproduksi dan berdagang. Ia menolak sistem feodal yang membebani petani dengan pajak dan kewajiban kerja, serta mendorong sistem kepemilikan tanah yang lebih efisien. Menurut Turgot, pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai jika petani diberi insentif dan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal (Groenewegen, 2002; Spiegel, 1991).

Perbedaan pendekatan antara fisiokrat dan merkantilis sangat mencolok. Merkantilisme menekankan peran negara dalam mengatur perdagangan dan industri, serta menganggap perdagangan sebagai sumber utama kekayaan. Sebaliknya, fisiokrasi menempatkan pertanian sebagai pusat ekonomi dan menolak intervensi negara dalam mekanisme pasar. Menurut Meek (1962), fisiokrat memandang perdagangan dan manufaktur sebagai kegiatan steril yang tidak menciptakan nilai tambah, sementara merkantilis justru menganggap sektor tersebut sebagai motor pertumbuhan.

Dengan demikian, tokoh-tokoh fisiokrasi seperti Quesnay dan Turgot tidak hanya membentuk teori ekonomi agraria, tetapi juga memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, kebebasan, dan keteraturan alami. Meskipun fisiokrasi akhirnya digantikan oleh ekonomi klasik, warisan pemikiran mereka tetap relevan dalam diskusi tentang peran sektor primer, kebijakan agraria, dan prinsip pasar bebas dalam pembangunan ekonomi.

### **3.6. Perbandingan Merkantilisme dan Fisiokrasi**

Merkantilisme dan fisiokrasi merupakan dua aliran pemikiran ekonomi awal yang muncul pada periode

berbeda di Eropa dan mencerminkan pandangan kontras terhadap sumber kekayaan serta peran negara dalam perekonomian.

Merkantilisme berkembang pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18, dan mendefinisikan kekayaan nasional berdasarkan akumulasi logam mulia seperti emas dan perak. Pandangan ini mendorong negara untuk memperkuat ekspor, membatasi impor, serta menumpuk cadangan logam mulia melalui neraca perdagangan yang positif (Heckscher, 1935). Negara memainkan peran aktif melalui tarif, monopoli dagang, dan koloni demi mencapai kekuatan ekonomi dan militer.

Sebaliknya, fisiokrasi yang muncul di Prancis pada pertengahan abad ke-18, menyatakan bahwa kekayaan sejati berasal dari produksi riil, khususnya dari sektor pertanian. François Quesnay dan para pengikutnya beranggapan bahwa hanya sektor pertanian yang menghasilkan surplus ekonomi (*produit net*), sementara industri dan perdagangan hanya sekadar mendistribusikan nilai (Meek, 1962). Dalam kerangka ini, kekayaan bukan akumulasi logam, melainkan kemampuan menghasilkan barang dari sumber daya alam.

Dalam hal kebijakan ekonomi, merkantilis mendukung intervensi pemerintah yang ketat dalam

perdagangan internasional, seperti pelarangan ekspor bahan baku dan pembentukan perusahaan dagang negara. Pendekatan ini menekankan proteksionisme dan dominasi pasar luar negeri (Magnusson, 1994). Sementara itu, fisiokrat menganjurkan prinsip *laissez-faire*, yakni campur tangan minimal pemerintah dalam ekonomi domestik, dan mendorong kebijakan perpajakan berbasis surplus pertanian untuk mendukung efisiensi dan keadilan (Grove, 1972).

Secara ideologis, merkantilisme berpijak pada kepentingan negara dan kekuasaan politik, sedangkan fisiokrasi lebih menekankan hukum alam dan keteraturan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kebebasan individu. Jika merkantilis menganggap perdagangan sebagai alat akumulasi kekayaan negara, fisiokrat melihat distribusi nilai melalui pertanian sebagai dasar harmoni ekonomi.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada persepsi terhadap sumber kekayaan (logam mulia vs. surplus pertanian), peran negara (intervensif vs. minimalis), serta cara pandang terhadap produktivitas sektor ekonomi. Perbandingan ini menjadi fondasi penting dalam evolusi teori ekonomi klasik yang kemudian disempurnakan oleh tokoh seperti Adam Smith.

Tabel 3.1. Perbandingan Merkantilisme dan Fisiokrasi

| Aspek                   | Merkantilisme   | Fisiokrasi  |
|-------------------------|---|---|
| Sumber Kekayaan         | Logam mulia dan surplus perdagangan                             | Surplus pertanian dari alam   |
| Sektor Ekonomi Utama    | Perdagangan dan manufaktur                                      | Pertanian sebagai satu-satunya sektor produktif                         |
| Peran Negara            | Intervensi aktif: proteksionisme, subsidi, regulasi perdagangan | Minimal: negara hanya menjaga hukum alam dan kebebasan ekonomi          |
| Prinsip Dasar           | Akumulasi kekayaan melalui ekspor dan kontrol pasar             | <i>Laissez-faire</i> dan keteraturan ekonomi alami                      |
| Struktur Sosial Ekonomi | Tidak diklasifikasikan secara produktif                         | Tiga kelas: produktif (petani), pemilik (tuan tanah), steril (pedagang) |
| Tokoh Utama             | Jean-Baptiste Colbert, Thomas Mun                               | François Quesnay, Turgot  |
| Model Teoritis          | Tidak sistematis; berbasis kebijakan praktis                    | <i>Tableau Économique</i> sebagai model sirkulasi pendapatan            |
| Kritik Utama            | Menghambat pertumbuhan jangka panjang, distorsi pasar           | Terlalu menyederhanakan sektor ekonomi, mengabaikan peran industri      |

| Aspek                            | Merkantilisme                                 | Fisiokrasi  |
|----------------------------------|---|---|
| Pengaruh terhadap Ekonomi Modern | Proteksionisme industri, nasionalisme ekonomi | Konsep <i>laissez-faire</i> , inspirasi bagi ekonomi klasik dan liberalisme pasar |

### 3.7. Pengaruh Merkantilisme dan Fisiokrasi terhadap Ekonomi Modern

Meskipun berasal dari abad ke-16 hingga ke-18, gagasan merkantilisme dan fisiokrasi masih berpengaruh dalam kebijakan ekonomi modern. Merkantilisme, dengan fokus pada surplus perdagangan dan akumulasi kekayaan negara, tercermin dalam praktik proteksionisme seperti tarif, subsidi ekspor, dan hambatan non-tarif. Magnusson (1994) menekankan bahwa praktik ini tetap hidup dalam kebijakan kontemporer, seperti *America First* dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang menunjukkan kebangkitan semangat merkantilis dalam geopolitik ekonomi global.

Fisiokrasi, meskipun pengaruhnya lebih terbatas, tetap relevan dalam pendekatan keberlanjutan dan sektor berbasis sumber daya alam. Grove (1972) mencatat bahwa konsep “produk neto” fisiokrat menyerupai nilai tambah dalam analisis ekonomi

modern, terutama dalam sektor pertanian dan agraria. Meek (1962) juga menyoroti bahwa prinsip-prinsip fisiokrat sangat cocok dengan gerakan ekonomi hijau dan agroekologi modern, yang menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis lingkungan.

Kedua aliran turut membentuk pemikiran tentang peran negara dan regulasi. Fisiokrat menyerukan *laissez-faire* namun tetap mendukung sistem hukum yang melindungi kepemilikan dan transaksi pasar, sedangkan merkantilis mendorong intervensi aktif negara dalam ekonomi. Heckscher (1935) menunjukkan bahwa dalam praktik hari ini, banyak negara menganut sistem ekonomi campuran yang menggabungkan pengawasan pasar dan kebebasan ekonomi. Prinsip-prinsip merkantilisme dan fisiokrasi kini terintegrasi dalam kebijakan yang menyeimbangkan kedaulatan ekonomi, produktivitas nasional, dan keberlanjutan lingkungan.

## **BAB 4. EKONOMI KLASIK: ADAM SMITH DAN PENERUSNYA**



Bab ini menandai transisi penting dalam sejarah pemikiran ekonomi dari pendekatan proteksionis merkantilisme menuju paradigma pasar bebas yang rasional dan sistematis. Dimulai dengan karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nations* (1776), ekonomi klasik memperkenalkan prinsip-prinsip seperti mekanisme pasar, spesialisasi, dan peran terbatas negara dalam ekonomi. Smith menekankan pentingnya kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi dan memperkenalkan konsep “invisible hand” sebagai pengatur alami pasar. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh David Ricardo melalui teori keuntungan komparatif, yang menjadi dasar bagi perdagangan internasional modern. John Stuart Mill melengkapi kerangka ekonomi klasik dengan pendekatan yang lebih sosial dan normatif, menggabungkan efisiensi ekonomi dengan pertimbangan keadilan dan kesejahteraan. Bab ini menyajikan evolusi pemikiran ekonomi klasik yang tidak hanya membentuk fondasi teori ekonomi modern, tetapi juga memengaruhi kebijakan ekonomi global hingga saat ini.

#### **4.1. *The Wealth of Nations* dan Konsep Pasar Bebas**

Adam Smith memperkenalkan konsep pasar bebas dalam karyanya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), yang sering disebut sebagai

*The Wealth of Nations*. Buku ini menjadi dasar bagi ekonomi klasik dan menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Smith, 1776).

Salah satu konsep utama dalam *The Wealth of Nations* adalah tangan tak terlihat (*invisible hand*), yang menyatakan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka dalam pasar bebas, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Smith berargumen bahwa mekanisme pasar akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien tanpa perlu intervensi pemerintah yang berlebihan (Pelita, 2024).

Smith juga menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) dalam meningkatkan produktivitas. Ia menunjukkan bahwa dengan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil dan spesifik, suatu masyarakat dapat mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi. Konsep ini menjadi dasar bagi teori ekonomi modern tentang efisiensi produksi dan spesialisasi tenaga kerja (Kompasiana, 2025).

Selain itu, Smith mengkritik sistem ekonomi merkantilisme yang mendominasi pada zamannya. Ia berpendapat bahwa pembatasan perdagangan dan campur tangan pemerintah dalam ekonomi justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ia

mendukung perdagangan bebas sebagai cara untuk meningkatkan kemakmuran dan efisiensi pasar (Academia, 2025).

Dalam *The Wealth of Nations*, Smith juga membahas teori nilai dan peran tenaga kerja dalam produksi. Ia mengajukan konsep nilai tenaga kerja dan bagaimana pasar menentukan nilai relatif barang dan jasa. Pemikirannya dalam hal ini memberikan dasar bagi perkembangan teori nilai tenaga kerja oleh ekonom klasik lainnya (Pelita, 2024).

Konsep pasar bebas yang dikembangkan oleh Smith telah memengaruhi kebijakan ekonomi global hingga saat ini. Banyak negara yang menerapkan prinsip perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Perjanjian perdagangan internasional seperti WTO dan NAFTA mencerminkan penerapan gagasan perdagangan bebas yang dipromosikan oleh Smith (Kompasiana, 2025).

#### **4.2. David Ricardo dan Teori Keuntungan Komparatif**

David Ricardo adalah salah satu ekonom klasik yang terkenal dengan Teori Keunggulan Komparatif, yang pertama kali diperkenalkan dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dapat memperoleh

manfaat dari perdagangan internasional meskipun memiliki kelemahan dalam memproduksi semua jenis barang dibandingkan negara lain. Ricardo berargumen bahwa setiap negara harus berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki kerugian relatif lebih kecil, sehingga perdagangan tetap menguntungkan kedua belah pihak (Ricardo, 1817).

Keunggulan komparatif berbeda dari keunggulan absolut, yang dikemukakan oleh Adam Smith. Jika dalam keunggulan absolut suatu negara lebih efisien dalam memproduksi suatu barang dibandingkan negara lain, maka dalam keunggulan komparatif, suatu negara tetap dapat memperoleh manfaat dari perdagangan meskipun tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang tertentu (Smith, 1776). Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan tetap dapat terjadi jika suatu negara memiliki biaya peluang lebih rendah dalam produksi suatu barang dibandingkan negara lain (Krugman & Obstfeld, 2009).

Dalam contoh klasik Ricardo, ia membandingkan produksi kain dan anggur antara Inggris dan Portugal. Portugal dapat memproduksi kedua barang dengan lebih efisien dibandingkan Inggris, tetapi karena Portugal memiliki keunggulan komparatif dalam produksi anggur, sementara Inggris memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kain, maka kedua negara akan

memperoleh manfaat jika Portugal mengekspor anggur dan Inggris mengekspor kain (Ricardo, 1817).

Teori keunggulan komparatif menjadi dasar bagi perdagangan bebas, yang berpendapat bahwa negara-negara harus mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota untuk meningkatkan efisiensi ekonomi global. Ricardo berargumen bahwa dengan perdagangan bebas, sumber daya akan dialokasikan secara optimal, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Krugman & Obstfeld, 2009).

Meskipun teori Ricardo telah menjadi dasar bagi kebijakan perdagangan internasional, beberapa ekonom modern mengkritiknya karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti mobilitas tenaga kerja, perubahan teknologi, dan ketimpangan ekonomi. Paul Samuelson (1948) berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, perdagangan bebas dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan dan deindustrialisasi di negara-negara tertentu. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas (Samuelson, 1948).

Dalam era globalisasi, teori keunggulan komparatif tetap menjadi dasar bagi banyak kebijakan perdagangan internasional. Organisasi seperti World Trade Organization (WTO) menggunakan prinsip ini dalam merancang perjanjian perdagangan yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi ekonomi global. Namun, tantangan seperti proteksionisme dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi perdebatan dalam penerapan teori ini (Krugman & Obstfeld, 2009).

Secara keseluruhan, teori keunggulan komparatif Ricardo telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang perdagangan internasional dan efisiensi ekonomi. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, konsep ini tetap menjadi salah satu teori ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi global (Ricardo, 1817).

#### **4.3. John Stuart Mill dan Perkembangan Ekonomi Klasik**

John Stuart Mill adalah salah satu ekonom klasik yang berperan penting dalam pengembangan teori ekonomi setelah Adam Smith dan David Ricardo. Dalam karyanya *Principles of Political Economy* (1848), Mill memperluas gagasan ekonomi klasik dengan menambahkan dimensi sosial dan moral dalam analisis ekonomi (Mill, 1848).

Salah satu kontribusi utama Mill adalah pembedaan antara hukum produksi dan hukum distribusi. Ia berpendapat bahwa hukum produksi bersifat tetap dan ditentukan oleh hukum alam, seperti bagaimana tenaga kerja dan modal menghasilkan barang dan jasa. Namun, hukum distribusi bersifat fleksibel dan dapat diubah

melalui kebijakan sosial dan ekonomi (Kompasiana, 2024).

Mill juga mengembangkan konsep utilitarianisme dalam ekonomi, yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Ia berargumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi pemerintah tetap memiliki peran dalam mengoreksi ketimpangan sosial melalui kebijakan redistribusi (Ajarekonomi, 2024).

Selain itu, Mill memperkenalkan gagasan tentang perlindungan hak individu dalam ekonomi, yang menjadi dasar bagi teori ekonomi liberal. Ia menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dan kebebasan berekspresi sebagai faktor utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Kompasiana, 2024).

Dalam konteks kebijakan ekonomi, Mill mendukung intervensi pemerintah dalam beberapa sektor, terutama dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa pasar bebas tidak selalu menghasilkan distribusi kekayaan yang adil, sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan akses yang lebih merata terhadap sumber daya ekonomi (Ajarekonomi, 2024).

Pemikiran Mill juga berpengaruh terhadap perkembangan teori ekonomi modern, terutama dalam hal keseimbangan antara pasar bebas dan intervensi pemerintah. Banyak ekonom kontemporer yang mengembangkan konsep Mill dalam kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kompasiana, 2024).

Secara keseluruhan, kontribusi John Stuart Mill dalam ekonomi klasik telah memberikan dasar bagi banyak teori ekonomi modern. Pemikirannya tentang kebebasan ekonomi, keadilan sosial, dan peran pemerintah dalam ekonomi tetap relevan dalam diskusi ekonomi saat ini (Ajarekonomi, 2024).

#### **4.4. Kritik terhadap Ekonomi Klasik**

Meskipun ekonomi klasik memberikan fondasi penting bagi teori ekonomi modern, pendekatan ini tidak luput dari kritik, terutama terkait asumsi-asumsi dasar yang dianggap terlalu idealistik. Salah satu kritik utama adalah anggapan bahwa pasar selalu mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme *invisible hand*. Dalam praktiknya, banyak pasar mengalami kegagalan, seperti monopoli, eksternalitas, dan ketimpangan informasi, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh teori klasik (Blaug, 1997).

Selain itu, teori nilai kerja yang dikembangkan oleh Smith dan Ricardo dianggap terlalu sempit karena hanya mengaitkan nilai barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksinya. Karl Marx mengadopsi teori ini namun mengkritik bahwa sistem kapitalis mengeksploitasi tenaga kerja dengan mengambil surplus nilai tanpa kompensasi yang adil. Kritik ini membuka jalan bagi pemikiran ekonomi sosialis dan teori distribusi yang lebih kompleks (Marx, 1867).

Ekonomi klasik juga cenderung mengabaikan peran institusi, budaya, dan psikologi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi bahwa individu selalu rasional dan mengejar kepentingan pribadi tidak mempertimbangkan bias kognitif, norma sosial, dan dinamika kekuasaan yang memengaruhi perilaku ekonomi. Kritik ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya ekonomi institusional dan ekonomi perilaku (Sen, 1999; Kahneman, 2002).

Dalam konteks distribusi, ekonomi klasik lebih fokus pada efisiensi daripada keadilan. Mill memang mulai memperkenalkan gagasan tentang keadilan sosial dan redistribusi, tetapi pendekatan klasik secara umum tidak memberikan solusi terhadap ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh mekanisme pasar bebas. Hal ini menjadi perhatian utama dalam teori ekonomi

kesejahteraan dan kebijakan fiskal modern (Stiglitz, 2012).

Kritik terhadap ekonomi klasik juga muncul dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional. Teori keuntungan komparatif Ricardo, meskipun elegan secara matematis, sering kali tidak mempertimbangkan dampak struktural terhadap negara berkembang yang terjebak dalam ekspor komoditas rendah nilai tambah. Hal ini mendorong munculnya pendekatan pembangunan yang lebih kontekstual dan protektif (Chang, 2002).

Tabel 4.1. Kritik terhadap Ekonomi Klasik

| Aspek Kritik                   | Isi Kritik   | Tokoh/Sumber                 | Implikasi Teoritis                                      |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|
| Asumsi Keseimbangan Pasar      | Pasar tidak selalu mencapai keseimbangan otomatis; terjadi kegagalan pasar | Blaug (1997)                 | Munculnya teori pasar tidak sempurna dan regulasi pasar |
| Teori Nilai Kerja              | Terlalu sempit; tidak memperhitungkan eksploitasi dan surplus nilai        | Marx (1867)                  | Melahirkan teori distribusi dan ekonomi sosialis        |
| Pengabaian Faktor Sosial       | Tidak mempertimbangkan institusi, budaya, dan psikologi                    | Sen (1999); Kahneman (2002)  | Lahirnya ekonomi institusional dan ekonomi perilaku     |
| Distribusi dan Keadilan Sosial | Fokus pada efisiensi, bukan keadilan; solusi                               | Stiglitz (2012); Mill (1848) | Perkembangan teori                                      |

| Aspek Kritik                | Isi Kritik  | Tokoh/Sumber     | Implikasi Teoritis   |
|-----------------------------|---|------------------|--|
|                             | terhadap ketimpangan terbatas                               |                  | kesejahteraan dan kebijakan fiskal                         |
| Globalisasi dan Perdagangan | Teori komparatif tidak cocok untuk negara berkembang        | Chang (2002)     | Munculnya pendekatan pembangunan kontekstual dan protektif |
| Metodologi                  | Terlalu normatif dan deduktif; kurang berbasis data empiris | Samuelson (1947) | Peralihan ke neoklasik dan model berbasis data             |

Secara metodologis, ekonomi klasik dianggap terlalu normatif dan kurang empiris. Banyak asumsi yang tidak diuji secara sistematis, dan pendekatan deduktif lebih dominan daripada analisis berbasis data. Kritik ini kemudian mendorong lahirnya ekonomi neoklasik yang lebih matematis dan ekonomi modern yang berbasis model empiris dan simulasi (Samuelson, 1947).

Dengan memahami kritik terhadap ekonomi klasik, kita dapat melihat bahwa teori ini adalah titik awal yang penting, tetapi bukan akhir dari pemikiran ekonomi. Evolusi menuju pendekatan yang lebih realistis, inklusif, dan interdisipliner menunjukkan bahwa ekonomi sebagai ilmu terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman.

#### **4.5. Pengaruh Ekonomi Klasik terhadap Kebijakan Ekonomi Modern**

Pemikiran ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, telah memberikan pengaruh mendalam terhadap arsitektur kebijakan ekonomi modern. Prinsip-prinsip seperti pasar bebas, spesialisasi, dan efisiensi alokasi sumber daya menjadi fondasi bagi kebijakan perdagangan internasional, deregulasi pasar, dan liberalisasi ekonomi yang diadopsi oleh banyak negara sejak abad ke-19 hingga kini.

Konsep invisible hand yang diperkenalkan oleh Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) menjadi dasar bagi keyakinan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi negara yang berlebihan. Gagasan ini mendorong lahirnya kebijakan deregulasi dan privatisasi di berbagai negara, terutama sejak era neoliberal pada 1980-an. Menurut Stiglitz (2002), meskipun prinsip ini mendorong efisiensi, penerapannya tanpa kontrol sosial dapat memperbesar ketimpangan.

Teori keuntungan komparatif Ricardo memberikan justifikasi kuat bagi perdagangan bebas antarnegara. Dalam kerangka ini, setiap negara dianjurkan untuk mengekspor barang yang dapat diproduksi secara efisien dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri. Teori ini menjadi dasar bagi pembentukan

institusi global seperti *World Trade Organization* (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas seperti NAFTA dan *ASEAN Free Trade Area* (Krugman & Obstfeld, 2009).

Pemikiran Mill tentang kebebasan individu dan keadilan sosial juga memengaruhi kebijakan ekonomi modern, terutama dalam bidang redistribusi dan perlindungan sosial. Mill menekankan bahwa efisiensi ekonomi harus diimbangi dengan keadilan dalam distribusi kekayaan. Gagasan ini tercermin dalam kebijakan pajak progresif, subsidi pendidikan, dan sistem jaminan sosial di negara-negara maju (Mill, 1848; Sen, 1999).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, prinsip-prinsip klasik digunakan untuk mendorong liberalisasi pasar di negara berkembang melalui program reformasi struktural yang didukung oleh lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap mengabaikan konteks lokal dan memperbesar kerentanan ekonomi (Rodrik, 2007).

Ekonomi klasik juga memengaruhi kebijakan fiskal dan moneter modern melalui penekanan pada efisiensi alokasi sumber daya dan pengendalian inflasi. Meskipun Keynesianisme kemudian menantang beberapa asumsi klasik, banyak prinsip dasar seperti pentingnya investasi, tabungan, dan produktivitas tetap digunakan dalam

perumusan kebijakan makroekonomi (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Secara keseluruhan, pengaruh ekonomi klasik terhadap kebijakan ekonomi modern sangat luas dan beragam. Meskipun beberapa prinsip telah dimodifikasi atau dikritik, warisan pemikiran Smith, Ricardo, dan Mill tetap menjadi referensi utama dalam merancang sistem ekonomi yang efisien, terbuka, dan berorientasi pada pertumbuhan. Pemahaman terhadap pengaruh ini penting untuk menilai relevansi dan keterbatasan teori klasik dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

#### **4.6. Perbandingan Pemikiran Smith, Ricardo, dan Mill**

Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill merupakan tiga tokoh sentral dalam tradisi ekonomi klasik yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap teori nilai, perdagangan, dan keadilan sosial. Meskipun berada dalam satu aliran pemikiran, ketiganya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda dalam menjelaskan dinamika ekonomi dan peran negara.

Adam Smith, sebagai pelopor ekonomi klasik, menekankan pentingnya kebebasan individu dan mekanisme pasar dalam menciptakan efisiensi ekonomi. Dalam *The Wealth of Nations* (1776), ia memperkenalkan konsep *invisible hand* yang menggambarkan bagaimana

kepentingan pribadi dapat menghasilkan manfaat sosial tanpa perlu intervensi negara. Smith juga membedakan antara nilai guna dan nilai tukar, serta menekankan spesialisasi sebagai kunci produktivitas (Smith, 1776).

David Ricardo melanjutkan pemikiran Smith dengan fokus pada teori nilai kerja dan perdagangan internasional. Dalam *On the Principles of Political Economy and Taxation* (1817), Ricardo mengembangkan teori keuntungan komparatif, yang menunjukkan bahwa perdagangan bebas dapat menguntungkan semua negara meskipun satu negara lebih efisien dalam semua sektor. Ia juga memperkenalkan hukum hasil yang semakin berkurang dan teori distribusi antara pemilik tanah, kapitalis, dan pekerja (Ricardo, 1817).

John Stuart Mill, meskipun berada dalam tradisi klasik, mulai mengintegrasikan dimensi sosial dan etika dalam analisis ekonomi. Dalam *Principles of Political Economy* (1848), Mill menekankan bahwa meskipun hukum produksi bersifat tetap, distribusi kekayaan adalah hasil dari institusi sosial dan dapat diubah melalui kebijakan. Ia mendukung intervensi negara dalam pendidikan, perlindungan sosial, dan redistribusi kekayaan sebagai bagian dari keadilan ekonomi (Mill, 1848; Sen, 1999).

Perbedaan mendasar antara ketiganya terletak pada pandangan tentang peran negara. Smith dan Ricardo

cenderung mendukung pasar bebas dan peran negara yang minimal, sementara Mill membuka ruang bagi intervensi negara dalam rangka menciptakan keseimbangan sosial. Menurut Blaug (1997), Mill menjadi jembatan antara ekonomi klasik dan pemikiran sosial liberal yang berkembang di abad ke-19.

Dalam hal teori nilai, Smith dan Ricardo sama-sama menggunakan pendekatan nilai kerja, tetapi Ricardo lebih sistematis dan matematis dalam formulasi teorinya. Mill, di sisi lain, mulai mempertanyakan validitas teori nilai kerja dalam konteks distribusi dan konsumsi. Ia juga lebih terbuka terhadap pendekatan utilitarian dalam menilai kebijakan ekonomi (Mill, 1848; Spiegel, 1991).

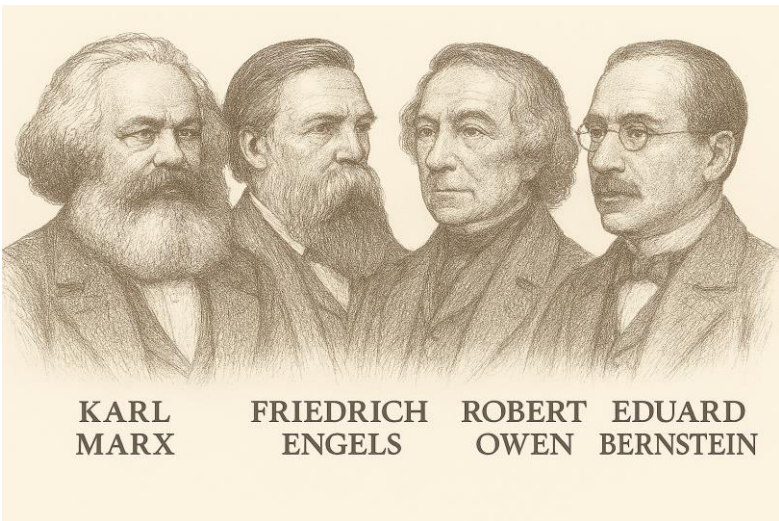
Secara metodologis, ketiganya menunjukkan evolusi dari analisis normatif ke pendekatan yang lebih empiris dan sosial. Smith membangun fondasi filosofis, Ricardo mengembangkan kerangka analitis, dan Mill memperluas cakupan ekonomi ke ranah etika dan kebijakan publik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ekonomi klasik bukanlah satu blok pemikiran yang homogen, melainkan spektrum gagasan yang terus berkembang.

Tabel 4.2. Perbandingan Tematik: Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill

| Aspek             | Adam Smith                             | David Ricardo                                   | John Stuart Mill                                |
|-------------------|--|---|---|
| Fokus Utama       | Pasar bebas dan spesialisasi           | Teori nilai kerja dan perdagangan internasional | Distribusi kekayaan dan keadilan sosial         |
| Konsep Kunci      | <i>Invisible hand</i> , nilai tukar    | Keuntungan komparatif, distribusi faktor        | Intervensi negara, institusi sosial             |
| Peran Negara      | Minimal, hanya menjaga hukum dan pasar | Minimal, mendukung perdagangan bebas            | Aktif dalam pendidikan dan redistribusi         |
| Teori Nilai       | Nilai kerja dan nilai tukar            | Nilai kerja dan hasil berkurang                 | Nilai kerja + pertimbangan utilitarian          |
| Warisan Pemikiran | Fondasi ekonomi liberal                | Teori perdagangan dan distribusi                | Transisi ke ekonomi sosial dan kebijakan publik |

## **BAB 5.**

# **EKONOMI SOSIALIS DAN KRITIK TERHADAP KAPITALISME**



**KARL  
MARX**

**FRIEDRICH  
ENGELS**

**ROBERT  
OWEN**

**EDUARD  
BERNSTEIN**

**B**ab ini menyajikan eksplorasi komprehensif terhadap pemikiran ekonomi sosialis sebagai respons terhadap ketimpangan dan eksploitasi dalam sistem kapitalisme. Dimulai dari analisis Karl Marx tentang teori nilai kerja dan konflik kelas, bab ini menelusuri bagaimana sosialisme utopis menawarkan visi alternatif berupa ekonomi kolektif dan komunitas ideal. Pemikiran sosialis tidak hanya membentuk gerakan politik, tetapi juga memengaruhi kebijakan ekonomi seperti redistribusi kekayaan, jaminan sosial, dan regulasi pasar. Evolusi dari marxisme klasik menuju sosialisme modern menunjukkan adaptasi terhadap konteks global yang berubah, termasuk integrasi prinsip demokrasi dan keberlanjutan. Kritik terhadap kapitalisme juga diperluas melalui perspektif ekonomi heterodoks yang menyoroti dampak sosial, ekologis, dan struktural dari sistem pasar bebas. Bab ini mengulas implementasi sosialisme di berbagai negara, dari Uni Soviet hingga Skandinavia, serta membandingkan sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan ekonomi syariah untuk memahami pendekatan yang berbeda terhadap kepemilikan, distribusi, dan keadilan. Dengan pendekatan historis dan analitis, bab ini memberikan landasan untuk memahami bagaimana ideologi ekonomi membentuk kebijakan dan struktur sosial di berbagai belahan dunia..

### **5.1. Pemikiran Karl Marx dan Teori Nilai Kerja**

Pemikiran Karl Marx memberikan fondasi bagi ekonomi sosialis dan menjadi kritik utama terhadap

sistem kapitalis modern. Salah satu kontribusi terpentingnya adalah *Teori Nilai Kerja* (Labor Theory of Value), yang ia kembangkan bersama Friedrich Engels dan dijabarkan secara mendalam dalam *Das Kapital* (1867). Marx berargumen bahwa nilai suatu komoditas ditentukan oleh jumlah "waktu kerja sosial yang dibutuhkan secara rata-rata" untuk memproduksinya, bukan oleh utilitas atau permintaan konsumen sebagaimana diyakini oleh teori nilai subjektif (Marx, 1867/1992).

Dalam kerangka ini, Marx menyoroti adanya "nilai lebih" (*surplus value*), yaitu selisih antara nilai produk yang dihasilkan pekerja dan upah yang mereka terima. Menurut Marx, pemilik modal mengeksploitasi pekerja dengan membayar upah lebih rendah dari nilai kerja aktual yang mereka kontribusikan dalam proses produksi (Elster, 1985). Nilai lebih inilah yang menjadi sumber keuntungan kapitalis, dan proses ini disebut sebagai bentuk eksploitasi sistemik dalam hubungan produksi kapitalis.

Marx juga mengembangkan konsep alienasi (*Entfremdung*), yaitu keterasingan pekerja dari hasil kerjanya, dari proses kerja, dari sesama pekerja, dan dari kemanusiaannya sendiri. Dalam masyarakat kapitalis, menurut Marx, kerja menjadi aktivitas yang terpisah dari ekspresi diri dan semata-mata menjadi sarana bertahan hidup (Ollman, 1976). Ini mencerminkan kritik Marx terhadap bagaimana kapitalisme mereduksi manusia menjadi alat produksi belaka.

Teori nilai kerja Marx memiliki akar dalam pemikiran klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, tetapi Marx menambahkan dimensi kritis dan historis-materialistik. Ia melihat konflik kelas sebagai motor penggerak sejarah, di mana perjuangan antara borjuasi (kelas pemilik modal) dan proletariat (kelas pekerja) adalah keniscayaan struktural dalam sistem kapitalis (Bottomore, 1991). Marx memprediksi bahwa ketimpangan yang terus tumbuh dan krisis dalam akumulasi kapital akan mendorong transformasi menuju masyarakat tanpa kelas.

Dalam pandangan Marx, pembebasan kaum pekerja hanya dapat terjadi dengan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pengelolaan ekonomi secara kolektif. Sistem sosialis, menurutnya, akan menghapus eksploitasi nilai lebih dan mengembalikan kontrol atas kerja kepada masyarakat secara demokratis. Pemikiran ini menjadi landasan ideologis bagi berbagai gerakan buruh dan negara-negara sosialis di abad ke-20.

Meski teori Marx menuai kritik dari mazhab neoklasik dan ekonomi liberal, ia tetap berpengaruh dalam ilmu sosial dan ekonomi politik. Beberapa ekonom dan filsuf kontemporer seperti David Harvey dan Thomas Piketty terus menggunakan kerangka analisis Marx untuk mengeksplorasi ketimpangan kekayaan, dinamika kapital, dan krisis sistemik global. Marx, dengan kata lain, tetap menjadi tokoh sentral dalam diskursus ekonomi-politik kontemporer.

## 5.2. Sosialisme Utopis dan Ekonomi Kolektif

Sosialisme utopis merupakan tahap awal perkembangan pemikiran sosialis yang muncul sebelum teori revolusioner Karl Marx. Tokoh-tokohnya seperti Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen membayangkan tatanan masyarakat yang harmonis, tanpa eksploitasi, di mana kekayaan dan produksi dikelola secara kolektif demi kesejahteraan bersama. Mereka percaya bahwa dengan perencanaan rasional dan moralitas tinggi, masyarakat dapat hidup dalam kesetaraan sosial tanpa harus melalui revolusi kelas (Taylor, 1982).

Henri de Saint-Simon (1760–1825) berpandangan bahwa masyarakat ideal harus dipimpin oleh teknokrat, ilmuwan, dan manajer yang akan mengatur produksi dan distribusi secara ilmiah untuk kepentingan umum. Ia menolak ketergantungan pada warisan feodal dan menyarankan agar industri dikelola oleh mereka yang produktif, bukan kaum aristokrat (Manuel, 1956). Ia meletakkan dasar bagi gagasan tentang peran aktif negara dalam merencanakan ekonomi demi mengurangi ketimpangan sosial.

Charles Fourier (1772–1837), dengan pendekatan yang lebih visioner, merancang komunitas ideal yang disebut “*phalanstères*,” yaitu unit sosial-ekonomi mandiri di mana setiap orang dapat bekerja sesuai minat dan memperoleh kepuasan moral serta material. Ia mengkritik peradaban kapitalis yang menekan naluri dan

keaktivitas manusia. Fourier melihat kerja bukan sebagai beban, melainkan sebagai ekspresi kebebasan—sebuah konsep yang kemudian memengaruhi teori alienasi Marx secara tidak langsung (Beecher, 1986).

Robert Owen (1771–1858), seorang pengusaha Inggris, menjadi tokoh penting dalam mewujudkan sosialisme utopis dalam praktik. Di pabrik miliknya di New Lanark, Skotlandia, ia mengembangkan sistem kerja yang manusiawi, mengurangi jam kerja, melarang pekerja anak, dan mendirikan sekolah serta fasilitas sosial. Ia juga mencoba menciptakan komunitas komunal di Amerika seperti New Harmony, meskipun hasilnya tidak bertahan lama. Owen meyakini bahwa lingkungan yang baik dapat membentuk manusia yang baik, dan bahwa kerja sama lebih unggul daripada persaingan dalam menciptakan kemakmuran kolektif (Claeys, 1989).

Inti dari sosialisme utopis adalah penolakan terhadap individualisme ekstrem dan ketimpangan sosial yang dihasilkan kapitalisme. Ekonomi kolektif yang mereka usulkan menempatkan produksi dan distribusi dalam kendali komunitas atau negara, bukan individu. Mereka percaya bahwa dengan menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi, masyarakat akan terbebas dari konflik kelas dan eksploitasi (Kolakowski, 1978). Produksi diarahkan untuk kebutuhan manusia, bukan keuntungan semata.

Namun demikian, sosialisme utopis sering dianggap tidak realistis karena kurangnya teori tentang mekanisme kekuasaan dan perubahan struktural. Kritik

utama dari Marx dan Engels adalah bahwa mereka “membayangkan surga sosial tanpa memahami realitas konflik kelas” (Marx & Engels, 1848/1976). Mereka menilai sosialisme utopis terlalu idealistis dan gagal memahami perlunya perjuangan politik serta kontrol kelas pekerja atas alat produksi.

Meski demikian, ide-ide sosialisme utopis tetap memberi pengaruh besar terhadap gerakan buruh, reformasi sosial, dan konsep ekonomi berbasis solidaritas. Pemikiran mereka membuka jalan bagi sosialisme ilmiah dan inspirasi bagi komunitas kooperatif modern, gerakan ekonomi solidaritas, dan sistem kesejahteraan sosial kontemporer. Beberapa unsur seperti perencanaan sosial, kerja sama ekonomi, dan redistribusi kekayaan dapat ditemukan dalam model negara kesejahteraan di Eropa atau ekonomi berbasis koperasi di berbagai negara.

Dengan kata lain, sosialisme utopis memberi alternatif moral dan filosofis terhadap ketimpangan sistem kapitalis, dan meskipun tidak berhasil secara praktis dalam bentuk awalnya, warisannya tetap hidup dalam berbagai bentuk eksperimentasi ekonomi kolektif dan kebijakan sosial kontemporer yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.

### **5.3. Dampak Pemikiran Sosialisme Terhadap Kebijakan Ekonomi**

Pemikiran sosialisme telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan kebijakan ekonomi

modern, baik dalam bentuk sistem ekonomi terpusat maupun dalam pendekatan hibrida yang mengintegrasikan elemen pasar dan negara. Salah satu dampak utamanya adalah munculnya sistem perencanaan ekonomi nasional, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengalokasikan sumber daya, menentukan harga, dan merancang pembangunan jangka panjang. Model ini tercermin dalam ekonomi terencana Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya, yang berupaya menghapus mekanisme pasar demi pemerataan dan efisiensi produksi kolektif (Kornai, 1992).

Selain sistem terpusat, sosialisme juga memengaruhi kebijakan redistributif di negara-negara kapitalis melalui adopsi program kesejahteraan sosial, pajak progresif, dan subsidi untuk kelompok rentan. Esping-Andersen (1990) menunjukkan bahwa negara kesejahteraan di Eropa Barat banyak dipengaruhi oleh prinsip kesetaraan sosial dan solidaritas kolektif yang menjadi inti pemikiran sosialis. Intervensi negara dalam pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial menjadi bukti bahwa ide-ide sosialisme telah merasuk ke dalam sistem ekonomi pasar dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan menciptakan keadilan sosial.

Sosialisme juga memberikan landasan bagi munculnya koperasi dan ekonomi solidaritas sebagai alternatif terhadap kepemilikan pribadi atas alat produksi. Bentuk kepemilikan kolektif ini diimplementasikan dalam berbagai sektor, mulai dari

pertanian hingga industri jasa. Menurut Birchall (1997), koperasi menjadi sarana penting bagi pekerja untuk mengendalikan proses produksi dan berbagi keuntungan secara adil, mencerminkan semangat ekonomi demokratis yang berpihak pada komunitas, bukan investor semata.

Di negara-negara berkembang, pemikiran sosialis turut membentuk model pembangunan yang menekankan kemandirian ekonomi, intervensi negara dalam industrialisasi, dan perlindungan sektor strategis dari dominasi asing. Dalam konteks ini, sosialisme menjadi inspirasi bagi kebijakan substitusi impor, nasionalisasi, serta pembentukan perusahaan milik negara (Chang, 2002). Meskipun kebijakan tersebut tidak selalu berhasil, kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas nasional tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, pemikiran sosialisme telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas cakrawala kebijakan ekonomi di luar mekanisme pasar murni. Di era globalisasi dan ketimpangan yang kembali meningkat, banyak ekonom dan pembuat kebijakan kembali melirik prinsip-prinsip sosialis—seperti hak atas layanan dasar, pembatasan kekuatan korporasi, dan keadilan distribusi—untuk merancang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **5.4. Evolusi Pemikiran Sosialis:**

## 5.5. Dari Marxisme ke Sosialisme Modern

Pemikiran sosialis telah mengalami evolusi signifikan sejak dikembangkan pertama kali oleh Karl Marx pada abad ke-19, dan terus beradaptasi seiring perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial global. Marx dan Engels mengajukan kerangka teoritis yang menekankan konflik kelas, perjuangan proletariat melawan borjuasi, serta pentingnya penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi demi menciptakan masyarakat tanpa kelas (Marx, 1867/1992). Teori ini menjadi basis ideologis bagi revolusi sosial dan sistem ekonomi terpusat seperti yang diterapkan di Uni Soviet.

Namun, setelah pengalaman berbagai negara sosialis abad ke-20, muncul kesadaran akan keterbatasan pendekatan Marxis-Leninis yang cenderung otoriter dan sentralistik. Hal ini mendorong lahirnya sosialisme demokratik, suatu bentuk sosialisme yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai demokrasi liberal. Sosialisme demokratik menolak penggunaan kekerasan atau kediktatoran proletariat, dan lebih menekankan pada perubahan melalui jalur parlementer dan reformasi institusional (Draper, 1966). Partai-partai sosialis Eropa seperti SPD di Jerman dan Labour Party di Inggris mengadopsi pendekatan ini setelah Perang Dunia II.

Seiring waktu, sosialisme modern juga mengakomodasi prinsip pasar dalam bentuk ekonomi campuran, di mana sektor swasta tetap eksis tetapi

dilengkapi dengan intervensi negara untuk menjamin kesejahteraan dan menyeimbangkan ketimpangan. Model ini tercermin dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial kepada seluruh warga negara (Esping-Andersen, 1990). Dalam model ini, redistribusi dilakukan melalui pajak progresif dan kebijakan perlindungan sosial tanpa menghapuskan sepenuhnya kepemilikan pribadi.

Pemikiran sosialisme juga berkembang ke arah ekonomi berbasis solidaritas, koperasi, dan demokrasi ekonomi. Ini mencakup pengelolaan perusahaan oleh pekerja, partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta penguatan ekonomi lokal berbasis kebutuhan, bukan semata laba (Wright, 2010). Gerakan ini berkembang di berbagai belahan dunia sebagai respons atas krisis neoliberalisme dan ketimpangan ekstrem.

Di abad ke-21, sosialisme mengalami kebangkitan wacana, khususnya di tengah meningkatnya ketimpangan global, krisis iklim, dan ketidakamanan kerja. Tokoh seperti Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn mengusung bentuk sosialisme modern dengan penekanan pada hak atas layanan dasar, pembatasan kekuasaan korporasi, dan penguatan sektor publik. Meskipun tidak menyebut diri sebagai Marxis, mereka membawa kembali diskursus tentang peran negara dan kepemilikan bersama dalam menjamin keadilan sosial.

Dengan demikian, sosialisme telah berevolusi dari teori revolusioner menjadi pendekatan pluralistik yang beragam, dari sistem komando ekonomi hingga negara kesejahteraan berbasis pasar. Evolusi ini menunjukkan fleksibilitas dan kapasitas adaptif sosialisme terhadap perubahan zaman, sekaligus kesadaran akan perlunya demokratisasi dalam setiap aspek kebijakan ekonomi.

### **5.5. Kritik terhadap Kapitalisme: Perspektif Sosialis dan Ekonomi Heterodoks**

Pemikiran sosialis telah mengalami evolusi signifikan sejak dikembangkan pertama kali oleh Karl Marx pada abad ke-19, dan terus beradaptasi seiring perubahan kondisi politik, ekonomi, dan sosial global. Marx dan Engels mengajukan kerangka teoritis yang menekankan konflik kelas, perjuangan proletariat melawan borjuasi, serta pentingnya penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi demi menciptakan masyarakat tanpa kelas (Marx, 1867/1992). Teori ini menjadi basis ideologis bagi revolusi sosial dan sistem ekonomi terpusat seperti yang diterapkan di Uni Soviet.

Namun, setelah pengalaman berbagai negara sosialis abad ke-20, muncul kesadaran akan keterbatasan pendekatan Marxis-Leninis yang cenderung otoriter dan sentralistik. Hal ini mendorong lahirnya sosialisme demokratik, suatu bentuk sosialisme yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan sosial dengan nilai-nilai demokrasi liberal. Sosialisme demokratik menolak penggunaan kekerasan atau kediktatoran

proletariat, dan lebih menekankan pada perubahan melalui jalur parlementer dan reformasi institusional (Draper, 1966). Partai-partai sosialis Eropa seperti SPD di Jerman dan Labour Party di Inggris mengadopsi pendekatan ini setelah Perang Dunia II.

Seiring waktu, sosialisme modern juga mengakomodasi prinsip pasar dalam bentuk ekonomi campuran, di mana sektor swasta tetap eksis tetapi dilengkapi dengan intervensi negara untuk menjamin kesejahteraan dan menyeimbangkan ketimpangan. Model ini tercermin dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial kepada seluruh warga negara (Esping-Andersen, 1990). Dalam model ini, redistribusi dilakukan melalui pajak progresif dan kebijakan perlindungan sosial tanpa menghapuskan sepenuhnya kepemilikan pribadi.

Pemikiran sosialisme juga berkembang ke arah ekonomi berbasis solidaritas, koperasi, dan demokrasi ekonomi. Ini mencakup pengelolaan perusahaan oleh pekerja, partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta penguatan ekonomi lokal berbasis kebutuhan, bukan semata laba (Wright, 2010). Gerakan ini berkembang di berbagai belahan dunia sebagai respons atas krisis neoliberalisme dan ketimpangan ekstrem.

Di abad ke-21, sosialisme mengalami kebangkitan wacana, khususnya di tengah meningkatnya ketimpangan global, krisis iklim, dan ketidakamanan kerja. Tokoh

seperti Bernie Sanders dan Jeremy Corbyn mengusung bentuk sosialisme modern dengan penekanan pada hak atas layanan dasar, pembatasan kekuasaan korporasi, dan penguatan sektor publik. Meskipun tidak menyebut diri sebagai Marxis, mereka membawa kembali diskursus tentang peran negara dan kepemilikan bersama dalam menjamin keadilan sosial.

Dengan demikian, sosialisme telah berevolusi dari teori revolusioner menjadi pendekatan pluralistik yang beragam, dari sistem komando ekonomi hingga negara kesejahteraan berbasis pasar. Evolusi ini menunjukkan fleksibilitas dan kapasitas adaptif sosialisme terhadap perubahan zaman, sekaligus kesadaran akan perlunya demokratisasi dalam setiap aspek kebijakan ekonomi.

## **5.6. Implementasi Sosialisme di Berbagai Negara**

Implementasi sosialisme di berbagai negara menunjukkan keragaman bentuk dan hasil, tergantung pada konteks sejarah, struktur politik, serta kapasitas institusional masing-masing negara. Beberapa studi kasus menyoroti keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan dan menyediakan layanan sosial universal, sementara yang lain menampilkan tantangan besar dalam efisiensi, kebebasan individu, dan daya saing ekonomi.

Uni Soviet merupakan contoh paling awal dan dominan dari ekonomi sosialis terpusat. Negara ini menerapkan sistem kepemilikan negara atas alat produksi dan perencanaan ekonomi lima tahunan.

Selama dekade awal, Uni Soviet berhasil melakukan industrialisasi cepat dan memperluas pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, menurut Kornai (1992), sistem ini mengalami stagnasi karena kurangnya insentif inovasi, birokratisasi berlebihan, dan ketidakefisienan distribusi, yang pada akhirnya berkontribusi pada keruntuhan ekonomi di akhir 1980-an.

Cina menjadi contoh unik dari evolusi sosialisme menuju model hybrid yang dikenal sebagai “sosialisme dengan karakteristik Tiongkok.” Sejak reformasi tahun 1978 di bawah Deng Xiaoping, Cina mengadopsi mekanisme pasar sambil mempertahankan kendali politik Partai Komunis. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan kemiskinan massal, meskipun disparitas wilayah dan kelas tetap menjadi tantangan. Lin (2012) mencatat bahwa pendekatan pragmatis Cina menunjukkan bahwa fleksibilitas ideologis dapat mendorong keberhasilan ekonomi dalam sistem sosialis.

Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia sering disebut sebagai contoh keberhasilan sosialisme demokratik. Mereka menggabungkan pasar bebas dengan layanan publik universal dan redistribusi melalui pajak progresif. Esping-Andersen (1990) menjelaskan bahwa model ini mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kompetitif sekaligus menjamin tingkat kesetaraan yang tinggi dan kesejahteraan sosial yang luas. Tantangan utamanya

terletak pada tekanan globalisasi dan keberlanjutan fiskal di tengah populasi yang menua.

Kuba menawarkan studi kasus negara kecil yang bertahan dengan sistem ekonomi sosialis sejak revolusi 1959. Pemerintah menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis dengan hasil indikator sosial yang cukup baik. Namun, blokade ekonomi, kurangnya diversifikasi produksi, dan pembatasan kebebasan ekonomi menyebabkan stagnasi dan kelangkaan barang kebutuhan. Mesa-Lago (2009) menyoroti bahwa keberhasilan Kuba dalam layanan publik tidak diimbangi oleh fleksibilitas ekonomi yang memadai.

Venezuela di bawah Hugo Chávez menerapkan sosialisme abad ke-21 dengan menasionalisasi sektor strategis dan menjalankan program sosial besar-besaran. Namun, kegagalan dalam mengelola sumber daya minyak, ketergantungan impor, serta kelemahan tata kelola dan hiperinflasi menyebabkan krisis ekonomi dan sosial yang parah. Corrales dan Penfold (2011) menilai bahwa tanpa institusi yang kuat, kebijakan redistributif bisa kehilangan efektivitas dan legitimasi.

Secara keseluruhan, implementasi sosialisme menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan antara tujuan sosial dan efisiensi ekonomi, sistem politik yang akuntabel, serta kapasitas adaptasi terhadap perubahan global. Tidak ada satu model tunggal yang berlaku universal, dan berbagai negara menyesuaikan pendekatan sosialisnya dengan konteks domestik dan geopolitik masing-masing.

## 5.7. Perbandingan Sistem Ekonomi: Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah

Perbandingan antara sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi syariah mencerminkan perbedaan mendasar dalam cara memandang kepemilikan, distribusi kekayaan, dan peran negara serta moralitas dalam sistem ekonomi. Masing-masing sistem memiliki pendekatan unik terhadap tujuan akhir: menciptakan kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

**Kapitalisme** menekankan pada kepemilikan pribadi, mekanisme pasar bebas, dan dorongan laba sebagai motor penggerak ekonomi. Dalam sistem ini, alokasi sumber daya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, sementara peran negara minimal dan terbatas pada regulasi serta perlindungan hak kepemilikan. Keunggulan kapitalisme terletak pada inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti terlihat dalam pengalaman negara-negara maju. Namun, kelemahannya adalah ketimpangan sosial yang tinggi, akumulasi kekayaan pada segelintir elit, dan terpinggirkannya kelompok lemah (Piketty, 2014).

**Sosialisme**, di sisi lain, menempatkan produksi dan distribusi kekayaan di bawah kendali kolektif atau negara dengan tujuan utama pemerataan. Negara memegang peran besar dalam merancang kebijakan ekonomi, menetapkan harga, dan menyediakan layanan dasar secara universal. Sistem ini unggul dalam menciptakan kesetaraan, akses terhadap layanan publik, serta

perlindungan tenaga kerja. Namun, tantangannya terletak pada efisiensi rendah, birokrasi yang besar, serta minimnya insentif inovasi dan daya saing, seperti terlihat dalam pengalaman ekonomi terpusat di Uni Soviet (Kornai, 1992).

**Ekonomi syariah** hadir sebagai sistem hybrid yang menggabungkan kepemilikan pribadi, prinsip keadilan sosial, serta nilai-nilai spiritual. Sistem ini melarang riba (bunga), maisir (spekulasi berlebihan), dan gharar (ketidakpastian ekstrem), dan menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan kerja sama bisnis seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Keunggulan ekonomi syariah adalah penciptaan stabilitas keuangan, redistribusi kekayaan secara etis, dan keterpaduan antara tujuan ekonomi dan moralitas (Chapra, 2000). Namun, tantangannya adalah implementasi regulasi syariah secara menyeluruh di lingkungan modern yang didominasi sistem konvensional, serta kebutuhan infrastruktur kelembagaan yang kuat.

Dalam praktiknya, ketiga sistem ini tidak berdiri secara murni di banyak negara. Kapitalisme sering dikombinasikan dengan sistem kesejahteraan seperti di Skandinavia, sosialisme mengambil bentuk sosialisme demokratik dengan partisipasi pasar, dan ekonomi syariah berkembang dalam kerangka sistem dualistis di negara-negara mayoritas Muslim. Interaksi antara ketiganya memperkaya alternatif kebijakan yang kontekstual justru membuka ruang bagi terciptanya kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

# BAB 6. EKONOMI NEOKLASIK DAN MARGINALISME



**B**ab ini mengkaji transformasi besar dalam teori ekonomi yang terjadi melalui revolusi marginal dan lahirnya pendekatan neoklasik. Berbeda dari ekonomi klasik yang menekankan nilai kerja dan struktur produksi, ekonomi neoklasik memperkenalkan konsep nilai subjektif, teori marginal, dan analisis keseimbangan pasar sebagai fondasi baru dalam memahami perilaku ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall menggabungkan intuisi ekonomi dengan pendekatan matematis, menjadikan ekonomi sebagai disiplin yang lebih kuantitatif dan prediktif. Konsep efisiensi Pareto dan optimalisasi sumber daya memperkuat kerangka normatif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bab ini juga menyoroti kritik terhadap asumsi rasionalitas dan pasar sempurna dalam teori neoklasik, serta bagaimana pendekatan ini tetap menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi modern. Dengan menelusuri evolusi pemikiran, tokoh-tokoh utama, dan penerapan praktisnya, bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana ekonomi neoklasik membentuk paradigma dominan dalam analisis dan kebijakan ekonomi kontemporer.

### **6.1. Konsep Nilai Subjektif dan Teori Marginal**

Dalam ekonomi neoklasik, lahirnya konsep nilai subjektif dan teori marginal menandai pergeseran besar dari pendekatan klasik yang menilai nilai suatu barang berdasarkan biaya produksi atau waktu kerja. Revolusi marginal (marginal revolution) yang terjadi pada akhir

abad ke-19 dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti William Stanley Jevons, Carl Menger, dan Léon Walras, yang secara independen mengembangkan teori bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaan tambahannya bagi individu—konsep yang dikenal sebagai *marginal utility* (Gossen, 1854; Jevons, 1871).

Nilai subjektif mengacu pada pandangan bahwa nilai tidak melekat pada suatu barang secara inheren, melainkan bergantung pada persepsi dan kebutuhan masing-masing individu. Sebuah barang bisa sangat berharga bagi seseorang dalam kondisi tertentu, tetapi tidak memiliki arti bagi orang lain dalam konteks berbeda. Carl Menger (1871) menegaskan bahwa nilai berasal dari penilaian subjektif atas seberapa besar kemampuan barang tersebut memuaskan keinginan.

Sementara itu, teori marginal menjelaskan bahwa keputusan ekonomi dibuat berdasarkan pertimbangan manfaat tambahan (*marginal benefit*) dan biaya tambahan (*marginal cost*) dari suatu pilihan. Misalnya, seseorang akan terus mengonsumsi air selama manfaatnya lebih besar dari biaya atau usaha untuk mendapatkannya, namun saat manfaat tambahan menurun, konsumsinya pun akan berhenti. Inilah yang menjelaskan paradoks nilai air dan berlian: air sangat penting, tetapi karena tersedia berlimpah, manfaat marginalnya rendah—sehingga nilainya rendah secara ekonomi (Marshall, 1890).

Teori marginal juga menjadi dasar analisis penawaran dan permintaan, titik keseimbangan pasar,

hingga teori produksi dan konsumsi. Léon Walras, melalui pendekatan matematis dalam *Éléments d'économie politique pure* (1874), mengembangkan model keseimbangan umum (*general equilibrium*) yang menggambarkan bagaimana semua pasar saling memengaruhi dan menyesuaikan diri menuju keseimbangan melalui interaksi agen rasional yang memaksimalkan utilitas dan laba.

Konsep nilai subjektif dan analisis marginal menjadi fondasi dari pemikiran neoklasik modern, mempengaruhi pengembangan teori harga, distribusi pendapatan, dan teori pilihan konsumen. Nilai tidak lagi dilihat sebagai entitas objektif, tetapi sebagai hasil dari interaksi preferensi individu, keterbatasan sumber daya, dan informasi pasar yang tersedia.

## **6.2. Pemikiran Alfred Marshall dan Keseimbangan Pasar**

Alfred Marshall adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan ekonomi neoklasik dan dikenal sebagai perancang sistematis pertama kerangka analisis penawaran-permintaan dalam menentukan harga pasar. Dalam karyanya *Principles of Economics* (1890), Marshall mengintegrasikan pendekatan mikroekonomi dengan matematika dan teori utilitas, menciptakan fondasi bagi banyak konsep ekonomi modern, termasuk elastisitas harga, analisis marjinal, dan konsep keseimbangan parsial (*partial equilibrium*).

Salah satu kontribusi penting Marshall adalah model keseimbangan pasar, yaitu kondisi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada suatu tingkat harga tertentu. Ia menjelaskan bahwa harga pasar terbentuk dari interaksi dinamis antara kekuatan penawaran dan permintaan, dan bahwa kedua sisi pasar harus dianalisis secara bersamaan. Dalam analoginya yang terkenal, Marshall menyamakan harga dengan posisi gunting: "Kita tidak bisa mengatakan bahwa satu bilah gunting lebih penting dari yang lain, begitu pula kita tidak bisa menyatakan bahwa permintaan atau penawaran sendiri menentukan harga" (Marshall, 1890).

Marshall juga memperkenalkan perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang dalam analisis pasar. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi tetap, sehingga penawaran lebih kaku. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua input bisa disesuaikan, membuat penawaran lebih elastis. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana pasar merespons perubahan teknologi, preferensi konsumen, atau biaya produksi dari waktu ke waktu.

Dengan pendekatan grafis dan matematisnya, Marshall mempermudah pemahaman terhadap mekanisme pasar dan menjadi tokoh sentral dalam menjembatani ekonomi klasik (seperti Adam Smith dan David Ricardo) dengan ekonomi modern. Pemikirannya juga membuka jalan bagi pengembangan analisis

mikroekonomi kontemporer dan teori kebijakan publik yang berbasis efisiensi pasar.

### **6.3. Peran Matematis Dalam Ekonomi**

Peran matematis dalam ekonomi modern sangatlah fundamental. Seiring berkembangnya ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmiah, pendekatan matematis memungkinkan para ekonom untuk menyusun model, membuat prediksi, dan mengevaluasi kebijakan secara sistematis dan terukur. Matematisasi ekonomi dimulai secara signifikan pada akhir abad ke-19, terutama dengan kontribusi Léon Walras, Vilfredo Pareto, dan kemudian berkembang pesat melalui pendekatan ekonomi neoklasik dan ekonomi mikro modern.

Léon Walras merupakan pelopor penggunaan sistem persamaan simultan dalam menjelaskan keseimbangan umum (*general equilibrium*), yakni kondisi di mana semua pasar dalam suatu perekonomian mencapai keseimbangan secara serentak. Dalam karyanya *Éléments d'économie politique pure* (1874), ia membuktikan bahwa interaksi antara pelaku ekonomi dapat dianalisis menggunakan sistem aljabar linear, menjadikan ekonomi sebagai bagian dari ilmu eksakta (Walras, 1874).

Penggunaan matematika dalam ekonomi terus berkembang melalui kontribusi Paul Samuelson yang mengembangkan *comparative statics* dan pendekatan matematis terhadap fungsi konsumsi, produksi, dan utilitas dalam *Foundations of Economic Analysis* (1947).

Samuelson menunjukkan bahwa ekonomi dapat dianalisis seperti fisika, menggunakan kalkulus dan optimisasi untuk menggambarkan perilaku agen ekonomi secara rasional dan terukur (Samuelson, 1947).

Matematika juga memainkan peran penting dalam teori permainan (*game theory*), terutama melalui karya John von Neumann dan Oskar Morgenstern dalam *Theory of Games and Economic Behavior* (1944). Teori ini membantu memahami strategi interaktif antar pelaku ekonomi yang rasional dalam konteks persaingan, kolusi, dan negosiasi. Teori permainan kini menjadi bagian esensial dalam analisis pasar oligopoli, politik ekonomi, dan kontrak.

Di era ekonomi modern, pendekatan matematis digunakan untuk menyusun model makroekonomi dinamis, seperti *Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)*, yang banyak digunakan oleh bank sentral dalam menganalisis kebijakan moneter dan ekspektasi agen ekonomi. Selain itu, ekonomi keuangan dan *econometrics* bergantung penuh pada kalkulus, statistik, dan aljabar linear dalam mengolah data dan menguji hipotesis ekonometrik.

Kritik terhadap matematisasi ekonomi memang ada, terutama dari aliran heterodoks yang menilai bahwa kompleksitas manusia tidak bisa direduksi menjadi angka dan persamaan. Namun, selama digunakan secara bijak dan tidak mengabaikan konteks sosial, pendekatan matematis telah menjadi alat vital dalam transformasi ekonomi menjadi ilmu empiris dan prediktif.

#### 6.4. Revolusi Marginal dan Tokoh-Tokoh Utama

Revolusi Marginal—atau *marginal revolution*—merupakan tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi yang terjadi sekitar tahun 1870-an. Revolusi ini menandai peralihan paradigma dari teori nilai objektif yang berfokus pada biaya produksi (sebagaimana dianut oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo), ke teori nilai subjektif dan marginal, yang melihat bahwa nilai suatu barang berasal dari kegunaan tambahannya bagi konsumen. Pergeseran ini melahirkan fondasi bagi ekonomi neoklasik modern dan menata ulang konsep harga, permintaan, dan perilaku konsumen secara lebih rinci dan realistis.

Tiga tokoh utama dalam Revolusi Marginal adalah Carl Menger dari Austria, William Stanley Jevons dari Inggris, dan Léon Walras dari Prancis-Swiss. Ketiganya mengembangkan teori utilitas marginal secara independen tetapi hampir bersamaan, sehingga mereka sering disebut sebagai pendiri ekonomi neoklasik.

Carl Menger (1871), dalam *Principles of Economics*, mengemukakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh tingkat kegunaan terakhir atau *marginal utility*—yaitu manfaat paling rendah tetapi masih relevan yang diperoleh dari satu unit tambahan barang tersebut. Menger mengembangkan pendekatan deduktif-kualitatif yang menekankan pentingnya keputusan individu dalam menentukan nilai dan harga, dan menjadi pelopor dari *Austrian School of Economics* (Hayek, 1994).

William Stanley Jevons (1871) juga menyusun dasar teori utilitas marjinal dalam *The Theory of Political Economy*. Ia menyatakan bahwa nilai suatu barang sebanding dengan kemampuan barang itu dalam memenuhi keinginan, dan menekankan analisis matematis terhadap keputusan ekonomi. Jevons menggunakan kalkulus untuk menjelaskan prinsip bahwa *marginal utility* menurun seiring peningkatan konsumsi, memperkenalkan ide penting tentang perilaku rasional dan alokasi optimal.

Sementara itu, Léon Walras (1874) menciptakan pendekatan matematis paling sistematis dengan mengembangkan teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*). Dalam *Éléments d'économie politique pure*, ia menggunakan sistem persamaan simultan untuk menunjukkan bagaimana semua pasar dalam suatu perekonomian dapat mencapai keseimbangan secara serempak jika setiap agen ekonomi bertindak secara rasional dalam mengoptimalkan utilitas dan laba. Pemikiran Walras memperkuat ekonomi sebagai ilmu formal dan eksakta.

Revolusi Marginal mengubah cara pandang terhadap nilai, perilaku ekonomi, dan mekanisme pasar. Dari pendekatan berbasis biaya objektif, ilmu ekonomi bergerak ke arah yang lebih individualistik dan psikologis, membuka jalan bagi teori permintaan, elastisitas harga, dan teori keseimbangan pasar yang menjadi tulang punggung ekonomi mikro.

## 6.5. Efisiensi Pareto dan Optimalisasi Sumber Daya

Dalam ekonomi neoklasik, efisiensi Pareto merupakan konsep kunci yang digunakan untuk menilai optimalitas dalam alokasi sumber daya. Dikembangkan oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto pada awal abad ke-20, efisiensi ini terjadi ketika tidak mungkin membuat seseorang lebih sejahtera tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Dengan kata lain, sumber daya telah dialokasikan sedemikian rupa sehingga *semua kemungkinan perbaikan telah tercapai tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain* (Pareto, 1906).

Dalam konteks pasar, efisiensi Pareto tercapai ketika semua agen ekonomi bertindak rasional, informasi bersifat sempurna, tidak ada kegagalan pasar, dan semua barang bersifat privat. Pada kondisi ini, pasar kompetitif akan menghasilkan alokasi di mana *marginal rate of substitution* (MRS) antar konsumen dan *marginal rate of transformation* (MRT) dari produksi sesuai, sehingga tidak ada insentif untuk redistribusi atau perubahan pola konsumsi-produksi (Mas-Colell, Whinston, & Green, 1995).

Konsep ini menjadi landasan bagi teori keseimbangan umum (*general equilibrium theory*), terutama dalam karya Léon Walras, yang menunjukkan bahwa dalam kondisi kompetitif sempurna, pasar akan mencapai efisiensi Pareto. Dalam kerangka ini, harga berfungsi sebagai sinyal yang mengarahkan alokasi sumber daya menuju titik keseimbangan yang efisien, di

mana tidak ada kelebihan atau kekurangan pasokan (Arrow & Debreu, 1954).

Namun, efisiensi Pareto tidak selalu identik dengan keadilan atau pemerataan. Alokasi sumber daya bisa efisien tetapi tetap menghasilkan ketimpangan ekstrem. Oleh karena itu, ekonom sering menggabungkan efisiensi Pareto dengan pertimbangan distribusi seperti kriteria Kaldor-Hicks, yang memungkinkan kebijakan redistribusi meskipun tidak Pareto optimal, asalkan keuntungan bersihnya positif (Sen, 1970).

Dalam praktik kebijakan publik, analisis efisiensi Pareto digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan meningkatkan kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain, misalnya dalam sistem subsidi, pajak, atau deregulasi. Di sektor privat, efisiensi ini menjadi acuan dalam desain pasar, pengambilan keputusan produksi, serta manajemen rantai pasok, dengan tujuan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan output dari sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, efisiensi Pareto merupakan pilar penting dalam teori neoklasik yang menggambarkan kondisi alokasi ideal, namun penerapannya dalam dunia nyata memerlukan penyesuaian terhadap realitas imperfeksi pasar dan kebutuhan akan kebijakan redistributif.

## **6.6. Kritik terhadap Ekonomi Neoklasik**

Ekonomi neoklasik, meskipun mendominasi arus utama pemikiran ekonomi modern, telah menghadapi

berbagai kritik tajam dari kalangan ekonomi heterodoks yang mempertanyakan asumsi dasar, metode analisis, dan relevansi sosialnya. Kritik ini datang dari beragam perspektif seperti Keynesianisme, ekonomi institusional, post-Keynesian, Marxis, hingga ekonomi feminis dan ekologis.

Salah satu kritik utama datang dari Keynesianisme, yang menentang asumsi ekonomi neoklasik tentang pasar yang selalu mencapai keseimbangan secara otomatis. John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936) menekankan bahwa permintaan agregat bersifat fluktuatif dan ketidakpastian masa depan menyebabkan pasar tenaga kerja tidak selalu menyerap semua tenaga kerja yang tersedia. Keynes menolak gagasan bahwa upah akan menyesuaikan sendiri untuk mencapai keseimbangan pasar, dan justru menekankan peran aktif pemerintah dalam mengatasi resesi dan pengangguran melalui kebijakan fiskal.

Dari sisi ekonomi institusional, kritik difokuskan pada pengabaian struktur sosial, politik, dan hukum oleh ekonomi neoklasik. Ekonom seperti Thorstein Veblen dan Douglass North menilai bahwa ekonomi tidak dapat dipahami hanya melalui perilaku individual rasional, tetapi harus dipelajari dalam konteks institusi yang membentuk preferensi, peluang, dan batasan sosial. Veblen (1899) bahkan mencemooh “manusia ekonomi rasional” sebagai makhluk fiktif yang tidak

mencerminkan perilaku manusia nyata dalam masyarakat.

Post-Keynesian menambah kritik dengan menekankan pentingnya waktu historis, ketidakpastian fundamental, dan ketidakseimbangan permanen. Tokoh seperti Joan Robinson dan Hyman Minsky berpendapat bahwa sistem keuangan rentan terhadap instabilitas endogen, dan bahwa ekspektasi investor seringkali bersifat spekulatif dan tidak rasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal perlu adaptif terhadap dinamika krisis dan gelembung finansial.

Dari perspektif ekonomi feminis, kritik diarahkan pada pengabaian peran kerja reproduktif dan rumah tangga dalam model neoklasik. Barbara Bergmann dan Nancy Folbre menunjukkan bahwa ekonomi arus utama gagal menghitung kontribusi perempuan dalam menjaga kesejahteraan sosial karena terlalu fokus pada aktivitas pasar dan laba. Ini menghasilkan kebijakan publik yang bias gender dan gagal menangkap dinamika ekonomi rumah tangga secara utuh.

Ekonomi ekologis menantang asumsi pertumbuhan tak terbatas dalam model neoklasik dan menyoroti ketidaksesuaian antara pasar dengan batas-batas lingkungan. Herman Daly mengusulkan konsep *steady-state economy* untuk menggantikan paradigma pertumbuhan konvensional. Model neoklasik yang mengabaikan eksternalitas lingkungan dianggap bertanggung jawab atas degradasi ekologis dan krisis iklim.

Akhirnya, pendekatan Marxis tetap kritis terhadap asumsi neoklasik tentang kesetaraan pasar dan peran netral modal. Ekonomi Marxis seperti David Harvey menyoroti bahwa distribusi kekayaan dan kepemilikan alat produksi tidak pernah merata, dan bahwa sistem pasar justru menciptakan dan mempertahankan struktur ketimpangan dan eksploitasi.

Dengan demikian, meskipun ekonomi neoklasik telah membentuk kerangka dominan dalam analisis kebijakan publik dan pendidikan ekonomi, spektrum kritik heterodoks menunjukkan bahwa pemahaman ekonomi yang lebih luas dan kontekstual diperlukan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer yang kompleks dan multidimensional.

#### **6.7. Penerapan Teori Neoklasik dalam Kebijakan Ekonomi Modern**

Prinsip-prinsip ekonomi neoklasik telah menjadi fondasi utama dalam perancangan kebijakan ekonomi modern, terutama yang berkaitan dengan efisiensi pasar, deregulasi, dan kebijakan persaingan. Teori neoklasik menekankan bahwa individu bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas atau laba, dan bahwa pasar, jika kompetitif dan bebas dari distorsi, akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien secara Pareto (Mas-Colell, Whinston, & Green, 1995).

Salah satu penerapan nyata dari teori ini adalah dalam kebijakan privatisasi dan deregulasi sektor publik. Di banyak negara, sejak dekade 1980-an, pemerintah

telah mengalihkan kepemilikan perusahaan negara ke sektor swasta dengan asumsi bahwa pasar akan menyediakan insentif yang lebih baik untuk efisiensi dan inovasi. Contohnya, privatisasi British Telecom dan British Gas di Inggris di bawah pemerintahan Margaret Thatcher mencerminkan kepercayaan pada prinsip pasar bebas dan kompetisi sebagai alat penggerak efisiensi (Vickers & Yarrow, 1988).

Teori neoklasik juga mendasari kebijakan persaingan dan antimonopoli, yang bertujuan menjaga struktur pasar tetap kompetitif agar tidak terjadi kegagalan pasar seperti monopoli atau kartel. Di Uni Eropa dan Amerika Serikat, lembaga seperti European Commission dan Federal Trade Commission (FTC) menggunakan kerangka neoklasik untuk menilai apakah merger atau akuisisi akan mengurangi pilihan konsumen atau menaikkan harga secara tidak wajar. Contohnya adalah pemblokiran akuisisi Nvidia atas ARM oleh regulator antimonopoli karena dinilai berpotensi menghambat inovasi dan merugikan persaingan di pasar teknologi.

Dalam bidang kebijakan pajak, teori efisiensi optimal pajak (optimal tax theory) yang dikembangkan oleh ekonom seperti James Mirrlees, menggunakan pendekatan neoklasik untuk merancang struktur pajak yang dapat mengurangi distorsi perilaku tanpa kehilangan terlalu banyak pendapatan negara. Prinsip *equity-efficiency trade-off* menjadi acuan utama dalam

menetapkan tarif pajak progresif yang tidak menghambat kerja, tabungan, atau investasi secara signifikan.

Dalam pengelolaan sumber daya, teori neoklasik diterapkan dalam pasar izin emisi karbon. Pendekatan ini menggunakan prinsip ekonomi pasar untuk menginternalisasi eksternalitas negatif. Uni Eropa, misalnya, menerapkan EU Emissions Trading System (ETS) yang memungkinkan pelaku usaha membeli dan menjual izin emisi, sehingga insentif pasar mendorong pengurangan polusi secara efisien (Tietenberg & Lewis, 2016).

Namun, berbagai kebijakan ini tidak luput dari kritik atas keterbatasan asumsi rasionalitas sempurna dan pasar kompetitif. Karena itu, penerapan prinsip neoklasik di era modern sering disandingkan dengan intervensi negara secara terukur dan data empiris untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan inklusif.

# **BAB 7.**

## **EKONOMI KEYNESIAN DAN REVOLUSI MAKROEKONOMI**



**B**ab ini membahas titik balik dalam sejarah pemikiran ekonomi yang dipicu oleh krisis besar dan kegagalan pasar bebas dalam mengatasi pengangguran dan stagnasi. Melalui karya monumental *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), John Maynard Keynes memperkenalkan paradigma baru yang menekankan pentingnya permintaan agregat, intervensi pemerintah, dan kebijakan fiskal aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemikiran Keynesian mengubah arah kebijakan ekonomi global, mendorong negara untuk berperan aktif dalam mengelola siklus bisnis dan mencegah krisis. Bab ini juga menelusuri evolusi Keynesianisme dari versi klasik ke pendekatan Keynesian Baru yang menggabungkan mikroekonomi dan ekspektasi rasional. Kritik dari aliran moneteris dan teori ekspektasi adaptif turut memperkaya perdebatan tentang efektivitas intervensi negara. Di tengah krisis ekonomi global, Keynesianisme kembali relevan sebagai kerangka kebijakan yang menekankan stabilisasi, keberlanjutan, dan inklusi sosial. Bab ini menyajikan analisis mendalam tentang teori, kebijakan, dan implementasi Keynesianisme di berbagai negara, serta dampaknya terhadap arsitektur makroekonomi kontemporer.

### **7.1. John Maynard Keynes dan Teori Permintaan Agregat**

Pemikiran John Maynard Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936)

menjadi tonggak revolusi dalam ekonomi makro yang menggugat asumsi dasar ekonomi neoklasik, terutama keyakinan bahwa pasar akan secara otomatis mencapai keseimbangan melalui mekanisme harga. Keynes mengajukan argumen bahwa permintaan agregat—gabungan dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto—adalah penentu utama tingkat output dan lapangan kerja dalam suatu perekonomian.

Menurut Keynes, dalam kondisi resesi atau depresi, sektor swasta tidak selalu mampu menciptakan permintaan efektif yang cukup untuk mencapai tingkat produksi penuh (*full employment*). Karena konsumsi masyarakat terbatas oleh pendapatan dan kecenderungan menabung meningkat saat krisis, maka sektor investasi menjadi penentu krusial dalam menjaga kestabilan permintaan agregat. Namun, investasi bersifat tidak stabil karena sangat dipengaruhi oleh animal spirits—yakni ekspektasi, kepercayaan, dan psikologi pelaku ekonomi (Keynes, 1936).

Dampak dari fluktuasi permintaan agregat bisa menghasilkan pengangguran yang persisten karena upah nominal bersifat kaku ke bawah (*sticky wages*) dan penyesuaian harga tidak selalu cukup cepat untuk memulihkan keseimbangan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, Keynes menekankan perlunya peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal ekspansif—misalnya peningkatan belanja negara atau pemotongan pajak—untuk mendorong permintaan total dan mengangkat perekonomian keluar dari jebakan resesi.

Model ini menggantikan paradigma klasik dan memberikan landasan teoritis bagi intervensi pemerintah dalam perekonomian, terutama melalui stimulus fiskal dan belanja publik. Pandangan Keynes memperkenalkan pendekatan jangka pendek terhadap ekonomi makro dan menjadikan isu pengangguran sebagai fokus utama, bukan hanya efisiensi alokasi seperti dalam teori neoklasik.

Keynesianisme mendefinisikan ulang cara kita memahami krisis ekonomi dan membuka jalan bagi kebijakan stabilisasi makroekonomi pasca-Perang Dunia II. Sampai hari ini, model permintaan agregat Keynes tetap menjadi dasar analisis dalam menghadapi krisis ekonomi seperti resesi global, pandemi, atau ketimpangan dalam siklus bisnis.

## **7.2. Kebijakan Fiskal dan Peran Pemerintah Dalam Ekonomi**

Kebijakan fiskal merupakan alat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara melalui pengaturan anggaran pendapatan dan belanja. Dalam kerangka ini, pemerintah memainkan peran sentral dalam menstabilkan siklus ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui belanja publik dan kebijakan perpajakan yang terarah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Pada saat perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan

pajak guna merangsang permintaan agregat. Konsep ini diperkuat oleh pemikiran Keynes yang menekankan pentingnya campur tangan negara untuk mengisi kekosongan permintaan yang tidak dipenuhi sektor swasta selama krisis (Keynes, 1936). Misalnya, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi secara luas melalui efek multiplier.

Sebaliknya, dalam kondisi inflasi tinggi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif, seperti pengurangan belanja atau peningkatan pajak, guna menekan permintaan agregat dan menjaga kestabilan harga. Dengan demikian, kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat stabilisasi makroekonomi yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi.

Selain fungsi stabilisasi, peran pemerintah juga mencakup fungsi alokasi dan distribusi, di mana pemerintah menggunakan anggaran untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak disediakan secara efisien oleh pasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Di sisi lain, kebijakan pajak progresif dan program bantuan sosial menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial (Stiglitz, 2000).

Efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal pemerintah, efisiensi birokrasi, serta kredibilitas kebijakan jangka menengah. Koordinasi dengan kebijakan moneter juga diperlukan agar tujuan

makroekonomi seperti pertumbuhan, inflasi rendah, dan stabilitas fiskal dapat tercapai secara harmonis.

### **7.3. Dampak Keynesianisme terhadap Ekonomi Global**

Keynesianisme memberikan dampak yang mendalam terhadap ekonomi global sejak diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada 1930-an. Dengan menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai penentu utama output dan lapangan kerja, pemikiran ini merombak paradigma klasik yang mempercayai bahwa pasar akan menyeimbangkan diri sendiri melalui mekanisme harga. Salah satu warisan utama Keynesianisme adalah legitimasi terhadap peran aktif negara dalam perekonomian, terutama melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan siklus bisnis (Keynes, 1936).

Setelah Depresi Besar, banyak negara mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini diperkuat pasca-Perang Dunia II melalui kebijakan *full employment* dan pembentukan negara kesejahteraan di Eropa dan Amerika Serikat. Keynesianisme menjadi landasan utama model *Bretton Woods*, yang membentuk tatanan moneter internasional baru dan mendorong stabilitas serta pertumbuhan global melalui kerjasama internasional dan kontrol modal terbatas (Skidelsky, 2009).

Selama dekade 1950–1960, Keynesianisme mencapai puncak pengaruhnya. Negara-negara maju mengalami pertumbuhan tinggi dan pengangguran

rendah dalam apa yang disebut sebagai *The Golden Age of Capitalism*. Di negara berkembang, pendekatan Keynesian menginspirasi perencanaan pembangunan nasional, investasi publik, dan program industrialisasi berbasis negara. Pendekatan ini juga memicu pembentukan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang mempromosikan stabilitas makroekonomi global melalui kebijakan terkoordinasi.

Namun, krisis stagflasi pada 1970-an—yakni kombinasi inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi—menggoyahkan dominasi Keynesianisme. Banyak ekonom menilai bahwa pendekatan ini gagal menjelaskan gejala tersebut, karena terlalu fokus pada permintaan dan mengabaikan sisi penawaran (*supply side*). Akibatnya, muncul kebangkitan pemikiran *monetarist* dan neoliberalisme yang menekankan stabilitas harga, deregulasi, dan pasar bebas sebagai solusi utama.

Meskipun begitu, Keynesianisme mengalami kebangkitan pasca-krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19, ketika pemerintah di seluruh dunia kembali menggelontorkan stimulus fiskal besar-besaran untuk mencegah kontraksi ekonomi. Respon ini menunjukkan bahwa ketika pasar gagal, negara tetap menjadi aktor vital dalam pemulihan ekonomi—sebuah prinsip yang sangat sejalan dengan ajaran Keynes.

Dengan demikian, dampak Keynesianisme terhadap ekonomi global tidak hanya bersifat historis, tetapi juga kontemporer. Ia membentuk cara kita memahami stabilisasi makroekonomi, peran negara, dan pentingnya

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

#### **7.4. Evolusi Keynesianisme: Dari Keynesian Klasik ke Keynesian Baru**

Evolusi pemikiran Keynesianisme mencerminkan respons intelektual terhadap dinamika ekonomi global dan kritik internal terhadap pendekatan aslinya. Dimulai dari teori Keynes klasik yang diperkenalkan dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (1936), pemikiran ini menekankan bahwa permintaan agregat adalah penentu utama output dan lapangan kerja. Dalam kondisi krisis atau resesi, sektor swasta tidak selalu dapat menciptakan permintaan yang cukup, sehingga intervensi pemerintah melalui belanja fiskal dan kebijakan moneter menjadi penting (Keynes, 1936).

Setelah Perang Dunia II, pemikiran Keynes mengalami institusionalisasi dalam bentuk Keynesianisme klasik, yang disintesis dengan ekonomi neoklasik. Tokoh seperti Paul Samuelson mengembangkan pendekatan *neoclassical synthesis*, yang mempertahankan asumsi rasionalitas dan pasar efisien dalam jangka panjang, tetapi mengakui kegagalan pasar dalam jangka pendek (Samuelson, 1948). Model IS-LM (*Investment-Saving / Liquidity preference-Money supply*) menjadi kerangka utama analisis makroekonomi Keynesian selama beberapa dekade.

Namun, terjadinya krisis stagflasi pada 1970-an (kombinasi inflasi tinggi dan pengangguran) melemahkan

legitimasi Keynesianisme klasik. Model ini dinilai tidak mampu menjelaskan fenomena tersebut karena fokusnya pada permintaan agregat dan pengabaian sisi penawaran. Kritik dari ekonom monetaris seperti Milton Friedman mendorong munculnya pendekatan alternatif yang menekankan ekspektasi adaptif, uang sebagai faktor dominan, dan pasar tenaga kerja yang *fleksibel*.

Sebagai tanggapan terhadap krisis ini, muncul gelombang Keynesian Baru (*New Keynesian Economics*) yang berusaha membangun dasar mikroekonomi yang kuat bagi teori makro Keynesian. Tokoh seperti Gregory Mankiw, David Romer, dan Stanley Fischer menekankan peran "kekakuan harga dan upah" (*price and wage stickiness*) serta ekspektasi rasional untuk menjelaskan mengapa pasar tidak selalu berfungsi secara efisien dalam jangka pendek (Mankiw, 1985). Model DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) dengan friksi nominal digunakan untuk menganalisis kebijakan makro berbasis Keynesianisme dalam kerangka yang konsisten secara matematis.

Sementara itu, muncul pula pendekatan Post-Keynesianisme, yang dikembangkan oleh tokoh seperti Joan Robinson, Hyman Minsky, dan Paul Davidson. Mereka menolak sintesis neoklasik dan menekankan ketidakpastian fundamental, dominasi ekspektasi, serta peran penting sistem keuangan dalam menciptakan ketidakstabilan. Minsky secara khusus menyoroti siklus ketidakstabilan finansial (*financial instability hypothesis*) yang relevan dalam menjelaskan krisis keuangan 2008.

Perbedaan penting antara Keynesian Baru dan Post-Keynesianisme terletak pada:

1. Dasar metodologis: Keynesian Baru berbasis model formal dengan ekspektasi rasional, Post-Keynesian menggunakan pendekatan historis dan institusional.
2. Pandangan terhadap pasar: Keynesian Baru lebih optimistik terhadap efektivitas pasar dengan beberapa friksi, sedangkan Post-Keynesian melihat ekonomi sebagai sistem yang secara inheren tidak stabil.
3. Fokus analitis: Keynesian Baru cenderung mengutamakan kebijakan moneter dan model keseimbangan, Post-Keynesian lebih menekankan pada realitas keuangan dan distribusi.

Evolusi Keynesianisme menunjukkan fleksibilitas teoretis dan keterbukaan terhadap kritik. Di era pasca-krisis global dan pandemi, pendekatan Keynesian kembali menjadi rujukan dalam merancang stimulus fiskal, subsidi sosial, dan kebijakan moneter adaptif. Pemikiran ini terus berkembang untuk merespons tantangan-tantangan seperti ketimpangan, perubahan iklim, dan digitalisasi ekonomi.

### **7.5. Kritik terhadap Keynesianisme: Perspektif Moneter dan Rasionalitas Ekspektasi**

Keynesianisme, meskipun berpengaruh besar dalam kebijakan ekonomi abad ke-20, tidak luput dari kritik tajam, terutama dari dua mazhab ekonomi penting: Moneteris dan ekonom rasional ekspektatif. Kritik ini

terutama diarahkan pada asumsi-asumsi Keynes mengenai ketidakseimbangan jangka pendek, efektivitas kebijakan fiskal, serta ketidakstabilan permintaan agregat.

Dari sudut pandang Monetaris, yang dipelopori oleh Milton Friedman, kelemahan utama Keynesianisme terletak pada pengabaian peran jumlah uang beredar. Dalam *A Monetary History of the United States* (1963), Friedman dan Schwartz menyatakan bahwa Depresi Besar bukan akibat kegagalan pasar, tetapi karena kontraksi jumlah uang yang seharusnya bisa dihindari oleh otoritas moneter. Mereka menekankan bahwa kebijakan moneter jauh lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi (Friedman, 1968). Pandangan ini menjadi dasar bagi munculnya aturan kebijakan moneter yang kaku, seperti *kebijakan suku bunga tetap atau target pertumbuhan uang*.

Monetaris juga mengkritik penggunaan kebijakan fiskal yang dianggap lambat dan rawan “lag waktu” dalam pengambilan keputusan dan implementasi. Efek multiplikatif yang dijanjikan Keynesianisme dinilai tidak selalu terjadi karena perilaku masyarakat bisa berubah terhadap ekspektasi defisit pemerintah. Dalam kerangka ini, terlalu banyak intervensi negara malah dapat memperburuk fluktuasi makroekonomi.

Sementara itu, teori ekspektasi rasional yang dikembangkan oleh Robert Lucas dan koleganya pada 1970-an, memberikan kritik yang lebih fundamental.

Mereka berargumen bahwa pelaku ekonomi tidak hanya bereaksi terhadap kondisi saat ini, tetapi membentuk ekspektasi masa depan secara rasional berdasarkan informasi yang tersedia (Lucas, 1976). Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang dapat diprediksi tidak akan efektif dalam mengubah output riil karena agen ekonomi telah mengantisipasi dampaknya.

Kritik ini memunculkan gagasan “ketidakberlakuan kebijakan sistematis” (*policy ineffectiveness proposition*), yaitu bahwa kebijakan fiskal dan moneter hanya akan berdampak pada variabel nominal (seperti harga) tetapi tidak pada output dan pengangguran jangka panjang. Dalam kondisi ekspektasi rasional, stimulus fiskal dianggap hanya memicu inflasi tanpa menurunkan tingkat pengangguran.

Lucas dan kalangan *New Classical* juga mengkritik model Keynesian karena tidak memiliki dasar mikroekonomi yang kuat dan terlalu mengandalkan hubungan empiris tanpa landasan perilaku agen ekonomi rasional. Kritik ini melahirkan gelombang pemodelan makroekonomi berbasis dasar mikro dengan agen rasional dan keseimbangan dinamis, termasuk model *Real Business Cycle (RBC)*.

Meskipun demikian, banyak ekonom kontemporer berupaya menjembatani perbedaan ini melalui pendekatan Keynesian Baru, yang mempertahankan kerangka ekspektasi rasional tetapi tetap mengakui keberadaan kekakuan harga, informasi tidak sempurna,

dan kegagalan pasar sebagai pembenar intervensi kebijakan dalam jangka pendek.

## **7.6. Keynesianisme dalam Krisis Ekonomi Global**

Prinsip-prinsip Keynesianisme telah memainkan peran penting dalam mengarahkan respons kebijakan terhadap berbagai krisis ekonomi global, mulai dari Depresi Besar 1930-an hingga krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19. Inti ajaran Keynes adalah bahwa dalam situasi ketidakpastian dan melemahnya permintaan agregat, pemerintah harus hadir secara aktif untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal ekspansif dan intervensi makroekonomi terarah (Keynes, 1936).

Saat *Great Depression* melanda dunia pada tahun 1930-an, ekonomi global mengalami deflasi, pengangguran masif, dan penurunan produksi. Kebijakan *laissez-faire* gagal merespons krisis ini. Baru ketika ide-ide Keynes mulai diadopsi—seperti oleh pemerintahan Franklin D. Roosevelt dalam *New Deal*—yang menekankan investasi infrastruktur, subsidi pekerjaan, dan perluasan belanja negara, barulah tanda-tanda pemulihan mulai muncul. Meski belum sepenuhnya berbasis teori Keynesian formal, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya belanja publik untuk menghidupkan kembali permintaan.

Setelah Perang Dunia II, prinsip Keynesian menjadi standar dalam kebijakan ekonomi global dan memengaruhi pembentukan institusi pasca-perang

seperti IMF dan Bank Dunia. Namun, pengujian terbesar terhadap Keynesianisme modern muncul kembali saat krisis keuangan global 2008 menghantam sistem keuangan dunia. Dalam menghadapi keruntuhan sektor perbankan dan resesi mendalam, banyak negara kembali mengadopsi *stimulus fiskal besar-besaran* sesuai semangat Keynesian. Amerika Serikat, misalnya, mengesahkan *American Recovery and Reinvestment Act* senilai hampir \$800 miliar, sementara Tiongkok menggelontorkan stimulus infrastruktur yang masif.

Krisis ini juga memicu perdebatan tentang peran regulasi dan pentingnya kebijakan kontra-siklus. Joseph Stiglitz dan Paul Krugman, dua ekonom kontemporer beraliran Keynesian, menekankan bahwa deregulasi dan kepercayaan berlebihan pada pasar telah menyebabkan ketidakstabilan sistemik, dan menyerukan kembalinya peran negara yang aktif dalam memitigasi risiko makroekonomi dan krisis keuangan.

Ketika pandemi COVID-19 melanda pada 2020, prinsip Keynesian kembali menjadi pijakan utama kebijakan global. Penurunan aktivitas ekonomi akibat lockdown memicu kontraksi hebat di berbagai sektor. Negara-negara maju dan berkembang merespons dengan kebijakan fiskal luar biasa, termasuk bantuan langsung tunai, subsidi upah, penangguhan pajak, dan investasi layanan kesehatan. Di AS, stimulus mencapai lebih dari \$5 triliun dalam berbagai paket dari CARES Act hingga ARP. Pandemi juga mendorong kolaborasi kebijakan fiskal dan

moneter, yang merupakan ciri khas pendekatan Keynesian modern.

Respons global terhadap pandemi menandai kebangkitan Keynesianisme sebagai kerangka kerja utama dalam menangani krisis eksistensial. Ini juga memunculkan gagasan tentang *green recovery* dan investasi jangka panjang yang tidak hanya menstabilkan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi struktural—sejalan dengan pemikiran Keynes bahwa masa depan ekonomi ditentukan oleh pilihan kebijakan hari ini.

### **7.7. Implementasi Keynesianisme di Berbagai Negara**

Penerapan Keynesianisme di berbagai negara telah menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada konteks ekonomi, kapasitas fiskal, dan respons kebijakan yang diterapkan. Prinsip utama dari pendekatan Keynesian adalah bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga permintaan agregat, terutama melalui kebijakan fiskal, guna menciptakan stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Keynes, 1936).

Salah satu contoh klasik penerapan Keynesianisme terjadi di Amerika Serikat pada masa Presiden Franklin D. Roosevelt melalui program *New Deal* selama era Depresi Besar. Program ini mencakup ekspansi belanja publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja, yang terbukti membantu menurunkan tingkat

pengangguran dan memulihkan pertumbuhan meski bertahap. Menurut Skidelsky (2009), kebijakan ini menjadi tonggak awal legitimasi Keynesianisme dalam praktik pemerintahan modern.

Contoh lainnya dapat dilihat pada negara-negara Skandinavia, seperti Swedia dan Denmark, yang secara konsisten menggabungkan kebijakan fiskal aktif dengan sistem negara kesejahteraan. Esping-Andersen (1990) mencatat bahwa model ini berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi relatif stabil dengan tingkat ketimpangan yang rendah, meskipun menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan fiskal saat populasi menua dan beban pensiun meningkat.

Selama krisis keuangan global 2008, banyak negara—termasuk Tiongkok—menerapkan stimulus fiskal masif sebagai strategi Keynesian. Pemerintah Tiongkok menggelontorkan paket stimulus sekitar 4 triliun yuan untuk investasi infrastruktur dan subsidi konsumsi, yang menurut Zhang dan Barnett (2014), berhasil menahan perlambatan ekonomi signifikan.

Di Indonesia, kebijakan fiskal ala Keynesian mulai tampak sejak krisis keuangan Asia 1997–1998, dan lebih menonjol saat pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial, subsidi upah, serta insentif fiskal bagi UMKM dan dunia usaha. Menurut Basri (2020), kebijakan ini efektif mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam, meskipun ruang fiskal Indonesia menjadi lebih sempit pasca pandemi dan menuntut strategi konsolidasi anggaran yang hati-hati.

Implementasi Keynesianisme terbukti efektif dalam menanggulangi resesi dan mendorong pemulihan ekonomi. Tantangannya terletak pada keterbatasan fiskal, efektivitas birokrasi, dan risiko pembengkakan utang. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan kebijakan Keynesian sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan kemampuan pemerintah dalam merancang stimulus yang tepat sasaran serta berkelanjutan.

Tabel 7.1. Ekonomi Keynesian dan Revolusi Makroekonomi

| Subtopik  | Konsep Utama  | Tokoh/<br>Terapan                                  | Implikasi<br>Kebijakan                                       |
|---|---|--|--|
| 7.1. John Maynard Keynes dan Teori Permintaan Agregat | Ekonomi ditentukan oleh total permintaan; pengangguran bisa bertahan dalam jangka panjang | John M. Keynes ( <i>The General Theory</i> , 1936) | Pemerintah harus mendorong permintaan melalui belanja publik |
| 7.2. Kebijakan Fiskal dan Peran Pemerintah            | Belanja dan pajak sebagai alat stabilisasi ekonomi  | Keynesian klasik                                   | Defisit fiskal diperbolehkan untuk mendorong pertumbuhan     |
| 7.3. Dampak Keynesianisme terhadap Ekonomi Global     | Keynesianisme menjadi dasar kebijakan pasca-  | Bretton Woods, Marshall Plan                       | Intervensi negara dalam pembangunan                          |

| Subtopik  | Konsep Utama   | Tokoh/<br>Terapan                         | Implikasi<br>Kebijakan  |
|---|--|---|---|
|   | Depresi dan Perang Dunia II  |   | dan stabilisasi ekonomi                                       |
| 7.4. Evolusi Keynesianisme: Dari Klasik ke Keynesian Baru | Integrasi mikroekonomi dan ekspektasi rasional   | Paul Samuelson, Robert Solow, Greg Mankiw | Model IS-LM, DSGE, dan kebijakan berbasis forward-looking     |
| 7.5. Kritik terhadap Keynesianisme                        | Monetarisme: fokus pada uang; Ekspektasi rasional: kebijakan tidak efektif jika diprediksi | Milton Friedman, Robert Lucas             | Penekanan pada kebijakan moneter dan aturan kebijakan         |
| 7.6. Keynesianisme dalam Krisis Ekonomi Global            | Keynesianisme kembali digunakan dalam krisis 2008 dan pandemi                              | Stimulus fiskal AS, Eropa, dan Asia       | Belanja pemerintah sebagai respons terhadap kontraksi ekonomi |
| 7.7. Implementasi di Berbagai Negara                      | Variasi penerapan tergantung konteks politik dan fiskal                                    | AS, Inggris, Skandinavia, Indonesia       | Keynesianisme adaptif: stimulus, subsidi, dan proteksi sosial |

# **BAB 8. MAZHAB MONETARIS DAN KRITIK TERHADAP KEYNESIANISME**



**B**ab ini mengulas kemunculan mazhab monetaris sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan Keynesian dalam mengatasi inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dipelopori oleh Milton Friedman, monetarisme menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar sebagai kunci utama dalam mengelola inflasi dan siklus ekonomi. Dengan menyoroti peran bank sentral sebagai aktor utama dalam kebijakan moneter, bab ini membahas bagaimana pendekatan monetaris menggantikan dominasi fiskal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perdebatan antara Keynesianisme dan Monetarisme menjadi titik sentral dalam teori dan praktik ekonomi modern, terutama dalam konteks krisis dan pemulihan. Bab ini juga mengkaji dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas makroekonomi, serta kritik terhadap relevansi monetarisme di era ekonomi digital yang ditandai oleh inovasi teknologi dan sistem keuangan terdesentralisasi. Melalui studi implementasi di berbagai negara dan analisis evolusi pemikiran dalam krisis global, bab ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dua mazhab besar ini saling bersaing dan berkonvergensi dalam membentuk arsitektur kebijakan ekonomi kontemporer.

### **8.1. Milton Friedman Dan Teori Kuantitas Uang**

Mazhab Monetaris muncul sebagai reaksi terhadap kelemahan Keynesianisme dalam menjelaskan fenomena stagflasi pada 1970-an. Tokoh sentral dari mazhab ini

adalah Milton Friedman, ekonom asal Amerika Serikat yang secara tajam mengkritik dominasi kebijakan fiskal dan menekankan pentingnya kebijakan moneter dan peran uang dalam perekonomian.

Friedman mengembangkan kembali Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory of Money*) dalam kerangka yang diperbarui. Berbeda dengan formulasi klasik Irving Fisher yang bersifat identitas matematis ( $MV = PY$ ), Friedman menekankan bahwa jumlah uang beredar ( $M$ ) adalah faktor utama yang menentukan tingkat pendapatan nominal ( $PY$ ) dalam jangka panjang, dan bahwa perubahan dalam uang beredar menyebabkan perubahan langsung pada inflasi, bukan output riil (Friedman, 1968). Ia menegaskan bahwa "inflasi selalu dan di mana pun merupakan fenomena moneter".

Friedman menggantikan pendekatan Keynesian jangka pendek dengan kerangka jangka panjang berbasis ekspektasi adaptif. Dalam pandangannya, kebijakan moneter aktif untuk menurunkan pengangguran lebih rendah dari tingkat alami (*natural rate of unemployment*) hanya akan menyebabkan inflasi yang terus meningkat. Ia memperkenalkan konsep tingkat pengangguran alami dan kurva Phillips vertikal jangka panjang, menantang gagasan bahwa ada trade-off permanen antara inflasi dan pengangguran.

Bagi Friedman, otoritas moneter harus menghindari intervensi jangka pendek yang berlebihan, karena dampak kebijakan moneter terjadi dengan jeda waktu yang tidak dapat diprediksi (*long and variable*

*lags*). Oleh karena itu, ia mengusulkan "aturan pertumbuhan uang tetap"—jumlah uang beredar sebaiknya ditambah secara konstan sesuai laju pertumbuhan output potensial, alih-alih disesuaikan berdasarkan kondisi siklikal.

Teori kuantitas uang versi Friedman menjadi dasar bagi kebijakan moneteris di berbagai bank sentral, terutama pada era Paul Volcker di *Federal Reserve* yang memerangi inflasi tinggi lewat pengetatan jumlah uang beredar. Pendekatannya juga berpengaruh terhadap model-model makroekonomi modern yang mengintegrasikan ekspektasi ke dalam analisis kebijakan moneter.

## **8.2. Peran Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi**

Bank sentral memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, yaitu tingkat kenaikan harga umum barang dan jasa dari waktu ke waktu. Stabilitas harga merupakan salah satu tujuan utama kebijakan moneter, karena inflasi yang tidak terkendali dapat menggerus daya beli, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan menghambat pertumbuhan jangka panjang (Mishkin, 2016).

Untuk mengendalikan inflasi, bank sentral menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter, terutama pengaturan suku bunga acuan (*policy rate*). Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat menekan permintaan agregat melalui jalur konsumsi dan

investasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi saat inflasi terlalu rendah atau terjadi deflasi. Selain itu, bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka, yaitu membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar.

Banyak bank sentral modern—termasuk Bank Indonesia, *Federal Reserve* (AS), dan *European Central Bank*—menerapkan kerangka kerja *inflation targeting*, yakni menargetkan tingkat inflasi tertentu sebagai acuan kebijakan. Dengan menyampaikan sasaran inflasi secara transparan, bank sentral berusaha membentuk ekspektasi inflasi publik agar tetap stabil, yang menjadi kunci dalam mengarahkan perilaku harga dan upah di sektor riil (Bernanke et al., 1999).

Dalam situasi krisis atau tekanan eksternal, bank sentral juga dapat menggunakan instrumen yang tidak konvensional seperti pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*), yaitu pembelian aset berskala besar untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan dan mendorong kredit. Namun, kebijakan semacam ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko inflasi yang berlebihan di kemudian hari.

Tantangan bank sentral dalam mengendalikan inflasi semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Volatilitas harga komoditas global, arus modal spekulatif, dan perubahan teknologi mempercepat transmisi harga ke dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan kredibilitas institusi, koordinasi lintas

kebijakan (misalnya fiskal dan perdagangan), serta komunikasi publik yang efektif agar kebijakan moneter tetap dipercaya dan berdampak optimal.

### **8.3. Perdebatan Antara Keynesianisme Dan Monetarisme**

Perdebatan antara Keynesianisme dan Monetarisme menjadi salah satu pertarungan intelektual paling berpengaruh dalam sejarah ekonomi modern. Masing-masing mazhab menyajikan pandangan yang kontras mengenai penyebab fluktuasi ekonomi, efektivitas kebijakan pemerintah, serta peran uang dan permintaan agregat dalam menjaga stabilitas ekonomi.

#### **1. Perbedaan Filosofis Utama**

Keynesianisme, yang berakar pada pemikiran John Maynard Keynes (1936), berpendapat bahwa fluktuasi ekonomi disebabkan oleh perubahan permintaan agregat, yang bisa melemah akibat pesimisme pelaku usaha dan ketidakpastian. Oleh karena itu, intervensi aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal—belanja publik dan pajak—dianggap esensial untuk menstabilkan output dan lapangan kerja.

Sebaliknya, Monetaris, yang dipelopori oleh Milton Friedman, menolak peran dominan kebijakan fiskal. Friedman meyakini bahwa penyebab utama siklus ekonomi adalah gangguan jumlah uang beredar, dan bahwa inflasi sepenuhnya adalah fenomena

moneter. Ia lebih mengutamakan kebijakan moneter terprediksi dan jangka panjang, dibanding stimulus jangka pendek yang dianggap bisa kontraproduktif (Friedman, 1968).

## 2. Kebijakan Fiskal vs. Moneter

Keynesian mendukung stimulus fiskal untuk melawan resesi, dengan asumsi bahwa pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat secara langsung. Dalam kerangka IS-LM, peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak dapat menggeser kurva IS ke kanan, meningkatkan output dan lapangan kerja.

Monetaris, sebaliknya, memandang kebijakan fiskal sebagai alat yang lambat dan penuh ketidakpastian (*time lags*). Mereka menekankan peran kebijakan moneter seperti pengendalian pertumbuhan uang beredar dan pengaturan suku bunga sebagai sarana utama untuk menjaga stabilitas harga.

## 3. Ekspektasi dan Efektivitas Kebijakan

Perdebatan ini juga menyentuh isu ekspektasi rasional. Keynesian awal mengabaikan ekspektasi, sedangkan Monetaris dan kemudian ekonom rasional ekspektatif menilai bahwa pelaku ekonomi akan menyesuaikan perilaku berdasarkan prediksi kebijakan, sehingga kebijakan sistematis menjadi tidak efektif dalam jangka panjang (Lucas, 1976).

Sebagai respons, muncullah pendekatan Keynesian Baru yang menggabungkan ekspektasi rasional dengan kekakuan harga dan upah untuk menjelaskan mengapa kebijakan makro tetap bisa efektif dalam jangka pendek.

#### 4. Dampak Praktis

Perdebatan ini berdampak nyata pada arah kebijakan ekonomi global. Pada 1950–60-an, Keynesianisme mendominasi, tetapi stagnasi ekonomi dan inflasi tinggi (stagflasi) di tahun 1970-an menandai pergeseran menuju Monetarisme, seperti kebijakan Paul Volcker di AS yang menekankan pengetatan moneter untuk menurunkan inflasi.

Pasca-krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19, Keynesianisme kembali memperoleh tempat karena banyak negara mengandalkan stimulus fiskal besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi.

Meskipun bertolak belakang dalam banyak hal, keduanya telah berkontribusi besar dalam memahami dinamika makroekonomi. Saat ini, banyak kebijakan ekonomi memadukan unsur Keynesian dan Monetaris secara pragmatis, menyesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi.

### **8.4. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi**

Kebijakan moneter adalah instrumen utama yang digunakan bank sentral untuk mencapai *stabilitas*

*ekonomi makro*, terutama dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil—tanpa inflasi tinggi, resesi berkepanjangan, atau gejolak nilai tukar—sehingga pelaku usaha dan masyarakat memiliki kepercayaan untuk berinvestasi dan memproduksi.

### 1. Pengendalian Inflasi

Bank sentral mengontrol inflasi dengan menyesuaikan suku bunga acuan dan jumlah uang beredar. Ketika inflasi naik melebihi target, bank sentral biasanya akan:

- a. Menaikkan suku bunga, yang membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan mendorong masyarakat untuk menabung.
- b. Mengurangi likuiditas, misalnya melalui operasi pasar terbuka.

Dengan cara ini, permintaan agregat akan melambat, tekanan inflasi menurun, dan harga cenderung stabil (Mishkin, 2016). Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

### 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sebaliknya, saat terjadi perlambatan ekonomi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan:

- a. Menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi.
- b. Meningkatkan jumlah uang beredar, agar likuiditas mencukupi bagi dunia usaha dan masyarakat.

Langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan agregat, memperkuat aktivitas produksi, serta menurunkan pengangguran. Namun, kebijakan ini harus dilakukan hati-hati agar tidak memicu inflasi baru.

### 3. Stabilisasi Siklus Ekonomi

Kebijakan moneter juga digunakan untuk menstabilkan fluktuasi siklus bisnis. Ketika perekonomian mengalami overheating (tumbuh terlalu cepat dan mendorong inflasi), kebijakan moneter dapat memperlambat laju ekonomi secara terukur. Sebaliknya, saat terjadi resesi, bank sentral memberikan dorongan agar ekonomi kembali ke jalur potensialnya.

### 4. Membangun Kredibilitas dan Ekspektasi

Bank sentral yang kredibel mampu membentuk ekspektasi inflasi yang stabil, yang sangat penting karena persepsi pelaku ekonomi dapat memengaruhi perilaku harga, upah, dan konsumsi. Pendekatan seperti *inflation targeting*, yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan banyak bank sentral lainnya, berfungsi untuk menjaga kepercayaan publik pada stabilitas nilai uang.

## **8.5. Kritik terhadap Monetarisme dalam Konteks Ekonomi Digital**

Dalam era ekonomi digital, teori Monetarisme menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya bisa dijawab dengan kerangka tradisionalnya. Mazhab monetaris, yang menekankan peran jumlah uang beredar (M) dalam menentukan inflasi dan aktivitas ekonomi, semakin dipertanyakan efektivitasnya di tengah transformasi digital yang mengubah sifat uang, sistem pembayaran, dan transmisi kebijakan moneter itu sendiri.

### **1. Perubahan Fungsi dan Definisi Uang**

Dalam konteks digital, definisi “uang beredar” menjadi semakin kabur. Munculnya dompet digital, stablecoin, aset kripto, dan mata uang digital bank sentral (CBDC) menantang konsep tradisional M1 dan M2 sebagai indikator utama. Jika masyarakat menggunakan aset digital yang tidak dicakup dalam statistik moneter konvensional, hubungan antara jumlah uang dan inflasi menjadi lebih lemah, seperti diakui oleh beberapa studi pasca-2008 (Carney, 2020).

### **2. Tantangan Transmisi Kebijakan Moneter**

Salah satu asumsi monetarisme adalah bahwa perubahan jumlah uang atau suku bunga akan secara efektif memengaruhi konsumsi dan investasi. Namun, dalam ekonomi digital dengan pembiayaan peer-to-peer (P2P), fintech lending, dan platform non-bank yang beroperasi lintas negara, saluran transmisi

kebijakan menjadi lebih kompleks dan tidak sepenuhnya terkendali oleh bank sentral (Zhang & Liu, 2021).

### 3. Ketidakefisienan Target Uang Beredar

Bank sentral modern cenderung meninggalkan pendekatan target pertumbuhan uang tetap ala monetaris karena velositas uang semakin tidak stabil di era digital. Permintaan uang sangat fluktuatif tergantung pada inovasi teknologi dan preferensi konsumen terhadap instrumen pembayaran. Oleh karena itu, fokus kini lebih pada target inflasi dan ekspektasi pasar daripada pengendalian kuantitas uang secara langsung.

### 4. Munculnya Mata Uang Digital

Aset seperti Bitcoin dan stablecoin memperkenalkan bentuk uang yang tidak dikendalikan oleh otoritas moneter dan tidak tunduk pada kebijakan moneter tradisional. Meskipun belum menggantikan uang fiat, keberadaannya menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana kebijakan moneter dapat bekerja jika sebagian besar transaksi tidak lagi bergantung pada sistem perbankan konvensional? CBDC menjadi upaya bank sentral untuk merebut kembali kontrol tersebut, tetapi juga menciptakan dilema desain antara efisiensi digital dan stabilitas moneter.

## 5. Kritik terhadap Relevansi Monetarisme

Krisis global dan pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa pelanggaran moneter besar-besaran tidak selalu memicu inflasi, bertolak belakang dengan prediksi monetaris klasik. Sebaliknya, faktor permintaan riil, rantai pasok, dan sentimen publik menjadi lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan linier antara uang beredar dan inflasi menjadi lemah di era digital dan pasca-krisis.

### 8.6. Implementasi Monetarisme di Berbagai Negara

Penerapan kebijakan monetaris di berbagai negara memberikan hasil yang beragam tergantung konteks ekonomi, kelembagaan, dan kredibilitas bank sentral. Di Amerika Serikat, Paul Volcker sebagai Ketua *Federal Reserve* menerapkan pendekatan monetaris secara ketat pada 1979–1982 untuk mengendalikan inflasi tinggi. Milton Friedman (1968) menjadi rujukan utama dengan teorinya bahwa pengendalian jumlah uang beredar adalah kunci untuk menekan inflasi. Hasilnya, inflasi berhasil ditekan secara signifikan, namun diikuti dengan resesi berat dan pengangguran tinggi, menandakan adanya trade-off antara stabilitas harga dan pertumbuhan dalam jangka pendek (Mishkin, 2016).

Inggris, di bawah pemerintahan Margaret Thatcher, mengadopsi kebijakan monetaris yang keras pada 1980-an. Pendekatan ini difokuskan pada pengurangan inflasi melalui kontrol moneter yang ketat dan suku bunga

tinggi, sejalan dengan argumen Friedman (1960) mengenai pentingnya mengatur laju pertumbuhan uang. Vickers dan Yarrow (1988) mencatat bahwa meskipun inflasi menurun drastis, kebijakan tersebut juga memicu deindustrialisasi dan pengangguran struktural, terutama di kawasan industri utara Inggris, menggarisbawahi biaya sosial dari stabilisasi harga secara agresif.

Studi kasus di Chile pada periode 1975–1982 memperlihatkan kebijakan moneteris yang ekstrem dengan deregulasi sektor keuangan dan pembukaan ekonomi. Seperti dicatat oleh Edwards (1995), meskipun tingkat inflasi turun dari 500% menjadi di bawah 10%, negara tersebut mengalami krisis perbankan besar pada 1982 akibat lemahnya regulasi sistem keuangan dan nilai tukar yang *overvalued*. Ini menunjukkan bahwa penerapan moneterisme tanpa kehati-hatian terhadap sektor keuangan dapat memunculkan instabilitas makroekonomi yang berbahaya.

Di Jepang, pasca krisis gelembung aset tahun 1990-an, Bank of Japan mencoba menanggulangi stagnasi ekonomi melalui pelonggaran moneter ekstrem, termasuk suku bunga nol dan quantitative easing. Namun, seperti dicatat oleh Ito dan Mishkin (2006), meskipun stabilitas harga tercapai, ekonomi Jepang tetap mengalami stagnasi panjang karena permintaan domestik yang lemah dan ekspektasi inflasi yang terlalu rendah. Kasus ini memperlihatkan keterbatasan moneterisme dalam kondisi deflasi, di mana likuiditas

tinggi tidak serta merta memicu pertumbuhan tanpa dukungan permintaan agregat.

Di Indonesia, selama krisis Asia 1997–1998, Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara tajam guna menahan depresiasi rupiah dan menekan inflasi. Menurut Nasution (2000), pendekatan moneteris ini hanya efektif sebagian karena lemahnya sistem keuangan dan krisis kepercayaan. Inflasi sempat melonjak hingga 77% pada 1998, sementara perekonomian berkontraksi tajam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis sistemik, kebijakan moneteris memerlukan dukungan stabilisasi fiskal dan reformasi struktural agar lebih efektif.

### **8.7. Evolusi Pemikiran Moneteris dan Keynesianisme dalam Krisis Global**

Pemikiran Moneteris dan Keynesianisme mengalami evolusi penting dalam merespons krisis ekonomi global, terutama pada krisis keuangan 2008 dan pandemi COVID-19. Kedua mazhab ini—yang sebelumnya berada di kutub yang berbeda dalam kebijakan makroekonomi—menunjukkan tingkat adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi ketika dihadapkan pada tantangan ekonomi yang luar biasa besar.

Pada krisis keuangan 2008, pendekatan moneteris tradisional yang menekankan pengendalian inflasi dan jumlah uang beredar dianggap tidak memadai. Bank sentral di negara maju, seperti *Federal Reserve* dan *European Central Bank*, menerapkan kebijakan moneter tidak konvensional, termasuk *quantitative easing* (QE)

dan suku bunga mendekati nol. Meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan monetaris klasik ala Milton Friedman (1968), kebijakan ini tetap mempertahankan fokus pada stabilitas moneter, namun dengan alat dan cakupan baru. Bernanke (2010) menegaskan bahwa fleksibilitas kebijakan moneter sangat penting ketika transmisi tradisional melalui suku bunga tidak lagi efektif.

Sementara itu, krisis tersebut juga menandai kebangkitan kembali Keynesianisme, terutama dalam bentuk stimulus fiskal besar-besaran. Keynesian modern seperti Paul Krugman dan Joseph Stiglitz mengadvokasi peningkatan belanja publik dan intervensi negara untuk memulihkan permintaan agregat. Pemerintah AS, misalnya, meluncurkan *American Recovery and Reinvestment Act* bernilai hampir \$800 miliar untuk mendorong konsumsi dan investasi. Pendekatan ini sejalan dengan logika Keynes (1936) bahwa dalam kondisi permintaan lemah, hanya negara yang mampu bertindak sebagai “pengganti” sektor swasta.

Pandemi COVID-19 memperluas evolusi ini lebih jauh. Untuk pertama kalinya, kebijakan moneter dan fiskal bergerak serentak dalam skala global, dengan jumlah stimulus melebihi respons terhadap krisis 2008. Bank sentral seperti *Federal Reserve* dan Bank Indonesia tidak hanya menurunkan suku bunga, tetapi juga membeli aset dalam skala besar dan mendukung kredit sektor usaha kecil. Bersamaan, pemerintah meluncurkan bantuan tunai, subsidi upah, dan program perlindungan

sosial yang masif. Blanchard dan Pisani-Ferry (2020) menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk Keynesianisme baru yang disesuaikan dengan lanskap kebijakan modern.

Selain itu, muncul pergeseran dalam pemikiran monetaris. Beberapa ekonom monetaris mulai mengakui bahwa penargetan inflasi saja tidak cukup, dan ekspektasi inflasi menjadi jauh lebih penting dalam kondisi suku bunga rendah. Model berbasis *forward guidance* dan fleksibilitas kerangka kerja seperti average inflation targeting menunjukkan bahwa mazhab monetaris juga telah berevolusi untuk mempertimbangkan konteks krisis kontemporer (Woodford, 2003). Secara keseluruhan, baik Monetarisme maupun Keynesianisme telah menunjukkan adaptabilitas dalam menghadapi krisis global.

Tabel 8.1. Mazhab Monetaris dan Kritik terhadap Keynesianisme

| Periode    | Peristiwa/Pemikiran Utama   | Tokoh Kunci     | Kritik terhadap Keynesianisme                       | Implikasi Kebijakan                             |
|------------|---|-----------------|---|---|
| 1940–1950s | Awal kritik terhadap intervensi fiskal dan ketergantungan pada belanja pemerintah | Friedrich Hayek | Menolak peran aktif negara dalam ekonomi            | Dorongan menuju pasar bebas dan deregulasi      |
| 1956–1963  | Pengembangan Teori Kuantitas Uang dan fungsi konsumsi jangka panjang              | Milton Friedman | Menolak efektivitas kebijakan fiskal jangka panjang | Fokus pada pengendalian inflasi melalui moneter |

| Periode    | Peristiwa/Pemikiran Utama  | Tokoh Kunci              | Kritik terhadap Keynesianisme                                     | Implikasi Kebijakan                                   |
|------------|--|--------------------------|---|---|
| 1967       | Friedman menyampaikan <i>Natural Rate of Unemployment</i> dan <i>Expectations-Augmented Phillips Curve</i> | Milton Friedman          | Keynesianisme gagal menjelaskan stagflasi                         | Peran ekspektasi dalam kebijakan moneter              |
| 1970s      | Krisis stagflasi global: inflasi tinggi dan pengangguran meningkat   | Friedman, Phelps         | Keynesianisme tidak mampu mengatasi inflasi dan stagnasi simultan | Dominasi kebijakan moneter dan deregulasi             |
| 1980s      | Monetarisme menjadi arus utama di AS dan Inggris (Reaganomics, Thatcherism)                                | Friedman, Volcker        | Keynesian dianggap boros dan tidak efisien                        | Pengetatan moneter, independensi bank sentral         |
| 1990s      | Munculnya kritik terhadap rigiditas monetarisme dalam ekonomi global                                       | Joseph Stiglitz, Krugman | Monetarisme terlalu simplistik dalam konteks globalisasi          | Kebutuhan pendekatan campuran dan fleksibel           |
| 2008–2010s | Krisis keuangan global memunculkan kembali Keynesianisme dalam stimulus fiskal                             | Bernanke, Krugman        | Monetarisme tidak cukup dalam menghadapi krisis sistemik          | Kombinasi stimulus fiskal dan pelonggaran kuantitatif |
| 2020s      | Tantangan ekonomi digital dan inflasi pasca-pandemi  | Gopinath, Stiglitz       | Kritik terhadap monetarisme dalam konteks digital dan ketimpangan | Reformasi kebijakan moneter dan fiskal adaptif        |

# BAB 9. EKONOMI INSTITUSIONAL DAN PERAN KEBIJAKAN



**B**ab ini mengkaji pendekatan ekonomi institusional yang menempatkan institusi—baik formal maupun informal—sebagai elemen kunci dalam membentuk perilaku ekonomi dan menentukan arah pembangunan. Berangkat dari kritik Thorstein Veblen terhadap asumsi rasionalitas dalam ekonomi neoklasik, pendekatan ini berkembang melalui pemikiran Douglass North yang menekankan peran institusi dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi transaksi. Bab ini membahas bagaimana regulasi, norma sosial, dan kebijakan publik berinteraksi dalam membentuk struktur ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Evolusi dari institusionalisme klasik ke institusionalisme baru menunjukkan integrasi antara analisis historis, politik, dan ekonomi dalam memahami dinamika pertumbuhan. Selain itu, bab ini mengulas hubungan antara kualitas institusi dan kinerja ekonomi, serta kritik terhadap pendekatan institusional yang dianggap terlalu normatif atau sulit dioperasionalisasikan. Melalui studi implementasi dalam kebijakan publik, bab ini menawarkan perspektif interdisipliner tentang bagaimana institusi dapat menjadi instrumen strategis dalam merancang sistem ekonomi yang inklusif, responsif, dan berbasis tata kelola yang baik.

### **9.1. Thorstein Veblen dan Kritik Terhadap Ekonomi Neoklasik**

Dalam ekonomi institusional, Thorstein Veblen merupakan tokoh perintis yang menawarkan kritik tajam terhadap pendekatan ekonomi neoklasik. Dalam karya terkenalnya *The Theory of the Leisure Class* (1899), Veblen mempertanyakan asumsi dasar neoklasik yang menganggap manusia sebagai agen rasional dan egois (*homo economicus*) yang selalu berupaya memaksimalkan utilitas. Bagi Veblen, model ini terlalu sempit dan mengabaikan pengaruh institusi sosial, budaya, dan kebiasaan historis terhadap perilaku ekonomi.

Veblen berargumen bahwa perilaku manusia tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh kalkulasi untung-rugi, melainkan juga oleh dorongan sosial untuk memperoleh status dan pengakuan. Konsepnya tentang *conspicuous consumption* menjelaskan bagaimana masyarakat kelas atas mengkonsumsi barang-barang mahal bukan karena kebutuhan fungsional, tetapi untuk menunjukkan kekayaan dan menaikkan posisi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekonomi seringkali bersifat simbolik dan budaya, bukan sekadar efisiensi atau harga.

Lebih jauh, Veblen mengkritik ketidakmampuan ekonomi neoklasik dalam memahami proses evolusi ekonomi. Ia menolak pandangan bahwa perekonomian dapat dianalisis seperti ilmu fisika dengan hukum-hukum tetap dan universal. Sebaliknya, ia memandang ekonomi sebagai sistem yang berkembang secara historis melalui interaksi antara institusi, teknologi, dan nilai-nilai sosial.

Inilah yang kemudian menjadi fondasi pendekatan evolusioner dalam ekonomi institusional.

Kritik Veblen juga menyorot institusi-institusi kapitalistik, khususnya dominasi kelas pengusaha dan pemilik modal yang menurutnya cenderung menghambat inovasi demi mempertahankan kepentingan kekuasaan. Ia memperkenalkan dikotomi antara *business* (aktivitas spekulatif demi keuntungan pribadi) dan *industry* (aktivitas produksi yang produktif), dan menunjukkan bagaimana kepentingan korporasi sering bertentangan dengan kemajuan sosial dan kesejahteraan kolektif (Veblen, 1904).

Dengan demikian, kontribusi Veblen tidak hanya memperluas cakupan analisis ekonomi ke ranah sosial dan budaya, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya ekonomi institusional Amerika, yang dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh seperti John R. Commons dan Clarence Ayres. Kritikannya terhadap neoklasikisme mendorong ekonomi untuk tidak terjebak dalam abstraksi matematis semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis dan struktur kekuasaan dalam kehidupan ekonomi.

## **9.2. Douglass North dan Teori Institusi Ekonomi**

Dalam kajian ekonomi institusional modern, Douglass C. North adalah tokoh kunci yang merevolusi pemahaman tentang peran institusi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui karyanya *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (1990), North menyatakan bahwa institusi—baik formal seperti hukum dan regulasi, maupun informal seperti norma

sosial dan budaya—merupakan penentu utama kinerja ekonomi suatu negara.

North mendefinisikan institusi sebagai “*the rules of the game in a society*”, yaitu seperangkat batasan yang diciptakan manusia untuk membentuk interaksi antar individu (North, 1990). Menurutnya, pasar tidak dapat berfungsi secara efisien tanpa adanya struktur institusional yang menjamin hak kepemilikan, menegakkan kontrak, dan meminimalisir biaya transaksi. Tanpa institusi yang kredibel, biaya bertransaksi dan berinvestasi menjadi tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat.

Ia juga menekankan pentingnya evolusi institusional, yaitu bagaimana institusi berubah secara bertahap melalui interaksi antara ide, kekuasaan politik, dan dorongan ekonomi. North menolak pandangan neoklasik yang menyederhanakan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari akumulasi modal dan teknologi semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya berkelanjutan jika didukung oleh institusi yang adaptif dan mendorong inovasi. Contoh kasus seperti perkembangan ekonomi Inggris pada era Revolusi Industri atau stagnasi ekonomi di negara-negara berkembang dijelaskan melalui perbedaan kualitas institusi, bukan sekadar modal atau sumber daya.

North juga memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan *path dependence* atau ketergantungan historis dalam pembentukan institusi. Institusi cenderung bertahan meskipun tidak efisien karena dipengaruhi oleh kepentingan elite, sistem politik, dan

struktur kekuasaan masa lalu. Oleh karena itu, reformasi ekonomi tidak cukup dengan deregulasi atau privatisasi teknokratik, melainkan harus disertai dengan reformasi kelembagaan yang mendalam.

Pemikiran Douglass North menjadi fondasi ekonomi institusional baru (*New Institutional Economics*), yang menggabungkan analisis kelembagaan dengan pendekatan rasionalitas terbatas dan teori biaya transaksi. Ia mendorong pemikiran ekonomi yang lebih realistis dan kontekstual—di mana keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pasar bebas, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, stabilitas hukum, dan kapasitas adaptasi sosial.

### **9.3. Peran Regulasi dan Kebijakan Ekonomi**

Dalam pendekatan ekonomi institusional, regulasi dan kebijakan ekonomi dipandang sebagai instrumen krusial dalam membentuk insentif, menurunkan biaya transaksi, dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pasar dan institusi non-pasar berfungsi secara efisien. Regulasi bukan sekadar campur tangan negara, tetapi cerminan dari *institusi formal* yang mengatur perilaku ekonomi demi mencapai tujuan publik seperti stabilitas, keadilan, dan pertumbuhan berkelanjutan (North, 1990).

Regulasi ekonomi meliputi berbagai aspek, mulai dari perlindungan hak kepemilikan, penegakan kontrak, pengawasan pasar keuangan, hingga kebijakan lingkungan dan sosial. Dalam teori institusional, keberadaan regulasi yang baik membantu mengatasi

kegagalan pasar seperti eksternalitas, asimetri informasi, dan monopoli. Misalnya, regulasi anti-trust mencegah penguasaan pasar yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil (Williamson, 1985).

Kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, juga berperan sebagai alat adaptasi institusi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Rodrik (2007) menekankan bahwa kebijakan yang efektif tidak bersifat universal, melainkan harus *kontekstual dan responsif terhadap struktur institusional dan sosial masyarakat setempat*. Negara yang berhasil umumnya mampu menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengarahkan transformasi struktural, meningkatkan kapasitas produktif, dan mendorong inovasi—bukan hanya sekadar menjaga kestabilan makroekonomi.

Selain itu, dalam pandangan institusional, regulasi dan kebijakan harus dirancang untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas *negara*. Institusi yang korup, tidak transparan, atau tidak akuntabel sering kali menciptakan distorsi yang justru memperburuk kinerja ekonomi. Oleh karena itu, kualitas tata kelola publik menjadi penentu keberhasilan implementasi regulasi dan kebijakan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi-studi oleh Acemoglu dan Robinson (2012) terkait pentingnya institusi inklusif.

Dengan demikian, peran regulasi dan kebijakan ekonomi dalam pendekatan institusional tidak hanya dilihat sebagai alat teknis, *tetapi* sebagai bagian integral dari kerangka kelembagaan yang memungkinkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

#### 9.4. Evolusi Ekonomi Institusional: Dari Veblen ke Institusionalisme Baru

Pemikiran ekonomi institusional telah mengalami evolusi signifikan sejak awal abad ke-20, berangkat dari pendekatan kritis Thorstein Veblen terhadap ekonomi neoklasik, hingga berkembang menjadi pendekatan sistematis dalam Institusionalisme Baru (*New Institutional Economics*). Evolusi ini mencerminkan upaya untuk memahami ekonomi tidak hanya sebagai sistem mekanistik berbasis individu rasional, tetapi sebagai hasil interaksi antara struktur sosial, politik, hukum, dan budaya.

Tokoh awal seperti Thorstein Veblen (1899, 1904) memelopori institusionalisme klasik dengan menolak asumsi *homo economicus* dan menyatakan bahwa perilaku ekonomi dibentuk oleh norma sosial dan kebiasaan historis. Ia mengenalkan konsep seperti *leisure class* dan *conspicuous consumption*, serta menekankan pentingnya evolusi budaya dalam menjelaskan perubahan ekonomi. Bagi Veblen, ekonomi bukan sekadar kalkulasi efisiensi, melainkan arena konflik status, kekuasaan, dan institusi sosial yang berkembang secara historis.

Perkembangan berikutnya dipengaruhi oleh tokoh seperti John R. Commons, yang memperluas fokus ke aspek hukum, kontrak, dan peran negara dalam membentuk institusi ekonomi. Commons menekankan pentingnya *collective action* dan hukum sebagai

instrumen koordinasi ekonomi. Pendekatan ini cenderung normatif dan kontekstual, lebih menekankan pada studi kasus dan deskripsi institusi daripada model formal.

Memasuki akhir abad ke-20, muncul Institusionalisme Baru (*New Institutional Economics/ NIE*) yang mengintegrasikan kerangka neoklasik dengan analisis kelembagaan. Tokoh seperti Douglass North, Oliver Williamson, dan Ronald Coase merevitalisasi analisis institusi dengan fokus pada *biaya transaksi*, *hak kepemilikan*, dan *path dependence*. North (1990) memandang institusi sebagai “*rules of the game*” yang menentukan kinerja ekonomi jangka panjang, sementara Williamson (1985) menekankan bagaimana struktur tata kelola mengatasi masalah oportunistik dan kontrak tidak sempurna.

Institusionalisme Baru lebih formal, sering memanfaatkan teori permainan, ekonomi informasi, dan statistik untuk menjelaskan bagaimana institusi berkembang dan mempengaruhi efisiensi ekonomi. Pendekatan ini juga diaplikasikan dalam studi pembangunan ekonomi, tata kelola, serta reformasi kebijakan publik, seperti dijelaskan dalam karya Acemoglu dan Robinson (2012) tentang pentingnya institusi inklusif.

Dengan demikian, evolusi ekonomi institusional mencerminkan pergeseran dari analisis kultural dan historis menuju pendekatan yang lebih teoritis, kuantitatif, dan kompatibel dengan arus utama ilmu

ekonomi. Meski beragam dalam metodologi, benang merahnya tetap: ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks institusional yang mendasarinya.

### **9.5. Hubungan antara Institusi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam ekonomi institusional, institusi memainkan peran mendasar dalam menentukan arah dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Institusi ekonomi—baik formal (seperti hukum, sistem kepemilikan, dan regulasi) maupun informal (seperti norma budaya, etika kerja, dan kepercayaan)—membentuk kerangka aturan dan insentif yang memandu perilaku pelaku ekonomi. Tanpa institusi yang efektif, interaksi ekonomi rawan diliputi oleh ketidakpastian, biaya transaksi tinggi, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi (North, 1990).

Salah satu peran penting institusi adalah menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan. Institusi hukum yang kuat dan independen memungkinkan kontrak ditegakkan, investasi terlindungi, serta inovasi dihargai. Acemoglu dan Robinson (2012) menegaskan bahwa negara-negara dengan institusi inklusif cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena insentif terhadap produktivitas tersebar luas dan akses terhadap peluang ekonomi lebih terbuka.

Di samping aspek hukum, budaya dan norma sosial juga memiliki peran penting. Sebagai contoh, etos kerja, sikap terhadap kewirausahaan, serta tingkat kepercayaan

sosial dapat memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi kebutuhan regulasi formal. Fukuyama (1995) menekankan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi (*high trust society*) cenderung lebih efisien dalam bertransaksi, karena mereka mengandalkan reputasi dan kepercayaan sebagai modal sosial yang menggantikan prosedur formal yang mahal.

Selain itu, kebijakan ekonomi yang efektif sangat bergantung pada keselarasan dengan institusi yang ada. Rodrik (2007) menunjukkan bahwa resep kebijakan yang sama bisa berhasil di satu negara namun gagal di negara lain karena perbedaan institusional. Oleh karena itu, pertumbuhan yang berkelanjutan menuntut kebijakan ekonomi yang sensitif terhadap struktur sosial dan kelembagaan lokal—bukan hanya mengikuti model teoretis universal.

Kesimpulannya, institusi adalah fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Mereka membentuk aturan main yang menentukan insentif, memengaruhi distribusi sumber daya, dan menciptakan kepercayaan sosial yang menopang interaksi ekonomi. Maka, reformasi institusional bukan sekadar agenda hukum dan birokrasi, melainkan langkah strategis dalam membangun ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan.

## **9.6. Kritik terhadap Ekonomi Institusional**

Pendekatan ekonomi institusional, meskipun menawarkan perspektif kaya tentang peran institusi

dalam ekonomi, tidak luput dari kritik, terutama dari kalangan ekonomi neoklasik dan pendekatan berbasis pasar. Kritik-kritik ini menyasar baik dari sisi metodologi maupun efektivitasnya dalam menjelaskan dan memprediksi fenomena ekonomi.

Dari perspektif neoklasik, ekonomi institusional dianggap terlalu deskriptif dan kurang rigor secara teoritis dan matematis. Banyak ekonom neoklasik berpendapat bahwa penjelasan institusional cenderung kualitatif dan sulit diuji secara empiris, sehingga dinilai tidak memenuhi standar ilmiah arus utama. Kritikus seperti Becker (1993) menyatakan bahwa perilaku ekonomi dapat dijelaskan melalui model utilitas dan pilihan rasional tanpa harus bergantung pada norma dan budaya yang sulit diukur. Hal ini memunculkan kesenjangan metodologis antara analisis berbasis model formal dan pendekatan institusional yang cenderung historis dan kontekstual.

Selain itu, pendekatan berbasis pasar liberal sering menganggap bahwa fokus institusional terhadap *intervensi kelembagaan* dapat mengarah pada justifikasi terhadap keterlibatan negara yang berlebihan. Friedman (1980) mengkritik bahwa terlalu banyak perhatian pada desain institusi bisa mengabaikan keunggulan pasar dalam menciptakan insentif dan efisiensi melalui mekanisme harga. Dalam pandangan ini, reformasi ekonomi sebaiknya diarahkan pada deregulasi dan liberalisasi pasar alih-alih mengutamakan reformasi kelembagaan yang bersifat politis dan lambat.

Kritik lainnya datang dari ketidakkonsistenan pengukuran institusi. Banyak indikator institusi, seperti indeks kualitas tata kelola atau indeks persepsi korupsi, bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh bias nilai atau persepsi pelaku pasar. Hal ini membuat analisis empiris berbasis institusi rentan terhadap kesimpulan yang ambigu atau tergantung konteks (Arndt & Oman, 2006). Di sisi lain, hubungan sebab-akibat antara institusi dan pertumbuhan ekonomi sering kali sulit ditentukan: apakah institusi yang baik mendorong pertumbuhan, ataukah pertumbuhan ekonomi memungkinkan terciptanya institusi yang baik?

Selain dari luar, kritik internal dalam ekonomi institusional sendiri menyuarakan bahwa pendekatan ini terlalu beragam dan tidak memiliki kerangka analitis tunggal. Hodgson (2004) menyoroti bahwa kebingungan antara institusionalisme lama dan baru menciptakan fragmentasi teori yang menyulitkan sintesis dan pengembangan yang koheren. Sebagian pemikir institusional klasik juga menilai bahwa pendekatan baru terlalu terserap oleh asumsi neoklasik seperti rasionalitas terbatas, sehingga kehilangan semangat kritis awal terhadap kapitalisme dan kekuasaan ekonomi.

### **9.7. Implementasi Ekonomi Institusional dalam Kebijakan Publik**

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi institusional dalam kebijakan publik mencerminkan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan dan efektivitas pasar sangat

ditentukan oleh kualitas institusi yang menopang perekonomian. Kebijakan publik berbasis institusional menekankan pentingnya regulasi yang kredibel, penegakan hukum yang konsisten, serta norma sosial yang mendukung kooperasi dan kepercayaan dalam masyarakat ekonomi.

Salah satu studi kasus penting adalah reformasi pertanahan di Rwanda pasca konflik etnis 1994. Melalui pembentukan sistem hak kepemilikan tanah formal yang transparan dan terdaftar, pemerintah berhasil memperkuat perlindungan hukum terhadap aset masyarakat. Ali dan Deininger (2015) mencatat bahwa program ini meningkatkan investasi pertanian, mengurangi konflik sosial, dan mendorong produktivitas—mewujudkan efek kelembagaan positif terhadap pembangunan ekonomi melalui kepastian hukum.

Contoh lain datang dari Program *Conditional Cash Transfer* (CCT) di Meksiko, yakni *Progresa* (kemudian *Oportunidades*). Program ini menggunakan pendekatan kelembagaan yang mengaitkan bantuan tunai dengan partisipasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut Levy (2006), keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi, tetapi juga pada desain institusional yang memperkuat koordinasi antarlembaga, transparansi distribusi, dan perubahan norma sosial terhadap pendidikan anak perempuan.

Di bidang regulasi pasar, pendekatan institusional sangat penting dalam pembentukan otoritas independen.

Sebagai contoh, Komisi Persaingan Usaha di Korea Selatan dibentuk untuk menegakkan kebijakan anti-monopoli dan menjaga struktur pasar yang kompetitif. Menurut Ahn (2002), keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada jaminan independensi politik, kejelasan mandat hukum, dan integritas sistem hukum yang mengawasi pasar—semua komponen kunci institusional dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Dalam konteks negara berkembang, Indonesia menunjukkan praktik ekonomi institusional dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Program ini mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran pembangunan lokal. Menurut Guggenheim (2006), keberhasilan PNPM tidak hanya berasal dari dukungan anggaran, tetapi juga dari pembentukan *institusi lokal yang inklusif* yang memperkuat akuntabilitas, kepercayaan sosial, dan kapasitas kolektif.

Studi-studi ini memperlihatkan bahwa implementasi ekonomi institusional dalam kebijakan publik tidak hanya menyangkut perubahan aturan formal, tetapi juga *pembentukan insentif, kepercayaan, dan norma* yang menopang keberlanjutan kebijakan. Desain kebijakan yang memperhatikan dimensi kelembagaan memungkinkan intervensi negara yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga adaptif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 9.1. Ekonomi Institusional dan Peran Kebijakan

| Aspek                         | Penjelasan  | Tokoh Utama                | Implikasi Kebijakan   |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| Konsep Institusi Ekonomi      | Aturan formal dan informal yang membentuk perilaku ekonomi                    | Douglass North             | Reformasi kelembagaan, penguatan hak milik, efisiensi transaksi |
| Kritik terhadap Neoklasik     | Mengabaikan konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam analisis ekonomi        | Thorstein Veblen           | Pendekatan interdisipliner dalam perumusan kebijakan ekonomi    |
| Biaya Transaksi dan Efisiensi | Institusi memengaruhi efisiensi melalui pengurangan biaya transaksi           | Ronald Coase               | Desain regulasi yang meminimalkan friksi pasar                  |
| Tata Kelola Kolektif          | Pengelolaan sumber daya bersama secara berkelanjutan dan partisipatif         | Elinor Ostrom              | Kebijakan berbasis komunitas, penguatan kelembagaan lokal       |
| Peran Regulasi Negara         | Negara sebagai fasilitator dan penjaga stabilitas institusional               | North, Ostrom, Acemoglu    | Desain kebijakan publik berbasis insentif dan tata kelola       |
| Evolusi Institusionalisme     | Dari institusionalisme lama ke institusionalisme baru                         | Veblen, North, Williamson  | Integrasi analisis kelembagaan dalam pembangunan ekonomi        |
| Institusi dan Pertumbuhan     | Kualitas institusi menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang | Acemoglu & Robinson (2012) | Reformasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan      |

# **BAB 10.**

## **EKONOMI PERILAKU DAN EKSPEKTASI RASIONAL**



**B**ab ini mengkaji pergeseran paradigma dalam ilmu ekonomi yang mengintegrasikan psikologi, neurologi, dan ilmu perilaku untuk memahami pengambilan keputusan ekonomi secara lebih realistis. Berbeda dari asumsi rasionalitas sempurna dalam teori neoklasik, ekonomi perilaku menunjukkan bahwa individu sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan keterbatasan informasi. Melalui karya Daniel Kahneman dan teori prospeknya, bab ini menjelaskan bagaimana persepsi risiko dan kerugian membentuk preferensi ekonomi yang tidak selalu konsisten dengan logika pasar. Ekspektasi rasional, meskipun dominan dalam model makroekonomi, juga dikritik karena mengabaikan kompleksitas psikologis dalam proses pengambilan keputusan. Bab ini membahas kontribusi neuroekonomi dalam mengungkap hubungan antara aktivitas otak dan perilaku ekonomi, serta teori *nudge* yang menawarkan pendekatan kebijakan berbasis dorongan perilaku. Dengan menyoroti kritik terhadap ekspektasi rasional dan implikasi kebijakan dari pendekatan perilaku, bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi modern semakin bergeser ke arah yang lebih empiris, manusiawi, dan kontekstual.

### **10.1. Konsep Psikologi dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi**

Subbagian 10.1 membahas bagaimana konsep-konsep dari psikologi, terutama kognitif dan sosial, digunakan untuk memahami pengambilan keputusan ekonomi yang sering kali tidak rasional atau tidak optimal, berbeda dari asumsi-asumsi utama dalam teori ekonomi neoklasik.

Dalam teori klasik, pelaku ekonomi diasumsikan sebagai agen rasional yang selalu membuat keputusan optimal berdasarkan informasi lengkap dan stabilitas preferensi. Namun, ekonomi perilaku (*behavioral economics*) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, manusia sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan keterbatasan informasi, yang mengarah pada keputusan yang tidak selalu logis secara ekonomi (Kahneman & Tversky, 1979).

Beberapa konsep psikologi yang krusial dalam konteks ini antara lain:

1. Keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*): Herbert Simon (1955) menegaskan bahwa individu tidak selalu mencari solusi terbaik (optimal), tetapi lebih sering puas dengan solusi yang “cukup baik” (*satisficing*) karena keterbatasan kapasitas kognitif dan waktu.
2. Heuristik dan bias: Kahneman dan Tversky menemukan bahwa orang sering menggunakan aturan sederhana (heuristik) dalam pengambilan keputusan, seperti *availability bias* (menilai

probabilitas berdasarkan kemudahan mengingat peristiwa serupa) dan *anchoring effect* (terpaku pada informasi awal saat membuat keputusan).

3. *Loss aversion*: Dalam teori prospek (*prospect theory*), individu lebih merasakan kerugian daripada keuntungan dalam besaran yang sama. Ini menjelaskan mengapa orang cenderung menghindari risiko dalam situasi untung, tetapi cenderung mencari risiko dalam situasi rugi.
4. *Framing effect*: Pilihan ekonomi dapat berubah hanya karena perbedaan cara penyajian informasi, meskipun nilai ekonominya sama. Ini menunjukkan bahwa konteks dan persepsi sangat memengaruhi keputusan ekonomi.
5. Pengaruh sosial dan norma: Keputusan ekonomi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan atau dianggap benar oleh orang lain, misalnya dalam konsumsi, menabung, atau perilaku keuangan kelompok.

Dengan memasukkan elemen-elemen psikologis ini, ekonomi perilaku memberikan pendekatan yang lebih realistis dalam memahami perilaku konsumen, investor, dan pengambil kebijakan. Pendekatan ini juga memiliki implikasi penting dalam desain kebijakan publik—seperti penggunaan *nudges* untuk mendorong perilaku tertentu tanpa memaksakan pilihan.

## 10.2. Daniel Kahneman dan Teori Prospek

Daniel Kahneman, bersama Amos Tversky, memperkenalkan teori prospek (*prospect theory*) sebagai alternatif terhadap teori utilitas *expected value* dalam menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan di bawah risiko. Teori ini, yang pertama kali diperkenalkan dalam artikel legendaris *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk* (1979), menjadi tonggak dalam ekonomi perilaku karena menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional dalam menilai risiko dan hasil potensial, serta lebih dipengaruhi oleh persepsi kerugian dan cara informasi disajikan (*framing*).

Menurut Kahneman dan Tversky, proses pengambilan keputusan terdiri dari dua tahap: *editing* dan *evaluation*. Dalam tahap *editing*, individu menyederhanakan pilihan dan menetapkan *reference point*, yaitu titik acuan yang menentukan apakah suatu hasil dianggap sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam tahap *evaluation*, nilai dari tiap hasil dipertimbangkan secara subjektif, dengan karakteristik utama sebagai berikut:

1. *Loss aversion* – Kerugian dirasakan lebih berat dibandingkan keuntungan dalam besaran yang sama. Artinya, seseorang cenderung lebih berusaha menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan (Kahneman & Tversky, 1979).

2. *Diminishing sensitivity* – Nilai subjektif dari perubahan berkurang seiring bertambahnya jarak dari titik referensi; misalnya, selisih antara mendapatkan Rp10.000 dan Rp20.000 dirasakan lebih besar daripada antara Rp1 juta dan Rp1,01 juta.
3. *Non-linear probability weighting* – Individu cenderung melebih-lebihkan probabilitas kecil (misalnya takut akan kecelakaan pesawat) dan meremehkan probabilitas tinggi (misalnya abai terhadap risiko sakit karena gaya hidup tidak sehat).

Teori prospek juga menjelaskan berbagai fenomena ekonomi seperti anomali pasar saham, perilaku investor ritel, dan bias konsumen terhadap diskon atau jaminan uang kembali. Salah satu implikasi praktis penting dari teori ini adalah dalam desain *nudges*—intervensi kebijakan yang memengaruhi perilaku ekonomi tanpa menghilangkan kebebasan memilih, sebagaimana dikembangkan lebih lanjut oleh Richard Thaler (Thaler & Sunstein, 2008).

Kahneman menerima Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2002 berkat kontribusinya dalam mengintegrasikan psikologi ke dalam ilmu ekonomi, menjembatani jurang antara teori ekonomi normatif dan kenyataan perilaku manusia.

### **10.3. Ekspektasi Rasional dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Ekonomi**

Dalam teori ekonomi makro modern, ekspektasi rasional menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana individu dan pelaku pasar memprediksi kebijakan ekonomi serta bereaksi terhadapnya. Diperkenalkan oleh John Muth (1961) dan dikembangkan secara luas oleh Robert Lucas (1976), pendekatan ini menyatakan bahwa pelaku ekonomi menggunakan seluruh informasi yang tersedia secara efisien untuk membentuk ekspektasi yang, rata-rata, benar. Artinya, mereka tidak akan secara sistematis membuat kesalahan dalam memprediksi akibat kebijakan ekonomi.

Konsekuensi utama dari asumsi ini adalah bahwa kebijakan ekonomi sistematis yang dapat diprediksi tidak akan efektif dalam memengaruhi output riil dan tingkat pengangguran. Lucas (1976) dalam kritik terkenalanya menegaskan bahwa model ekonomi yang tidak mempertimbangkan perubahan ekspektasi akan menghasilkan evaluasi kebijakan yang bias. Oleh karena itu, ekspektasi menjadi elemen sentral dalam efektivitas kebijakan makroekonomi.

Misalnya, jika bank sentral mengumumkan akan meningkatkan inflasi melalui pelonggaran moneter, dan pelaku ekonomi memercayai kebijakan ini, maka mereka akan segera menyesuaikan harga dan upah. Hal ini dapat menyebabkan inflasi tanpa pertumbuhan riil, karena output tidak naik tetapi harga-harga sudah bereaksi terlebih dahulu terhadap ekspektasi tersebut (Sargent &

Wallace, 1975). Inilah yang kemudian mendukung argumen tentang ketidakberlakuan kebijakan sistematis.

Pendekatan ekspektasi rasional juga menjadi fondasi bagi model *New Classical Economics* dan *Real Business Cycle* (RBC), yang menganggap fluktuasi ekonomi sebagai respons terhadap perubahan nyata (real shocks), bukan akibat permintaan agregat. Dengan demikian, kebijakan makro yang bersifat prediktabel cenderung tidak berdaya, kecuali jika bersifat mengejutkan atau disertai dengan perubahan struktural yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Namun, banyak ekonom Keynesian Baru mengkritik bahwa meskipun ekspektasi rasional adalah asumsi kuat, dunia nyata tetap diwarnai oleh ketidakpastian, informasi tidak sempurna, dan kekakuan harga. Oleh karena itu, mereka menggabungkan ekspektasi rasional dengan friksi pasar seperti *price stickiness* untuk menunjukkan bahwa kebijakan makro tetap bisa efektif dalam jangka pendek.

#### **10.4. Bias Kognitif dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi**

Dalam ekonomi perilaku, bias kognitif merupakan distorsi sistematis dalam cara individu memproses informasi dan membuat keputusan. Bias ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu bertindak rasional seperti yang diasumsikan dalam teori ekonomi neoklasik.

Pengaruh psikologis dan sosial seringkali membentuk cara individu memandang risiko, peluang, dan nilai ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bias kognitif yang paling umum dalam pengambilan keputusan ekonomi:

### 1. **Bias Konfirmasi (*Confirmation Bias*)**

Bias ini terjadi ketika individu lebih cenderung mencari, mempercayai, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinannya yang sudah ada, serta mengabaikan informasi yang bertentangan. Dalam konteks ekonomi, investor sering kali hanya membaca berita atau analisis yang memperkuat strategi investasi mereka, meskipun ada sinyal pasar yang menunjukkan risiko. Hal ini dapat menyebabkan overconfidence dan keputusan finansial yang tidak optimal (Nickerson, 1998).

### 2. **Heuristik Ketersediaan (*Availability Heuristic*)**

Heuristik ini mengacu pada kecenderungan untuk menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan kemudahan mengingat contoh serupa. Misalnya, setelah mendengar berita tentang resesi atau krisis pasar, konsumen mungkin menjadi terlalu pesimis dan mengurangi pengeluaran secara drastis, bahkan jika data ekonomi aktual tidak mendukung kekhawatiran tersebut. Kahneman dan Tversky (1973) menunjukkan bahwa persepsi ekonomi bisa

sangat dipengaruhi oleh informasi yang paling mudah diakses, bukan yang paling relevan.

### **3. Efek Framing (*Framing Effect*)**

Framing effect terjadi ketika cara penyajian informasi memengaruhi keputusan, meskipun nilai ekonomi yang sebenarnya tetap sama. Sebagai contoh, seseorang cenderung lebih memilih produk dengan label “90% bebas lemak” dibandingkan “10% mengandung lemak”, padahal kandungannya sama persis. Dalam kebijakan publik, framing subsidi sebagai “bantuan langsung tunai” versus “kredit pajak” bisa memengaruhi sejauh mana masyarakat menerima dan merespons kebijakan tersebut (Tversky & Kahneman, 1981).

### **4. Efek *Anchoring***

Bias ini muncul ketika individu terlalu terpaku pada informasi awal (anchor) saat membuat keputusan. Misalnya, harga awal suatu barang yang ditampilkan (meskipun hanya sebagai diskon fiktif) dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai wajar barang tersebut. Dalam pasar saham, harga historis saham bisa menjadi patokan yang menyesatkan dalam menilai valuasi sebenarnya (Ariely, 2008).

## 5. *Overconfidence Bias*

Individu sering melebih-lebihkan pengetahuan atau kemampuan mereka dalam membuat keputusan ekonomi. Investor, misalnya, bisa terlalu percaya diri dalam menebak arah pasar atau dalam memilih saham unggulan, yang berujung pada perdagangan berlebihan (*excessive trading*) dan hasil investasi yang justru lebih buruk dari rata-rata pasar.

Pengenalan terhadap bias-bias ini membantu pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan konsumen merancang strategi yang lebih efektif dan realistis. Dalam praktiknya, pendekatan *nudging* (Thaler & Sunstein, 2008) juga memanfaatkan pemahaman terhadap bias ini untuk mendorong keputusan ekonomi yang lebih sehat tanpa memaksa pilihan.

### **10.5. Neuroekonomi: Hubungan antara Otak dan Keputusan Ekonomi**

Neuroekonomi adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu ekonomi, psikologi, dan ilmu saraf untuk memahami bagaimana otak manusia membuat keputusan ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi tradisional yang mengasumsikan rasionalitas penuh, neuroekonomi mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh

aktivitas saraf, emosi, dan sistem reward otak (Glimcher & Fehr, 2014).

Penelitian neuroekonomi menunjukkan bahwa sistem limbik, khususnya struktur seperti amigdala dan nucleus accumbens, memainkan peran penting dalam respons emosional terhadap risiko dan imbal hasil. Nucleus accumbens, yang terkait dengan dopamin, diaktifkan ketika individu mengantisipasi keuntungan—mirip dengan respon terhadap rangsangan menyenangkan seperti makanan atau musik. Inilah dasar biologis dari perilaku konsumsi dan pencarian insentif (Knutson et al., 2001).

Sebaliknya, aktivitas di korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol kognitif dan pertimbangan jangka panjang, dapat menekan impuls emosional dan membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak. Konflik antara bagian otak yang merespons imbalan cepat versus kendali rasional inilah yang sering menciptakan inconsistencies dalam perilaku ekonomi, seperti penundaan menabung atau pembelian impulsif (McClure et al., 2004).

Neuroekonomi juga telah membantu menjelaskan anomali perilaku, seperti mengapa individu lebih takut kehilangan (*loss aversion*) atau mengapa mereka bertindak tidak logis dalam situasi lelang dan investasi. Studi pencitraan otak (*fMRI*) menunjukkan bahwa area otak yang aktif dalam situasi ekonomi kompleks sering

kali tidak sejalan dengan asumsi rasionalitas penuh dalam model utilitas klasik.

Implikasi praktis dari pendekatan ini besar: dari desain kebijakan yang mempertimbangkan reaksi emosional, hingga inovasi dalam pendidikan keuangan dan perancangan insentif. Dengan memahami bagaimana otak memproses pilihan ekonomi, pembuat kebijakan dan perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan etis dalam memengaruhi perilaku publik.

### **10.6. Perilaku Konsumen dan Teori *Nudge***

Teori *nudge*, yang diperkenalkan oleh Richard Thaler dan Cass Sunstein dalam buku *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness* (2008), merupakan pendekatan dalam ekonomi perilaku yang bertujuan membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tanpa paksaan atau larangan eksplisit. Konsep dasar *nudge* adalah bahwa cara pilihan disusun atau disajikan (*choice architecture*) dapat memengaruhi perilaku, bahkan ketika opsi tetap terbuka sepenuhnya.

Dalam konteks perilaku konsumen, *nudge* digunakan untuk mengatasi berbagai bias kognitif seperti *status quo bias*, *loss aversion*, dan *present bias*. Misalnya, banyak orang ingin menabung untuk pensiun, tetapi menunda-nunda pendaftarannya. Dengan membuat program pensiun otomatis (*default enrollment*), perusahaan mendorong partisipasi tanpa menghilangkan kebebasan memilih keluar. Thaler dan Sunstein (2008)

menunjukkan bahwa pengaturan default yang “ramah” secara psikologis bisa meningkatkan keputusan finansial jangka panjang.

Pemerintah juga banyak mengadopsi prinsip *nudge* dalam kebijakan publik. Di Inggris, *Behavioural Insights Team* (“*Nudge Unit*”) menerapkan strategi seperti pengiriman pesan teks pengingat pajak dengan kata-kata personal (“9 dari 10 orang di kota Anda sudah membayar”) untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan serupa digunakan untuk meningkatkan vaksinasi, donasi organ, dan perilaku ramah lingkungan. Efektivitas kebijakan meningkat karena *nudge* bekerja dengan struktur kognitif manusia, bukan menentangnya.

Dalam sektor bisnis, perusahaan ritel dan platform digital memanfaatkan *nudge* untuk mendorong perilaku konsumen, seperti menampilkan “produk terlaris”, memberi batas waktu untuk diskon (*urgency effect*), atau mengatur urutan menu untuk mempromosikan pilihan yang sehat. Ketika diterapkan secara etis dan transparan, *nudge* dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik sejalan dengan tujuan mereka sendiri.

Meski demikian, *nudge* juga menuai kritik. Beberapa pihak mempertanyakan batas antara “mendorong” dan “memanipulasi”, terutama jika arsitektur pilihan dirancang untuk kepentingan institusi, bukan pengguna. Oleh karena itu, Thaler sendiri menekankan prinsip *libertarian paternalism*—intervensi kebijakan harus menjaga kebebasan memilih individu, namun tetap

memberi dorongan lembut ke arah yang lebih bermanfaat.

### **10.7. Kritik terhadap Ekspektasi Rasional dalam Ekonomi Modern**

Teori *nudge*, yang diperkenalkan oleh Richard Thaler dan Cass Sunstein dalam buku *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness* (2008), merupakan pendekatan dalam ekonomi perilaku yang bertujuan membantu individu membuat keputusan yang lebih baik tanpa paksaan atau larangan eksplisit. Konsep dasar *nudge* adalah bahwa cara pilihan disusun atau disajikan (*choice architecture*) dapat memengaruhi perilaku, bahkan ketika opsi tetap terbuka sepenuhnya.

Dalam konteks perilaku konsumen, *nudge* digunakan untuk mengatasi berbagai bias kognitif seperti *status quo bias*, *loss aversion*, dan *present bias*. Misalnya, banyak orang ingin menabung untuk pensiun, tetapi menunda-nunda pendaftarannya. Dengan membuat program pensiun otomatis (*default enrollment*), perusahaan mendorong partisipasi tanpa menghilangkan kebebasan memilih keluar. Thaler dan Sunstein (2008) menunjukkan bahwa pengaturan default yang “ramah” secara psikologis bisa meningkatkan keputusan finansial jangka panjang.

Pemerintah juga banyak mengadopsi prinsip *nudge* dalam kebijakan publik. Di Inggris, *Behavioural Insights Team* (“*Nudge Unit*”) menerapkan strategi seperti pengiriman pesan teks pengingat pajak dengan kata-kata

personal (“9 dari 10 orang di kota Anda sudah membayar”) untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan serupa digunakan untuk meningkatkan vaksinasi, donasi organ, dan perilaku ramah lingkungan. Efektivitas kebijakan meningkat karena *nudge* bekerja dengan struktur kognitif manusia, bukan menentangnya.

Dalam sektor bisnis, perusahaan ritel dan platform digital memanfaatkan *nudge* untuk mendorong perilaku konsumen, seperti menampilkan “produk terlaris”, *memberi* batas waktu untuk diskon (urgency effect), atau mengatur urutan menu untuk mempromosikan pilihan yang sehat. Ketika diterapkan secara etis dan transparan, *nudge* dapat membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik sejalan dengan tujuan mereka sendiri.

Tabel 10.1. Ekonomi Perilaku dan Ekspektasi Rasional

| Aspek                   | Penjelasan   | Tokoh Utama                   | Implikasi Kebijakan  |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| Psikologi dalam Ekonomi | Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh emosi, intuisi, dan bias kognitif | Daniel Kahneman, Amos Tversky | Desain kebijakan yang mempertimbangkan perilaku nyata, bukan asumsi rasional |
| Teori Prospek           | Individu menilai kerugian lebih berat daripada keuntungan yang setara    | Kahneman & Tversky            | Intervensi kebijakan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian              |

| Aspek                        | Penjelasan   | Tokoh Utama          | Implikasi Kebijakan  |
|------------------------------|--|----------------------|--|
| Bias Kognitif                | Heuristik, framing, dan anchoring memengaruhi keputusan ekonomi                  | Kahneman, Thaler     | Edukasi konsumen, transparansi informasi, pengaturan iklan                           |
| Teori <i>Nudge</i>           | Perubahan kecil dalam konteks keputusan dapat mendorong perilaku yang diinginkan | Richard Thaler       | Kebijakan berbasis pilihan default, arsitektur keputusan publik                      |
| Ekspektasi Rasional          | Pelaku ekonomi membentuk ekspektasi berdasarkan informasi dan model ekonomi      | Robert Lucas         | Kebijakan moneter harus konsisten dan kredibel untuk menghindari distorsi ekspektasi |
| Neuroekonomi                 | Studi tentang hubungan antara aktivitas otak dan keputusan ekonomi               | Loewenstein, Camerer | Pengembangan intervensi berbasis neurologi dan respons emosional                     |
| Kritik terhadap Rasionalitas | Asumsi rasionalitas sempurna tidak sesuai dengan perilaku nyata                  | Kahneman, Akerlof    | Perlu pendekatan interdisipliner dalam analisis dan desain kebijakan                 |

# **BAB 11. EKONOMI DIGITAL DAN GLOBALISASI**



**B**ab ini mengkaji pergeseran paradigma dalam ilmu ekonomi yang mengintegrasikan psikologi, neurologi, dan ilmu perilaku untuk memahami pengambilan keputusan ekonomi secara lebih realistis. Berbeda dari asumsi rasionalitas sempurna dalam teori neoklasik, ekonomi perilaku menunjukkan bahwa individu sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, dan keterbatasan informasi. Melalui karya Daniel Kahneman dan teori prospeknya, bab ini menjelaskan bagaimana persepsi risiko dan kerugian membentuk preferensi ekonomi yang tidak selalu konsisten dengan logika pasar. Ekspektasi rasional, meskipun dominan dalam model makroekonomi, juga dikritik karena mengabaikan kompleksitas psikologis dalam proses pengambilan keputusan. Bab ini membahas kontribusi neuroekonomi dalam mengungkap hubungan antara aktivitas otak dan perilaku ekonomi, serta teori *nudge* yang menawarkan pendekatan kebijakan berbasis dorongan perilaku. Dengan menyoroti kritik terhadap ekspektasi rasional dan implikasi kebijakan dari pendekatan perilaku, bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi modern semakin bergeser ke arah yang lebih empiris, manusiawi, dan kontekstual.

### **11.1. Perkembangan Ekonomi Digital Dan Teknologi Finansial**

Teori ekspektasi rasional, meskipun sangat berpengaruh dalam ekonomi makro modern, tidak luput dari kritik tajam, terutama terkait asumsi dasarnya yang

*dianggap* terlalu idealistik. Dalam teori ini, pelaku ekonomi diasumsikan mampu menggunakan semua informasi yang tersedia secara efisien untuk membentuk prediksi yang, secara statistik, tidak bias. Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan signifikan saat diterapkan dalam dunia nyata yang penuh ketidakpastian, informasi asimetris, dan kompleksitas perilaku.

Salah satu kritik utama datang dari ekonomi perilaku, yang menunjukkan bahwa individu kerap dipengaruhi oleh *bias kognitif*, keterbatasan atensi, dan beban komputasional dalam menyerap dan memproses informasi. *Simon* (1978) memperkenalkan konsep *bounded rationality* yang menyatakan bahwa manusia tidak mampu mengoptimalkan keputusan secara sempurna dalam dunia nyata. Ini bertentangan langsung dengan asumsi ekspektasi rasional yang memerlukan kapasitas kalkulasi tinggi dan informasi sempurna.

Kritikus lain menyoroti bahwa ekspektasi rasional mengabaikan dinamika pembelajaran, yaitu proses bagaimana individu dan pasar memperbarui ekspektasi mereka *berdasarkan* pengalaman masa lalu. Dalam kenyataannya, banyak pelaku ekonomi menggunakan *ekspektasi adaptif*, memperbarui proyeksi berdasarkan hasil sebelumnya, bukan kalkulasi statistik optimal. Hal ini membuat model ekspektasi rasional cenderung gagal menjelaskan fenomena seperti gelembung aset atau panic selling yang didorong oleh perilaku massa dan sentimen.

Di sisi kebijakan, asumsi ekspektasi rasional dapat melemahkan legitimasi kebijakan publik, karena menyiratkan bahwa intervensi pemerintah yang dapat diprediksi akan *kehilangan* efektivitasnya. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan seperti stimulus fiskal atau pengumuman suku bunga tetap berdampak pada perilaku konsumsi dan investasi, bahkan ketika telah diumumkan secara terbuka. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi pelaku ekonomi mungkin tidak secepat dan setepat yang diasumsikan oleh teori.

Terakhir, dalam konteks ketidakpastian sistemik—seperti *krisis* finansial global atau pandemi—pelaku ekonomi sering menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, emosional, dan bahkan kontra-produktif. Dalam situasi ekstrem, ketakutan atau ketidakpastian dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. Sejumlah ekonom seperti Stiglitz dan Akerlof menyatakan bahwa ekspektasi sering kali dibentuk oleh narasi sosial dan kepercayaan kolektif yang tidak dapat dimodelkan dalam kerangka ekspektasi rasional.

## **11.2. Dampak Globalisasi Terhadap Sistem Ekonomi Dunia**

Globalisasi telah memberikan dampak besar terhadap sistem ekonomi dunia, menciptakan peluang baru sekaligus *tantangan* yang kompleks. Dalam konteks ekonomi, globalisasi merujuk pada semakin terbukanya pergerakan barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan informasi lintas batas negara, yang diperkuat oleh

kemajuan teknologi, deregulasi pasar, dan integrasi sistem keuangan internasional.

Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi global. *Perusahaan* kini dapat mengakses pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih murah melalui rantai pasok global. Negara-negara berkembang mendapat peluang untuk menarik investasi asing langsung (FDI), mentransfer teknologi, dan meningkatkan ekspor. Menurut laporan World Bank (2020), negara yang terbuka terhadap perdagangan dan investasi internasional cenderung tumbuh lebih cepat dalam jangka panjang.

Namun, globalisasi juga menimbulkan ketimpangan antar dan dalam negara. Sementara sebagian negara *memperoleh* manfaat besar, banyak negara berkembang mengalami ketergantungan pada ekspor komoditas atau penanaman modal asing yang rentan terhadap guncangan eksternal. Di dalam negara maju sekalipun, sektor industri tradisional sering terdisrupsi karena produksi dipindahkan ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih murah, menciptakan tantangan sosial berupa pengangguran struktural dan ketimpangan pendapatan (Stiglitz, 2002).

Dari sisi sistem keuangan, globalisasi telah menciptakan konektivitas yang tinggi antar pasar modal dunia, tetapi juga meningkatkan risiko krisis sistemik. Krisis keuangan Asia (1997) dan krisis subprime AS (2008) *menunjukkan* betapa cepatnya krisis bisa

menyebar melalui jaringan perbankan dan investasi global, memaksa adanya koordinasi kebijakan internasional.

Lebih jauh, globalisasi memicu perlombaan deregulasi, di mana negara berlomba membuat iklim investasi lebih “ramah pasar”, kadang dengan mengorbankan perlindungan sosial, hak buruh, atau keberlanjutan lingkungan. Ini menimbulkan perdebatan tentang perlunya sistem tata kelola global yang lebih adil, seperti yang dibahas oleh Dani Rodrik (2011) dalam gagasannya tentang “trilema globalisasi”: bahwa stabilitas nasional, demokrasi, dan globalisasi ekonomi sulit diwujudkan secara bersamaan.

Dengan demikian, dampak globalisasi terhadap sistem ekonomi dunia bersifat ambivalen: ia mendorong pertumbuhan dan inovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjaga keadilan, kedaulatan, dan stabilitas. Maka, arah kebijakan global ke depan perlu menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap risiko sistemik dan sosial.

### **11.3. Peran Ekonomi Berbasis Data Dalam Kebijakan Ekonomi**

Dalam era digital dan globalisasi, ekonomi berbasis data (data-driven economy) memainkan peran sentral dalam perumusan kebijakan ekonomi modern. Ekonomi jenis ini mengandalkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dalam skala besar untuk memahami perilaku pasar, merespons dinamika ekonomi, serta

merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat, adaptif, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pertama, data besar (*big data*) dan kecerdasan buatan telah memungkinkan pemerintah melakukan analisis real-time terhadap konsumsi, mobilitas masyarakat, perubahan harga, bahkan sentimen publik. Ini sangat penting dalam merespons krisis ekonomi atau bencana, seperti selama pandemi COVID-19 di mana dashboard digital digunakan untuk merancang kebijakan pembatasan mobilitas atau distribusi bansos yang lebih akurat (UNDP, 2021).

Kedua, ekonomi berbasis data meningkatkan efisiensi fiskal dan transparansi. Misalnya, penerapan *e-budgeting*, *e-taxation*, dan sistem pelacakan pengeluaran negara secara daring membantu mengurangi kebocoran anggaran dan memperkuat akuntabilitas publik. Di bidang perpajakan, analitik data dari transaksi elektronik dan integrasi sistem pelaporan usaha daring memungkinkan otoritas pajak memperluas basis pajak secara lebih adil (World Bank, 2020).

Ketiga, dalam konteks pengambilan keputusan moneter, data granular dari transaksi digital, pasar keuangan, dan perilaku konsumsi kini digunakan untuk membangun model prediktif guna memperkirakan inflasi, permintaan agregat, atau potensi ketidakstabilan sistem keuangan. Hal ini memungkinkan kebijakan moneter lebih presisi dan berbasis bukti dibandingkan pendekatan makro konvensional yang bersifat agregat.

Namun, pemanfaatan ekonomi berbasis data juga memunculkan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, bias algoritma, monopoli data oleh segelintir platform digital, dan kesenjangan akses data antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, regulasi seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa menjadi contoh bagaimana perlindungan privasi harus berjalan seiring dengan inovasi data ekonomi (Zuboff, 2019).

Dengan demikian, ekonomi berbasis data membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, namun menuntut tata kelola data yang kuat, inklusif, dan etis agar manfaatnya bisa dirasakan luas tanpa mengorbankan hak-hak individu dan keadilan sosial.

#### **11.4. Transformasi Digital dalam Sektor Ekonomi Tradisional**

Transformasi digital telah mengubah lanskap sektor-sektor ekonomi tradisional secara mendalam, menjembatani kesenjangan antara teknologi dan produksi, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing global. Berikut adalah gambaran bagaimana digitalisasi mengubah sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan:

##### **1. Manufaktur: Dari Produksi Massal ke Industri 4.0**

Sektor manufaktur mengalami revolusi melalui integrasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*,

kecerdasan buatan (AI), robotika, dan *big data*— sering disebut sebagai *Industri 4.0*. Perusahaan kini dapat menerapkan sistem *smart manufacturing*, di mana mesin saling terhubung dan mampu menganalisis data operasional secara real-time. Ini memungkinkan *predictive maintenance*, optimalisasi rantai pasok, dan produksi yang lebih fleksibel. Menurut McKinsey (2018), perusahaan yang menerapkan teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas hingga 30%.

## **2. Pertanian: Menuju Pertanian Presisi (*Precision Agriculture*)**

Di bidang pertanian, teknologi digital memungkinkan munculnya pertanian presisi, di mana petani menggunakan drone, sensor tanah, dan citra satelit untuk memantau kelembaban, hama, dan kebutuhan nutrisi tanaman. Dengan data ini, mereka dapat mengatur jumlah air dan pupuk secara presisi, mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, platform digital pertanian memungkinkan petani mengakses pasar secara langsung dan mendapatkan informasi harga secara real-time, memperkuat posisi tawar petani kecil (World Bank, 2020).

## **3. Perdagangan: *E-Commerce* dan Digitalisasi Rantai Pasok**

Digitalisasi telah merevolusi sektor perdagangan dengan munculnya *e-commerce*, yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk langsung ke konsumen tanpa batas geografis. Teknologi logistik digital, sistem manajemen inventori berbasis cloud, dan pembayaran digital mempermudah transaksi serta pelacakan barang secara transparan. Di banyak negara, UMKM kini dapat menjual produk secara global melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, Alibaba, dan Amazon, memperluas peluang ekspor informal.

#### **4. Tantangan dan Peluang**

Meskipun membawa manfaat besar, transformasi digital juga menuntut penyesuaian SDM, infrastruktur digital, dan literasi teknologi. Perusahaan dan negara yang lambat beradaptasi bisa tertinggal secara kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti pelatihan digital untuk tenaga kerja, insentif adopsi teknologi bagi sektor tradisional, serta pembangunan konektivitas yang merata.

#### **11.5. Peran *Artificial Intelligence* dan *Big Data* dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi**

Dalam era ekonomi digital, *Artificial Intelligence* (AI) dan *big data* analytics memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan ekonomi—baik di sektor publik

maupun swasta. Integrasi kedua teknologi ini telah merevolusi cara pemerintah dan pelaku ekonomi memahami pasar, *merancang* kebijakan, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adaptif.

## 1. Prediksi Pasar dan Perilaku Ekonomi

AI memungkinkan analisis prediktif berdasarkan miliaran titik data historis dan real-time. Dengan algoritma pembelajaran mesin (machine learning), pemerintah dan lembaga keuangan dapat memprediksi inflasi, konsumsi rumah tangga, pergerakan harga komoditas, dan risiko sistemik, jauh lebih cepat dibanding metode konvensional. Contohnya, bank sentral menggunakan AI untuk mengidentifikasi sinyal awal ketidakstabilan pasar atau gelembung aset melalui pola perilaku investor dan data transaksi mikro (Chen et al., 2020).

## 2. Optimalisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter

*Big data* memperkaya kemampuan perancang kebijakan untuk menyesuaikan intervensi berdasarkan karakteristik wilayah, waktu, dan kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, data konsumsi dari platform *e-commerce* dan pembayaran digital memungkinkan pemetaan dampak subsidi atau pajak lebih presisi. Bank Indonesia, misalnya, mulai mengeksplorasi *data alternative* dari transaksi digital sebagai bagian dari alat kebijakan makprudensial.

### 3. Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Publik

AI digunakan untuk mendeteksi inefisiensi pengeluaran negara, kebocoran anggaran, hingga potensi fraud dalam program bantuan sosial. Di sektor logistik publik, AI dapat memetakan distribusi barang dan jasa secara real-time, menghindari penumpukan dan keterlambatan. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan dapat dirancang lebih responsif terhadap dinamika lapangan dan mengurangi biaya administrasi negara.

### 4. Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Risiko

Model-model AI diterapkan untuk membangun *early warning system* dalam menghadapi krisis ekonomi atau keuangan. Sebagai contoh, Bank Dunia dan IMF menggunakan model pembelajaran mesin untuk memantau indikator kerentanan fiskal dan eksternal negara-negara berkembang, sehingga mencegah potensi krisis makro lebih dini (IMF, 2021).

### 5. Tantangan Etika dan Kelembagaan

Meskipun menjanjikan, penerapan AI dan *big data* menghadapi tantangan penting: ketimpangan akses data, bias algoritma, dan perlindungan privasi. Oleh karena itu, lembaga pembuat kebijakan harus membangun kerangka tata kelola data yang transparan, inklusif, dan akuntabel agar teknologi ini benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

## 11.6. Tantangan Regulasi dalam Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital telah mempercepat transformasi ekonomi global, namun juga memunculkan berbagai tantangan regulasi yang kompleks dan lintas sektor. Sifat digital yang tanpa batas geografis, kecepatan inovasi, serta dominasi platform digital raksasa membuat banyak kerangka hukum tradisional menjadi ketinggalan zaman.

### 1. Perlindungan Data dan Privasi

Salah satu tantangan utama adalah perlindungan data pribadi. Dalam ekonomi digital, data pengguna merupakan “aset *ekonomi*” yang dikumpulkan, diproses, dan dimonetisasi oleh perusahaan digital. Banyak negara menghadapi kesenjangan dalam regulasi data: ada yang telah mengadopsi sistem ketat seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa, sementara negara lain belum memiliki kerangka perlindungan data yang memadai. Tantangan ini mencakup isu transparansi pemrosesan data, persetujuan pengguna, dan keamanan siber, serta kepemilikan dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*).

### 2. Pajak Digital dan Basis Pajak Global

Perusahaan digital multinasional sering melakukan manuver pajak dengan beroperasi di yurisdiksi berpajak rendah, meskipun layanan dan konsumennya berada di negara lain. Hal ini membuat

banyak pemerintah menghadapi erosi basis pajak. Untuk merespons, negara-negara G20 dan OECD merancang kebijakan pajak digital global, termasuk Pilar 1 (alokasi laba ke negara pasar) dan Pilar 2 (pajak minimum global 15%). Namun implementasi ini masih menghadapi perbedaan politik, teknis, dan kesiapan administrasi antarnegara (OECD, 2021).

### 3. Kebijakan Persaingan di Era Platform

Platform digital seperti Amazon, Google, dan Meta menjalankan model bisnis berbasis jaringan (*network effect*) yang menciptakan kekuatan pasar yang sangat terkonsentrasi. Praktik seperti pengiklanan eksklusif, diskriminasi algoritma, atau akuisisi pesaing kecil menimbulkan pertanyaan apakah kerangka hukum anti-trust klasik masih memadai. Regulator di AS, UE, dan Asia mulai mengevaluasi kembali prinsip monopoli digital dan misu penggunaan data sebagai senjata persaingan. Kasus Google dan Facebook menjadi preseden penting dalam hal ini.

### 4. Regulasi Inovasi dan Sandbox

Karena cepatnya laju inovasi, regulator menghadapi dilema antara mendukung eksperimen teknologi dan memastikan perlindungan konsumen. Banyak negara mulai mengadopsi *regulatory sandbox*, yaitu ekosistem uji coba terbatas untuk produk digital baru seperti fintech, DeFi, atau blockchain.

Tantangannya terletak pada bagaimana menjaga *level playing field* dan kepastian hukum tanpa membunuh inovasi.

## 5. Koordinasi Antarnegara

Karena sifat digital yang *melintasi* batas negara, regulasi ekonomi digital menuntut koordinasi internasional yang erat. Namun harmonisasi peraturan tentang privasi, pajak, dan persaingan tidak mudah karena perbedaan nilai, sistem hukum, dan kepentingan politik antarnegara.

### 11.7. Ekonomi Digital dan Ketimpangan Sosial

Ekonomi digital memiliki dampak ambivalen terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi. Di satu sisi, ia membuka peluang akses baru, namun di sisi lain berpotensi memperdalam kesenjangan bila tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah analisis menyeluruh dari dua sisi tersebut:

#### 1. Mengurangi Ketimpangan: Peluang Inklusif melalui Teknologi

Ekonomi digital dapat memperluas inklusi sosial dan keuangan, terutama di negara berkembang. Teknologi finansial (*fintech*), *e-commerce*, dan pembelajaran daring memungkinkan kelompok marjinal—seperti masyarakat pedesaan, perempuan, dan UMKM—untuk mengakses pasar, pendidikan, dan layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Menurut World Bank (2021), peningkatan akses ke pembayaran digital dan pinjaman mikro berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan keuangan antarwilayah.

## 2. **Memperburuk Ketimpangan: Kesenjangan Akses dan Keterampilan**

Namun, ekonomi digital juga menciptakan **ketimpangan** digital—akses terhadap infrastruktur internet, perangkat, dan literasi digital yang sangat tidak merata antarwilayah dan kelompok pendapatan. Di negara-negara dengan konektivitas lemah, masyarakat miskin lebih sulit memanfaatkan peluang digital. OECD (2020) menyebut fenomena ini sebagai “*second-level digital divide*”, di mana bukan hanya soal akses, tapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif.

## 3. **Dominasi Platform dan Pola Konsentrasi Ekonomi**

Perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Alibaba, atau Google menciptakan *network effects* yang memperkuat dominasi pasar mereka, menyebabkan konsentrasi kekayaan dan data pada segelintir entitas global. Hal ini berisiko memperbesar kesenjangan antara negara produsen data (pengguna) dan negara penguasa platform (pengolah). Ketimpangan bukan hanya antarindividu, tapi juga antarnegara (UNCTAD, 2021).

#### 4. Efek Terhadap Tenaga Kerja dan Pendapatan

Otomatisasi dan digitalisasi menggantikan pekerjaan rutin dan berupah rendah, terutama di sektor manufaktur dan jasa, meningkatkan risiko pengangguran struktural. Sementara pekerjaan berbasis pengetahuan dan teknologi tinggi meningkat, mereka cenderung tersentralisasi pada pekerja dengan pendidikan tinggi. Tanpa upskilling yang masif, ekonomi digital berisiko memperlebar *income gap* dan ketidaksetaraan mobilitas sosial antar generasi.

#### 5. Respon Kebijakan: Mengubah Risiko jadi Kesempatan

Untuk mengatasi potensi dampak negatif, negara-negara perlu memperkuat literasi digital, perlindungan sosial adaptif, kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel, serta memperluas infrastruktur digital yang inklusif. Transformasi digital hanya akan mengurangi ketimpangan jika didukung oleh kebijakan redistribusi yang proaktif dan regulasi yang adil terhadap ekonomi platform.

Tabel 11.1. Tematik: Ekonomi Digital dan Globalisasi

| Aspek           | Penjelasan         | Tokoh/Referensi Utama   | Implikasi Kebijakan        |
|-----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| Ekonomi Digital | Perubahan struktur | Brynjolfsson, Mazzucato | Regulasi platform digital, |

| Aspek                           | Penjelasan   | Tokoh/Referensi Utama       | Implikasi Kebijakan   |
|---------------------------------|--|-----------------------------|---|
|                                 | ekonomi akibat teknologi digital, AI, dan <i>big data</i>              |                             | perlindungan data, inovasi inklusif                                 |
| Fintech dan Inklusi Keuangan    | Teknologi finansial memperluas akses ke layanan keuangan               | Schumpeter (inovasi), Ghosh | Kebijakan literasi digital, pengawasan sistem pembayaran            |
| Globalisasi Ekonomi             | Integrasi pasar global, perdagangan lintas negara, dan mobilitas modal | Stiglitz, Rodrik            | Reformasi perdagangan, proteksi sektor strategis, diplomasi ekonomi |
| Ekonomi Berbasis Data           | Data sebagai aset ekonomi dan alat pengambilan keputusan               | Mayer-Schönberger, Varian   | Tata kelola data, transparansi algoritma, pajak ekonomi digital     |
| Transformasi Sektor Tradisional | Digitalisasi industri, pertanian, dan jasa                             | Mazzucato, Schwab           | Dukungan transisi teknologi, pelatihan tenaga kerja                 |
| Ketimpangan Digital             | Akses teknologi yang tidak merata memperbesar kesenjangan sosial       | UNCTAD, Piketty             | Investasi infrastruktur digital, subsidi akses teknologi            |
| Tantangan Regulasi              | Regulasi tertinggal dari inovasi; isu monopoli dan privasi             | Zuboff, Stiglitz            | Reformasi hukum digital, penguatan lembaga pengawas                 |

---

| Aspek                        | Penjelasan  | Tokoh/Referensi Utama | Implikasi Kebijakan  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| AI dan Pengambilan Keputusan | AI mengubah cara analisis ekonomi dan perilaku konsumen | Brynjolfsson, Agrawal | Etika AI, audit algoritma, kebijakan adaptif berbasis data |

---

## **BAB 12.**

# **KESIMPULAN DAN PROSPEK MASA DEPAN**



**B**ab ini merangkum perjalanan panjang evolusi pemikiran ekonomi dari era klasik hingga kontemporer, sekaligus membuka ruang refleksi terhadap tantangan dan peluang di masa depan. Di tengah disrupsi digital, krisis global, dan ketegangan geopolitik, ekonomi tidak lagi sekadar soal efisiensi, tetapi juga tentang adaptabilitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Bab ini mengajak pembaca untuk meninjau ulang arah kebijakan ekonomi, mengintegrasikan teknologi secara bijak, serta merumuskan strategi yang tangguh dan inklusif dalam menghadapi dinamika abad ke-21.

### **12.1. Evolusi Pemikiran Ekonomi Dari Klasik Hingga Kontemporer**

Pemikiran ekonomi telah mengalami evolusi panjang dari era klasik hingga kontemporer, menyesuaikan dengan konteks sejarah, tantangan sosial, dan perkembangan teknologi. Dimulai dengan pemikiran klasik yang dipelopori oleh *Adam Smith* dalam *The Wealth of Nations* (1776), ekonomi dipandang sebagai sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme pasar dan prinsip *laissez-faire*. Smith memperkenalkan konsep *invisible hand*, yaitu bahwa tindakan egois individu dalam pasar justru dapat menghasilkan kesejahteraan kolektif secara tidak langsung (Smith, 1776). Pemikiran ini dilanjutkan oleh *David Ricardo* dan *John Stuart Mill*, yang mengembangkan teori nilai kerja dan keunggulan komparatif sebagai fondasi perdagangan internasional.

Memasuki akhir abad ke-19, muncul ekonomi neoklasik dengan tokoh seperti *Alfred Marshall*, yang dalam *Principles of Economics* (1890) memadukan ide klasik dengan pendekatan marginalis. Neoklasik menekankan rasionalitas individu, utilitas marginal, dan keseimbangan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa individu selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau keuntungan, dan bahwa pasar akan mencapai efisiensi alokatif secara otomatis (Marshall, 1890). Teori ini mendominasi pemikiran ekonomi arus utama hingga pertengahan abad ke-20.

Namun, krisis ekonomi global pada 1930-an mengguncang fondasi teori pasar bebas dan melahirkan pendekatan Keynesian, yang dipelopori oleh *John Maynard Keynes*. Dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes menolak anggapan bahwa pasar selalu efisien dan menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengelola permintaan agregat. Keynes berargumen bahwa dalam kondisi resesi, intervensi fiskal seperti peningkatan belanja pemerintah diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan permintaan (Keynes, 1936). Pandangannya mendominasi kebijakan ekonomi hingga 1970-an.

Respon terhadap inflasi tinggi dan stagnasi ekonomi pada dekade 1970-an memunculkan monetarisme dan pendekatan ekspektasi rasional, yang dipelopori oleh *Milton Friedman* dan *Robert Lucas*. Friedman

menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar sebagai alat utama kebijakan makroekonomi (Friedman, 1968), sedangkan Lucas memperkenalkan *Lucas critique*, yang menyatakan bahwa kebijakan yang diharapkan secara rasional akan kehilangan daya pengaruhnya karena pelaku ekonomi akan menyesuaikan perilaku mereka (Lucas, 1976). Pendekatan ini menandai pergeseran kembali ke keyakinan akan efisiensi pasar.

Sejak akhir abad ke-20 hingga kini, muncul berbagai aliran kontemporer seperti ekonomi institusional, ekonomi perilaku, dan ekonomi digital. *Douglass North* menekankan bahwa institusi—formal maupun informal—berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang (North, 1990). Di sisi lain, *Daniel Kahneman* dan *Amos Tversky* mengungkap berbagai bias kognitif yang menjelaskan mengapa individu kerap menyimpang dari perilaku rasional, yang menjadi dasar ekonomi perilaku (Kahneman & Tversky, 1979). Kemudian, muncul pula pendekatan berbasis teknologi seperti *data-driven policy* dan kecerdasan buatan yang makin mewarnai praktik ekonomi modern. Evolusi ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi terus berkembang, semakin interdisipliner, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin kompleks.

## **12.2. Tantangan Ekonomi di Era Modern**

Di era modern, perekonomian global menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan saling terkait, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, ketegangan

geopolitik, serta dinamika sosial dan lingkungan. Berikut adalah uraian lima tantangan utama yang mewarnai ekonomi kontemporer.

Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Meskipun pertumbuhan ekonomi global meningkat dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan turut melebar. Laporan oleh Piketty dan koleganya (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan pertumbuhan dinikmati oleh kelompok atas, sementara kelompok menengah dan bawah stagnan. Hal ini menimbulkan tekanan sosial, menurunkan mobilitas antar kelas, dan memperkuat polarisasi politik.

Disrupsi Teknologi dan Masa Depan Pekerjaan Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh kecerdasan buatan, otomasi, dan *big data* menciptakan efisiensi baru namun juga mengancam sektor pekerjaan konvensional. World Economic Forum (2020) memperkirakan jutaan pekerjaan akan tergeser dalam satu dekade, sementara jenis keterampilan yang dibutuhkan berubah cepat. Negara dan pelaku usaha dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk berinvestasi dalam pelatihan ulang (*reskilling*) dan peningkatan kompetensi digital tenaga kerja.

Krisis Iklim dan Transisi Ekonomi Hijau Perubahan iklim telah menjadi tantangan makroekonomi global. Dampaknya terlihat dalam gangguan pertanian, bencana alam, dan meningkatnya risiko keuangan. OECD (2021) mencatat bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan reformasi struktural dan investasi besar-

besaran dalam energi terbarukan, teknologi bersih, serta regulasi yang konsisten. Negara-negara perlu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan jangka panjang.

Ketidakstabilan Geopolitik dan Fragmentasi Ekonomi Global Ketegangan perdagangan, konflik wilayah, dan ketidakpastian global seperti pandemi atau invasi militer telah menguji ketahanan sistem ekonomi internasional. Hal ini memunculkan kecenderungan de-globalisasi atau *re-shoring* industri strategis. IMF (2022) memperingatkan bahwa fragmentasi global dapat melemahkan perdagangan internasional dan memperlambat pertumbuhan, terutama bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada pasar global.

Tantangan Tata Kelola Ekonomi Digital Era digital membawa peluang sekaligus tantangan serius dalam hal regulasi, perlindungan privasi, dan persaingan yang adil. Dominasi platform teknologi besar menciptakan ketimpangan baru dalam distribusi data dan kekuatan pasar. Pemerintah menghadapi tekanan untuk menciptakan regulasi yang mampu mengikuti laju inovasi tanpa menghambat pertumbuhan digital.

### **12.3. Rekomendasi Kebijakan untuk Menghadapi Perubahan Ekonomi**

Menghadapi dinamika perubahan ekonomi global, diperlukan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis pada realitas sosial, teknologi, serta keberlanjutan lingkungan. *Joseph Stiglitz* (2010) menekankan

pentingnya peran negara dalam menciptakan sistem pasar yang adil dan korektif terhadap kegagalan pasar. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan redistribusi melalui sistem perpajakan progresif dan perlindungan sosial adaptif, termasuk digitalisasi pelayanan publik dan penguatan jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan. Langkah ini dapat membantu menekan ketimpangan dan meningkatkan inklusi ekonomi.

Selanjutnya, revolusi digital dan disrupsi teknologi menuntut kebijakan yang mendorong pengembangan keterampilan baru. *Klaus Schwab* (2016) menggarisbawahi bahwa Revolusi Industri Keempat menciptakan ketidaksesuaian antara pasar kerja dan keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan *reskilling* dan *upskilling* berbasis kebutuhan industri menjadi kunci, melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Investasi pada pendidikan vokasi, teknologi informasi, dan kewirausahaan digital menjadi semakin penting.

Krisis iklim dan kebutuhan transisi menuju ekonomi hijau memerlukan kebijakan yang menginternalisasikan biaya lingkungan. *Nicholas Stern* (2007) menyatakan bahwa dampak ekonomi perubahan iklim dapat diminimalkan melalui tindakan preventif sekarang. Pemerintah dapat menerapkan instrumen fiskal seperti *carbon pricing*, subsidi energi terbarukan, serta insentif pajak untuk bisnis berkelanjutan. Selain itu, penguatan ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya

harus diprioritaskan dalam perencanaan industri dan urbanisasi.

Dalam merespons era data dan digitalisasi, *Shoshana Zuboff* (2019) mengingatkan akan pentingnya pengaturan terhadap kapitalisme pengawasan. Regulasi perlindungan data, etika penggunaan kecerdasan buatan, serta pajak digital terhadap perusahaan platform global perlu dikembangkan agar kemajuan teknologi tidak memperdalam ketimpangan atau mengancam hak privasi. Pemerintah juga harus mendorong tata kelola data nasional yang transparan dan akuntabel, agar dapat digunakan untuk *evidence-based policymaking*.

Akhirnya, perubahan ekonomi yang cepat menuntut fleksibilitas kelembagaan dan kapasitas negara dalam berinovasi. *Dani Rodrik* (2011) menyatakan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang berlaku universal; kebijakan harus kontekstual dan responsif terhadap realitas lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun sistem kelembagaan yang inklusif, mendorong partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, serta memperkuat mekanisme evaluasi agar kebijakan tetap relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

#### **12.4. Integrasi Digitalisasi dalam Kebijakan Ekonomi Masa Depan**

Transformasi digital yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan komputasi awan akan membawa dampak besar terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi masa

depan. Dalam dekade mendatang, proses pengambilan keputusan publik diprediksi akan semakin berbasis data dan responsif terhadap dinamika ekonomi secara real-time.

Pertama, AI dan analitik *big data* memungkinkan pemerintah dan lembaga ekonomi untuk menganalisis pola konsumsi, fluktuasi pasar, dan sentimen publik dengan presisi tinggi. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang lebih tepat sasaran. Seperti dijelaskan oleh *Agrawal, Gans & Goldfarb* (2018), kemampuan AI dalam memproses prediksi—bukan hanya perhitungan—dapat mengubah cara pembuat kebijakan menilai risiko dan menetapkan prioritas.

Kedua, integrasi digital juga memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih cepat, transparan, dan personalisasi. Misalnya, *Gentzkow et al.* (2019) mencatat bahwa dashboard ekonomi berbasis *big data* membantu bank sentral dan kementerian keuangan dalam merespons gejolak pasar secara lebih adaptif daripada hanya mengandalkan data makro tradisional. Selain itu, distribusi bantuan sosial dan insentif ekonomi berbasis platform digital terbukti lebih efisien dan akuntabel, seperti terlihat dalam implementasi digitalisasi bansos selama pandemi di beberapa negara berkembang (World Bank, 2021).

Ketiga, transformasi digital mendorong kemunculan kebijakan ekonomi baru seperti pajak digital, regulasi AI, serta tata kelola data nasional.

Pemerintah harus mengembangkan kapasitas regulasi yang adaptif agar mampu mengikuti laju inovasi teknologi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. *Zuboff* (2019) memperingatkan bahwa jika tidak diatur dengan baik, kapitalisme digital dapat menciptakan ketimpangan informasi yang sangat dalam dan mengurangi kapasitas publik dalam mengendalikan ruang digital.

Keempat, pengambilan keputusan ekonomi ke depan akan bersifat lebih prediktif, terdesentralisasi, dan personalisasi berbasis kecerdasan mesin. Hal ini menuntut reformasi kelembagaan dan kapasitas teknis aparatur negara agar dapat mengelola data, memahami algoritma, dan memastikan keadilan dalam implementasi teknologi. *Mazzucato* (2021) menekankan bahwa negara harus memposisikan diri bukan hanya sebagai regulator pasif, tetapi sebagai pencipta nilai (*value creator*) yang memimpin misi inovasi dan transformasi ekonomi.

Dengan demikian, integrasi digitalisasi dalam kebijakan ekonomi bukan sekadar soal penggunaan teknologi, melainkan tentang mengubah paradigma pemerintahan, relasi negara-pasar, dan arsitektur pengambilan keputusan publik. Ini membuka peluang besar untuk menciptakan kebijakan yang lebih cepat, adil, dan berbasis bukti—selama ditopang oleh tata kelola yang etis dan inklusif.

## 12.5. Adaptasi Kebijakan Ekonomi terhadap Krisis Global

Krisis ekonomi global seperti krisis keuangan 2008, pandemi COVID-19, atau konflik geopolitik telah menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tradisional sering kali tidak cukup cepat dan fleksibel untuk merespons guncangan besar. Oleh karena itu, negara-negara perlu merancang kerangka kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, antisipatif, dan berbasis bukti untuk menghadapi ketidakpastian global.

1. *Carmen Reinhart dan Kenneth Rogoff* (2009) menekankan pentingnya membangun cadangan fiskal dan stabilitas makro di masa normal untuk menciptakan ruang fiskal dalam merespons krisis. Artinya, kebijakan ekonomi harus bersifat *counter-cyclical*, di mana pemerintah mampu meningkatkan belanja publik dan insentif fiskal saat ekonomi melambat. Fleksibilitas ini harus disertai tata kelola fiskal yang transparan dan mekanisme automatic stabilizer seperti sistem perlindungan sosial berbasis data.
2. Joseph Stiglitz (2010) menggarisbawahi perlunya regulasi sektor keuangan yang tangguh dan akuntabel. Krisis sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan sistem keuangan global, maka negara perlu memperkuat pengawasan perbankan, mekanisme makroprudensial, dan kecepatan respons bank sentral dalam menjamin likuiditas dan

kepercayaan publik. Selain itu, koordinasi global antar otoritas keuangan menjadi kunci dalam mencegah penyebaran sistemik.

3. Integrasi *big data* dan AI dalam perumusan kebijakan ekonomi semakin penting. *Agrawal, Gans, dan Goldfarb* (2018) menunjukkan bahwa teknologi prediktif mampu mempercepat deteksi gejala ekonomi dan menyesuaikan kebijakan secara real-time. Negara-negara maju mulai menggunakan data granular dari transaksi digital dan media sosial untuk memantau konsumsi, volatilitas pasar, hingga dampak kebijakan dengan lebih akurat.
4. Negara perlu merancang kebijakan yang tangguh terhadap krisis iklim dan bencana alam yang bersifat ekonomi-sistemik. *Nicholas Stern* (2007) menekankan bahwa adaptasi terhadap risiko iklim harus terintegrasi dalam anggaran publik, perencanaan pembangunan, dan strategi pembiayaan. Instrumen seperti *climate-resilient budgeting*, asuransi bencana, dan investasi dalam infrastruktur hijau menjadi elemen penting dalam strategi ketahanan jangka panjang.

### **12.6. Peran Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Dalam menghadapi krisis lingkungan dan tekanan terhadap sumber daya alam, konsep ekonomi hijau (green economy) telah menjadi elemen strategis dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan dan

inklusif. Ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). Alih-alih memisahkan pertumbuhan ekonomi dari keberlanjutan, ekonomi hijau menekankan *decoupling*—yaitu pemisahan antara pertumbuhan ekonomi dengan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

1. Ekonomi hijau mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa. Transisi ini tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang teknologi bersih dan konservasi energi (IRENA, 2020). Negara-negara seperti Jerman, melalui kebijakan *Energiewende*, telah menunjukkan bahwa investasi energi hijau dapat menjadi katalis pertumbuhan dan inovasi.
2. Dalam konteks pembangunan wilayah dan kota, pendekatan ekonomi hijau mendorong penerapan ekonomi sirkular, yaitu sistem produksi dan konsumsi yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang. Prinsip ini didukung oleh kebijakan seperti standar efisiensi energi, pajak limbah, serta insentif untuk desain produk ramah lingkungan. Menurut *Ellen MacArthur Foundation* (2015), implementasi ekonomi sirkular di Eropa berpotensi menambah PDB sebesar 7% hingga 2030.
3. Ekonomi hijau juga mengubah arah kebijakan fiskal. *Nicholas Stern* (2007) menekankan bahwa investasi lebih awal dalam infrastruktur hijau lebih murah

daripada menanggung biaya kerusakan akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, instrumen seperti pajak karbon, *green bonds*, dan insentif fiskal untuk pertanian berkelanjutan kini menjadi bagian penting dari strategi kebijakan hijau berbagai negara.

## **12.7. Prospek Ekonomi Global dan Tantangan Geopolitik**

Prospek ekonomi global ke depan tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang kian kompleks, termasuk perang dagang, perubahan aliansi ekonomi, dan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan. Faktor-faktor ini membentuk ulang lanskap ekonomi dunia, dari arsitektur perdagangan hingga aliran modal dan teknologi.

Pertama, perang dagang antara kekuatan ekonomi besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah memicu ketidakpastian global yang signifikan. *Baldwin dan Evenett (2020)* menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis dan tarif balasan menyebabkan gangguan rantai pasok global, mendorong biaya produksi naik, dan memperlemah perdagangan internasional. Ketegangan ini juga mempercepat tren deglobalisasi, di mana negara-negara mulai mengalihkan produksi ke wilayah domestik atau mitra regional untuk mengurangi ketergantungan.

Kedua, pergeseran aliansi ekonomi dan fragmentasi perdagangan global mendorong munculnya blok-blok baru seperti RCEP di Asia dan kemitraan strategis antara negara-negara Global South. *Dani Rodrik (2021)* menyoroti bahwa sistem perdagangan multilateral

berbasis WTO mulai digantikan oleh perjanjian bilateral dan regional yang lebih fleksibel secara geopolitik. Ini menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga keterbukaan ekonomi tanpa mengabaikan kedaulatan nasional.

Ketiga, geopolitik energi dan keamanan pangan menjadi semakin relevan dalam ekonomi global, terutama setelah krisis geopolitik seperti invasi Rusia ke Ukraina. Ketergantungan negara pada impor energi atau pangan dari kawasan konflik memperbesar risiko inflasi dan disrupsi ekonomi. *IMF* (2023) memperingatkan bahwa dalam jangka menengah, ketegangan ini bisa memperlambat pertumbuhan global sekitar 0.2-0.4% per tahun jika fragmentasi ekonomi terus meningkat.

Keempat, dalam jangka panjang, geopolitik juga memengaruhi arah inovasi teknologi dan regulasi digital lintas batas. Negara-negara seperti AS dan Uni Eropa mulai menerapkan aturan baru yang membatasi ekspor teknologi *sensitif*, termasuk semikonduktor dan AI, ke negara pesaing. *Antras* (2020) menyebut fenomena ini sebagai “teknonasionalisme,” yang dapat memecah ekosistem inovasi global dan memperlambat difusi teknologi.

Dengan demikian, prospek ekonomi global sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi dan politik. Agar pertumbuhan tetap berkelanjutan, negara-negara perlu membangun kebijakan luar negeri ekonomi yang adaptif, memperkuat diplomasi perdagangan, serta mendorong kerja sama internasional yang berbasis pada kepentingan bersama dan stabilitas jangka panjang.

Tabel 12.1. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan

| Aspek                                  | Penjelasan   | Kebijakan   | Tokh                          |
|--|--|---|-------------------------------|
| Evolusi Pemikiran Ekonomi              | Dari klasik (Smith, Ricardo) ke kontemporer (Sen, Kahneman, Stiglitz)  | Pendekatan multidisipliner dan kontekstual                              | Smith, Keynes, Friedman, Sen  |
| Tantangan Ekonomi Modern               | Disrupsi teknologi, ketimpangan, krisis iklim, dan geopolitik          | Kebijakan adaptif, inklusif, dan berbasis bukti                         | Piketty, Rodrik, UNDP         |
| Rekomendasi Kebijakan Transformasional | Reformasi fiskal, perlindungan sosial, inovasi kelembagaan             | Desain kebijakan berbasis nilai dan keberlanjutan                       | Stiglitz, Acemoglu, Mazzucato |
| Digitalisasi dalam Ekonomi             | Integrasi AI, <i>big data</i> , dan ekonomi berbasis platform          | Regulasi digital, literasi teknologi, tata kelola data                  | Brynjolfsson, Varian, Zuboff  |
| Respon terhadap Krisis Global          | Pandemi, konflik, dan ketidakpastian sistemik                          | Kebijakan tangguh, stimulus fiskal, dan koordinasi global               | IMF, Krugman, Sachs           |
| Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan        | Transisi energi, konservasi sumber daya, dan pembangunan rendah karbon | Pajak karbon, insentif hijau, investasi hijau                           | Stern, Meek, UNEP             |
| Prospek Geopolitik dan Ekonomi Global  | Fragmentasi pasar, regionalisasi, dan diplomasi ekonomi                | Strategi diversifikasi, ketahanan rantai pasok, kerja sama multilateral | WTO, Gopinath, Baldwin        |

## DAFTAR PUSTAKA

- Academia. (2025). *Pemikiran Ekonomi Adam Smith*.  
[https://www.academia.edu/26449286/Pemikiran\\_Ekonomi\\_Adam\\_Smith](https://www.academia.edu/26449286/Pemikiran_Ekonomi_Adam_Smith)
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: The simple economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Ahn, S. (2002). *Competition policy in South Korea and the new economy*. OECD.
- Ajarekonomi. (2024). *Pemikiran Ekonomi dan Utilitarianisme John Stuart Mill*.  
<https://www.ajarekonomi.com/2024/11/pemikiran-ekonomi-dan-utilitarianisme.html>
- Akerlof, G. A., & Shiller, R. J. (2009). *Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism*. Princeton University Press.
- Ali, D. A., & Deininger, K. (2015). Is there a farm size–productivity relationship in African agriculture? Evidence from Rwanda. *Land Economics*, 91(2), 317–343.
- Antras, P. (2020). De-globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age. *NBER Working Paper No. 28115*.
- Ariely, D. (2008). *Predictably irrational: The hidden forces that shape our decisions*. HarperCollins.
- Aristoteles. (350 BCE). *Politics*. Harvard University Press.  
<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674992917>
- Arndt, C., & Oman, C. (2006). *Uses and abuses of governance indicators*. OECD Publishing.

- Arrow, K. (1972). *General Competitive Analysis*. North-Holland Publishing.
- Baldwin, R., & Evenett, S. (2020). *COVID-19 and trade policy: Why turning inward won't work*. CEPR Press.
- Basri, M. C. (2020). The economic impact of COVID-19 and policy responses in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 267–293.
- Becker, G. S. (1993). *Nobel lecture: The economic way of looking at behavior*. *Journal of Political Economy*, 101(3), 385–409.
- Benartzi, S., & Thaler, R. H. (2007). Heuristics and biases in retirement savings behavior. *Journal of Economic Perspectives*, 21(3), 81–104.
- Bernanke, B. S. (2010). *The Federal Reserve's response to the financial crisis*. Princeton University Press.
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). *Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission*. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 27–48.
- Bernanke, B. S., Laubach, T., Mishkin, F. S., & Posen, A. S. (1999). *Inflation targeting: Lessons from the international experience*. Princeton University Press.
- Birchall, J. (1997). *The international co-operative movement*. Manchester University Press.
- Blanchard, O., & Pisani-Ferry, J. (2020). *Monetary-fiscal interactions in the post-COVID world*. *Policy Brief*, Peterson Institute for International Economics.
- Blaug, M. (1997). *Economic theory in retrospect* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Blinder, A. S. (2008). *Keynesian economics*. In D. R. Henderson (Ed.), *The concise encyclopedia of economics* (2nd ed.). Liberty Fund.
- Bottomore, T. (1991). *A dictionary of Marxist thought* (2nd ed.). Blackwell.
- Brewer, A. (1987). *A guide to the works of François Quesnay*. Cambridge University Press.

- Brunner, K., & Meltzer, A. H. (1972). *Money and the economy: Issues in monetary analysis*. Cambridge University Press.
- Carney, M. (2020). *Value(s): Building a better world for all*. Harper Business.
- Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2012). *Principles of Economics*. Pearson.
- Chang, H. J. (2002). *Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective*. Anthem Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chen, C., Li, Y., & Liu, X. (2020). Artificial intelligence in macroeconomic forecasting: A review. *Journal of Economic Perspectives*, 34(2), 115–132.
- Corrales, J., & Penfold, M. (2011). *Dragon in the tropics: Hugo Chávez and the political economy of revolution in Venezuela*. Brookings Institution Press.
- Davidson, P. (1994). *Post Keynesian macroeconomic theory*. Edward Elgar.
- Dewi, E. Y., Yuliani, E., & Rahman, B. (2022). Analisis Peran Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*.
- Draper, H. (1966). *The two souls of socialism*. New Politics.
- Draper, H. (1966). *The two souls of socialism*. New Politics.
- Edwards, S. (1995). *Crisis and reform in Latin America: From despair to hope*. Oxford University Press.
- Ellen MacArthur Foundation. (2015). *Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe*.
- Elster, J. (1985). *Making sense of Marx*. Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Farrer, J. A. (1881). *Adam Smith and His Influence on Economics*. Oxford University Press.
- Friedman, M. (1960). *A program for monetary stability*. Fordham University Press.

- Friedman, M. (1968). *The role of monetary policy*. *American Economic Review*, 58(1), 1–17.
- Friedman, M. (1980). *Free to choose: A personal statement*. Harcourt.
- Friedman, M., & Schwartz, A. J. (1963). *A monetary history of the United States, 1867–1960*. Princeton University Press.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Free Press.
- G7. (2021). *G7 digital and technology ministers' declaration*. G7 Presidency.
- Gentzkow, M., Kelly, B., & Taddy, M. (2019). Text as data. *Journal of Economic Literature*, 57(3), 535–574.
- Glimcher, P. W., & Fehr, E. (Eds.). (2014). *Neuroeconomics: Decision making and the brain* (2nd ed.). Academic Press.
- Grove, V. M. (1972). *The political economy of François Quesnay*. Harvard University Press.
- Guggenheim, S. (2006). Crises and contradictions: Understanding the origins of a community development project in Indonesia. *Indonesia*, 72, 109–135.
- Hayek, F. A. (1994). *The fortunes of liberalism: Essays on Austrian economics and the ideal of freedom*. University of Chicago Press.
- Heckscher, E. F. (1935). *Mercantilism* (Vol. 1–2). Allen & Unwin.
- Hodgson, G. M. (2004). *The evolution of institutional economics: Agency, structure and Darwinism in American institutionalism*. Routledge.
- Hume, D. (1752). *Political Discourses*. Edinburgh: R. Fleming.
- Hutajulu, H., Mokoginta, M. M., Suparwata, D. O., Nopriyanti, M., Arahman, E., Rufaidah, E., Sastro Prawiro, I., Timisela, S. I., Radwitya, E., & Adimarta, T. (2023). *Ekonomi Pertanian: Peran dan Kontribusi Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Adab.

- IMF. (2021). *The use of big data in official statistics for macroeconomic policy*. International Monetary Fund.
- IMF. (2022). *World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis*. International Monetary Fund.
- IMF. (2023). *World Economic Outlook Update: Fragmentation and global growth prospects*. International Monetary Fund.
- IRENA. (2020). *Global renewables outlook: Energy transformation 2050*. International Renewable Energy Agency.
- Ito, T., & Mishkin, F. S. (2006). Two decades of Japanese monetary policy and the deflation problem. In *Monetary policy with very low inflation in the Pacific Rim* (pp. 131–193). University of Chicago Press.
- Jevons, W. S. (1871). *The theory of political economy*. Macmillan.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, 5(2), 207–232.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Macmillan.
- Knutson, B., Adams, C. M., Fong, G. W., & Hommer, D. (2001). Anticipation of increasing monetary reward selectively recruits nucleus accumbens. *Journal of Neuroscience*, 21(16), RC159.
- Kompasiana. (2024). *Teori Ekonomi Klasik John Stuart Mill*. <https://www.kompasiana.com/deviefriantyhendiar0012/674352e434777c776b56e202/teori-ekonomi-klasik-john-stuart-mill>
- Kompasiana. (2025). *Ekonomi Politik Internasional: Merkantilisme dan Proteksionisme*. <https://www.kompasiana.com/mochfarrel179/67fdb>

[37734777c060430ff42/ekonomi-politik-internasional-merkantilisme-dan-proteksionisme](https://www.kompasiana.com/irawan06117/67c1afffed641565026dfea2/the-wealth-of-national-adam-smith-dan-pengaruhnya-terhadap-ekonomi-saat-ini)

- Kompasiana. (2025). *The Wealth of Nations dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Saat Ini*.  
<https://www.kompasiana.com/irawan06117/67c1afffed641565026dfea2/the-wealth-of-national-adam-smith-dan-pengaruhnya-terhadap-ekonomi-saat-ini>
- Kornai, J. (1992). *The socialist system: The political economy of communism*. Princeton University Press.
- Krugman, P. (2009). *The return of depression economics and the crisis of 2008*. W.W. Norton & Company.
- Landerth, H. (1976). *History of Economic Thought*. Houghton Mifflin.
- Levy, S. (2006). *Progress against poverty: Sustaining Mexico's Progresa-Oportunidades Program*. Brookings Institution Press.
- Lin, J. Y. (2012). *Demystifying the Chinese economy*. Cambridge University Press.
- Lucas, R. E. (1976). *Econometric policy evaluation: A critique*. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1, 19–46.
- Magnusson, L. (1994). *Mercantilism: The shaping of an economic language*. Routledge.
- Mankiw, N. G. (1985). *Small menu costs and large business cycles: A macroeconomic model of monopoly*. *Quarterly Journal of Economics*, 100(2), 529–538.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics* (9th ed.). Worth Publishers.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital*. Verlag von Otto Meissner.
- Mas-Colell, A., Whinston, M. D., & Green, J. R. (1995). *Microeconomic theory*. Oxford University Press.
- Mazzucato, M. (2021). *Mission economy: A moonshot guide to changing capitalism*. Penguin.
- McClure, S. M., Laibson, D. I., Loewenstein, G., & Cohen, J. D. (2004). Separate neural systems value immediate and

- delayed monetary rewards. *Science*, 306(5695), 503–507.
- McKinsey & Company. (2018). *Smartening up with artificial intelligence (AI)*.
- Meek, R. L. (1962). *The economics of physiocracy: Essays and translations*. George Allen & Unwin.
- Menger, C. (1871). *Principles of economics*. Ludwig von Mises Institute.
- Mesa-Lago, C. (2009). *Reassembling social security: A survey of pensions and health care reforms in Latin America*. Oxford University Press.
- Mill, J. S. (1848). *Principles of Political Economy*. London: Longmans, Green, and Co.
- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an unstable economy*. Yale University Press.
- Mishkin, F. S. (2016). *The economics of money, banking, and financial markets* (10th ed.). Pearson Education.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Muth, J. F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. *Econometrica*, 29(3), 315–335.
- Namaguerizka. (2025). *Mengenal Empat Prinsip Utama Merkantilisme: Fondasi Kebijakan Ekonomi di Masa Lalu*.  
<https://www.namaguerizka.com/2025/05/mengenal-empat-prinsip-utama.html>
- Nasution, A. (2000). The meltdown of the Indonesian economy in 1997–1998: Causes and responses. *ASEAN Economic Bulletin*, 17(1), 77–91.
- Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology*, 2(2), 175–220.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.

- OECD. (2021). *International tax reform: OECD/G20 inclusive framework on BEPS – Progress report*. OECD Publishing.
- Ollman, B. (1976). *Alienation: Marx's conception of man in capitalist society* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Parkin, M. (2012). *Economics*. Pearson.
- Pelita. (2024). *Memahami Konsep Ekonomi Modern Melalui 'The Wealth of Nations' Karya Adam Smith*.  
<https://pelita.co.id/resensi-memahami-konsep-ekonomi-modern-melalui-the-wealth-of-nations-karya-adam-smith/>
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Plato. (380 BCE). *The Republic*. Cambridge University Press.
- Quesnay, F. (1758). *Tableau Économique*. Paris: Imprimerie Royale.
- Rahmadayanti, E. (2023). *Pemikiran Ekonomi pada Saat Zaman Yunani Kuno*. Kompasiana.
- Rambe, M. F. A., & Aslami, N. (2022). *Peran Pertanian di Indonesia dalam Memasuki Perdagangan Internasional*. Journal of Social Research.
- Rasulong, I., & Achsanuddin, A. N. (2024). *Evolusi Pemikiran Ekonomi: Dari Yunani Kuno hingga Ekonomi Kontemporer*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- RedaSamudera. (2024). *Definisi Merkantilisme Menurut Para Ahli*. <https://redasamudera.id/definisi-merkantilisme-menurut-para-ahli/>
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.
- Ricardo, D. (1817). *Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.

- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Rodrik, D. (2021). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Roll, E. (1992). *A history of economic thought* (5th ed.). Faber & Faber.
- Romer, D. (2011). *Advanced macroeconomics* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Salim, A., Wiratmo, B., & Suryaningrat, R. (2023). *Pemikiran Ekonomi Yunani Kuno*. Universitas Indonesia Press.
- Samuelson, P. A. (1947). *Foundations of economic analysis*. Harvard University Press.
- Samuelson, P. A. (1948). *Economics: An introductory analysis*. McGraw-Hill.
- Sargent, T. J., & Wallace, N. (1975). Rational expectations, the optimal monetary instrument, and the optimal money supply rule. *Journal of Political Economy*, 83(2), 241–254.
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
- Schumpeter, J. A. (1954). *History of economic analysis*. Oxford University Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Scott, W. R. (1937). *The Life and Works of Adam Smith*. Cambridge University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118.
- Simon, H. A. (1978). Rationality as process and as product of thought. *American Economic Review*, 68(2), 1–16.
- Skidelsky, R. (2009). *Keynes: The return of the master*. Penguin Books.

- Skidelsky, R. (2009). *Keynes: The return of the master*. Penguin Books.
- Smith, A. (1759). *The Theory of Moral Sentiments*. London: A. Millar.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Smith, A. (1776). *The wealth of nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Snowdon, B., & Vane, H. R. (2005). *Modern macroeconomics: Its origins, development and current state*. Edward Elgar.
- Spengler, J. J. (1964). *French predecessors of Adam Smith*. Duke University Press.
- Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Freefall: America, free markets, and the sinking of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Sunstein, C. R. (2013). *Simpler: The future of government*. Simon & Schuster.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Tietenberg, T., & Lewis, L. (2016). *Environmental and natural resource economics* (11th ed.). Pearson.
- Tooze, A. (2021). *Shutdown: How COVID shook the world's economy*. Viking.
- Turgot, A. R. J. (1766). *Réflexions sur la formation et la distribution des richesses*. Paris: Imprimerie Royale.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458.
- UNCTAD. (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development*. United Nations.
- UNCTAD. (2021). *Digital economy report 2021: Cross-border data flows and development*. United Nations.

- UNDP. (2021). *Data innovation for development: A review of selected practices*. United Nations Development Programme.
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. United Nations Environment Programme.
- Veblen, T. (1899). *The theory of the leisure class*. Macmillan.
- Veblen, T. (1904). *The theory of business enterprise*. Charles Scribner's Sons.
- Veblen, T. (1904). *The theory of business enterprise*. Charles Scribner's Sons.
- Vickers, J., & Yarrow, G. (1988). *Privatization: An economic analysis*. MIT Press.
- Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.
- Walras, L. (1874). *Elements of pure economics*. Routledge.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Windah, S. (2021). *Pemikiran Kaum Skolastik*. MataKita.
- Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press.
- World Bank. (2020). *Data for better lives: World development report 2021*. World Bank Publications.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*.
- Wright, E. O. (2010). *Envisioning real utopias*. Verso.
- Yusof, M., Mudiarta, K., & Tohis, A. (2016). *Etika Bisnis dan Keadilan dalam Transaksi*. Oxford University Press.
- Zhang, T., & Liu, H. (2021). *Digital finance and monetary policy transmission*. *Journal of Financial Innovation*, 1(3), 45–62.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

## PENULIS



**Dr. Ir. Jan Horas Veryady Purba, M.Si., CBPA., CPSP., CSRP., C.PIM.** adalah dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Penulis menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1989. Menyelesaikan studi S2 (2001) dan S3 (2012) di Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) IPB. Mata kuliah yang diampu adalah Statistika, Metodologi Penelitian, Pengantar

Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro. Tahun 2014-2018, menekuni riset CPO sebagai salah satu komoditas strategis nasional, dan telah mempublikasikan 5 buku tentang Minyak Sawit. Sebagai Dosen, aktif dalam kegiatan ilmiah, antara lain *Expert Meeting* CPO di Singapura (2015) Simposium Minyak Sawit di Universitas Wageningen, Belanda (2016), serta aktif menulis *Journal International* bereputasi, dan menghadiri *International Conference* di Jakarta (2017), Lombok (2018), Kuala Lumpur (2018), Medan (2017), Bangkok (2018), Bogor, (2018), dan Bandung (2018). Menerbitkan Buku Statistika Ekonomi dan Bisnis I (2018) dan Statistika Ekonomi dan Bisnis II (2018), *Sustainable Tourism* (2024), *Book Chapter: Dasar Manajemen: Chapter 4, Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Secara Kreatif* (2024), *Hipotesis Penelitian Kuantitatif* (2025), *Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia: Analisis, Perkembangan, dan Prospek* (2025), *Perekonomian Indonesia* (2025). Buku Ajar *Pengantar Ekonomi Makro* (2025), *Makroekonomi: Digitalisasi, Ekonomi Hijau, dan Integrasi Global* (2025).

## RINGKASAN BUKU

Buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi* ini menyajikan perjalanan intelektual ekonomi dari era pra-klasik hingga kontemporer, dimulai dari pemikiran Yunani dan Romawi, filsafat skolastik, hingga aliran merkantilisme dan fisiokrasi. Setiap bab menguraikan bagaimana gagasan ekonomi berkembang sebagai respons terhadap konteks sosial, politik, dan moral pada zamannya. Pemikiran klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill menjadi fondasi bagi teori pasar bebas, nilai kerja, dan distribusi, yang kemudian dikritisi dan dikembangkan oleh aliran sosialis dan neoklasik.

Bab-bab selanjutnya mengupas revolusi makroekonomi melalui Keynesianisme, serta munculnya mazhab monetaris sebagai respons terhadap krisis dan inflasi global. Buku ini juga membahas pendekatan institusional, perilaku, dan ekspektasi rasional yang memperkaya analisis ekonomi dengan perspektif sosial, psikologis, dan kelembagaan. Di era digital, pemikiran ekonomi semakin kompleks dengan hadirnya big data, kecerdasan buatan, dan tantangan globalisasi yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan distribusi kesejahteraan.

Sebagai penutup, buku ini mengajak pembaca untuk merefleksikan evolusi pemikiran ekonomi dalam menghadapi tantangan abad ke-21, termasuk krisis global, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan tematik dan analitis, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan pembuat kebijakan yang ingin memahami akar dan arah perkembangan ekonomi global secara kritis dan kontekstual.